

L K j I P

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2023



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjungpinang, 16 Februari 2024



**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

ST. IRMENDAS, S.E., Ak., CA., QGIA., CGCAE.
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19650726 199403 1 001



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua RPJMD Tahun 2021 - 2026. Laporan kinerja ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Laporan kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara optimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya mengumpulkan berbagai data kinerja untuk disajikan dalam laporan kinerja ini agar dapat menguraikan informasi kinerja yang objektif dan dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanjungpinang, Maret 2024



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	viii
Daftar Gambar	x
Ikhtisar Eksekutif	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2
1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis	3
1.4 Gambaran Umum Demografi	5
1.4.1 Jumlah Penduduk	5
1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi	8
1.4.3 PDRB Per Kapita	9
1.4.4 Persentase Penduduk Miskin	10
1.5 Tugas dan Struktur Organisasi	11
Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	11
1.6 Kondisi Pegawai	13
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A Rencana Strategis	15
Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	15
Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	16
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	17
B Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	24
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
1 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	27
2 Menurunnya Angka Kemiskinan	47
3 Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	75
4 Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	84
5 Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter	113
6 Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	122
7 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	131
8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	140
9 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	147
10 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	159
11 Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	168
12 Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat ...	177



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

BAB IV	PENUTUP	190
1	Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	190
2	Aspek Pelayanan Umum	191
3	Aspek Daya Saing Daerah	191

Lampiran :

- I Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
- II Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023





DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	2
Tabel 1.2	Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	6
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019– 2023	7
Tabel 1.5	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	23
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	25
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	27
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023	32
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD	33
Tabel 3.5	Ringkasan Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan IV-2023.....	33
Tabel 3.6	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional	34
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	37
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Pendapatan Per Kapita Tahun 2022-2023	38
Tabel 3.9	Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target RPJMD	38
Tabel 3.10	PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan harga Konstan 2010 Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023 dan Triwulan IV-2023 (miliar rupiah)	38
Tabel 3.11	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q, y-on-y dan c-to-c Triwulan IV-2023 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)	39
Tabel 3.12	PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau	40
Tabel 3.13	PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023 dan Triwulan IV-2023 (miliar rupiah)	40
Tabel 3.14	Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q, y-on-y dan c-to-c Triwulan IV-2023 Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (persen)	41
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	42
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023	42
Tabel 3.17	Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target RPJMD	42
Tabel 3.18	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional	43
Tabel 3.19	Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023 (persen)	45



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2023	47
Tabel 3.21	Karakteristik Pengangguran, Agustus 2019-Agustus 2023	49
Tabel 3.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota Tahun 2023	51
Tabel 3.23	Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	51
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD	52
Tabel 3.25	TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2023	52
Tabel 3.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2023	53
Tabel 3.27	Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2022-2023	56
Tabel 3.28	Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator Angka Pengangguran Tahun 2023	57
Tabel 3.29	Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023	59
Tabel 3.30	Target dan Realisasi Indikator Program Pendukung Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2023	59
Tabel 3.31	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin dari Tahun 2022-2023	64
Tabel 3.32	Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Tahun 2023	65
Tabel 3.33	Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2023	72
Tabel 3.34	Pagu dan Realisasi Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023	73
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	76
Tabel 3.36	Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.....	77
Tabel 3.37	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023	79
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Antisipatif	84
Tabel 3.39	Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	86
Tabel 3.40	Capaian Indeks Sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau	94
Tabel 3.41	Capaian Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	98
Tabel 3.42	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	103
Tabel 3.43	Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023	104
Tabel 3.44	Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023	105
Tabel 3.45	Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi General Tahun 2023	107
Tabel 3.46	Target dan Realisasi anggaran Pendukung Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023	110
Tabel 3.47	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	114
Tabel 3.48	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023	114



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.49	Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD	114
Tabel 3.50	Perbandingan Target kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional	115
Tabel 3.51	Capaian Kinerja Indikator Indeks IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023	116
Tabel 3.52	Realisasi Program dan Anggaran Dalam Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2023	120
Tabel 3.53	Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan Tahun 2023	123
Tabel 3.54	Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Menurut Kabupaten/Kota	125
Tabel 3.55	Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK secara Nasional	126
Tabel 3.56	Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2023	128
Tabel 3.57	Jumlah PPPK di Provinsi Kepulauan Riau	129
Tabel 3.58	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2023	131
Tabel 3.59	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2023	132
Tabel 3.60	Evaluasi Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018-2022	132
Tabel 3.61	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022	133
Tabel 3.62	Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau	133
Tabel 3.63	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun di Provinsi Kepulauan Riau	134
Tabel 3.64	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2023	135
Tabel 3.65	Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se Indonesia Tahun 2023	135
Tabel 3.66	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	141
Tabel 3.67	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Berbanding Target Nasional Tahun 2023	141
Tabel 3.68	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	142
Tabel 3.69	Prevalensi Stunting se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023	142
Tabel 3.70	Persentase Stunting di Indonesia Tahun 2022-2023	142
Tabel 3.71	Realisasi Keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang Menunjang Penurunan Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau	145
Tabel 3.72	Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Rasio Elektrifikasi Tahun 2023	147
Tabel 3.73	Data Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	148
Tabel 3.74	Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023	149
Tabel 3.75	Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	150
Tabel 3.76	Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja	153



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.77	Data Capaian Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran Berjalan	153
Tabel 3.78	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022	154
Tabel 3.79	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023	154
Tabel 3.80	Alokasi dan Realisasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun Anggaran 2023	155
Tabel 3.81	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional	155
Tabel 3.82	Data Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	159
Tabel 3.83	Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	159
Tabel 3.84	Realisasi Trayek / Lintas Angkutan Tahun 2023	161
Tabel 3.85	Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2023	162
Tabel 3.86	Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2023	162
Tabel 3.87	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2021, 2022 dan 2023	163
Tabel 3.88	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tingkat Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	163
Tabel 3.89	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD	163
Tabel 3.90	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Pendukung	165
Tabel 3.91	Kinerja Sumberdaya Manusia yang Terlibat	166
Tabel 3.92	Capaian Kinerja Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Tahun 2023	168
Tabel 3.93	Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik	188
Tabel 3.94	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023	170
Tabel 3.95	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Akhir RPJMD	170
Tabel 3.96	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023	170
Tabel 3.97	Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	171
Tabel 3.98	Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023	174
Tabel 3.99	Perbandingan Persentase Penambahan Anggaran Pendukung Kinerja Panjang Jalan Kondisi Baik Tahun 2022 dan 2023	176
Tabel 3.100	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	179
Tabel 3.101	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD	179
Tabel 3.102	Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2023	186
Tabel 3.103	Anggaran Belanja Langsung Sasaran Strategis	186



DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 (BPMD Disduk Capil)	6
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 (BPS Provinsi Kepri Tahun 2023)	7
Grafik 1.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2023 (%)	8
Grafik 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	9
Grafik 1.5	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau	9
Grafik 1.6	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	10
Grafik 1.7	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	13
Grafik 1.8	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Tahun 2023	13
Grafik 3.1	Pertumbuhan PDRB Triwulanan 2020-2023 (y-on-y) (persen)	28
Grafik 3.2	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan III 2023 (y-on-y) (persen)	29
Grafik 3.3	Pertumbuhan PDRB Triwulanan 2020-2023 (q-to-q) (persen)	30
Grafik 3.4	Kontribusi PDRB (ADHB) Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV-2023 (persen)	30
Grafik 3.5	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV 2023 (q-to-q) (persen)	31
Grafik 3.6	Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan III-2016-2023 (c-to-c) (persen)	31
Grafik 3.7	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan III-2023 (c-to-c) (persen)	32
Grafik 3.8	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2019-2023 (%)	34
Grafik 3.9	Perkembangan Gini Ratio, September 2015-Maret 2023	43
Grafik 3.10	Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2023	48
Grafik 3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2023	50
Grafik 3.12	Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Tahun 2019-2023	55
Grafik 3.13	Kontribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, agustus 2022 dan 2023 (persen)	64
Grafik 3.14	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019-2023 ..	65
Grafik 3.15	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2022 September (%)	94
Grafik 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Sistem Merit	94
Grafik 3.17	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Target RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	106
Grafik 3.18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau, 2022-2023.....	116
Grafik 3.19	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau, 2020-2023	117



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Grafik 3.20	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kepulauan Riau 2020-2023	119
Grafik 3.21	Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan Kepulauan Riau (ribu rupiah) 2020-2023	119
Grafik 3.22	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau 2020-2023	120
Grafik 3.23	Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi sekolah SMA/SMK Tahun 2021, 2022 dan 2023... ..	124
Grafik 3.24	Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMS/SMK	124
Grafik 3.25	Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional	127
Grafik 3.26	Penyebaran PPPK di Provinsi Kepulauan Riau	129
Grafik 3.27	Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2023	148
Grafik 3.28	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	149
Grafik 3.29	Capaian Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019-2023	150
Grafik 3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu dengan Nasional	180





DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Peta Provinsi Kepulauan Riau	3
Gambar 1.2	Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	4
Gambar 3.1	Penghargaan Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan dengan Opini WTP	93
Gambar 3.2	Penghargaan Nilai Sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau	95
Gambar 3.3	Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	96
Gambar 3.4	Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik	97
Gambar 3.5	Kegiatan yang Menunjang Meningkatkan UHH Provinsi Kepulauan Riau	118
Gambar 3.6	Peningkatan Jalan Nusantara Kabupaten Bintan	172
Gambar 3.7	Pembangunan Jalan Tiangau Kabupaten Kepulauan Anambas	172
Gambar 3.8	Rekonstruksi Simp Bukit Leman - Trans Batubi Kabupaten Natuna	172
Gambar 3.9	Segmen Penanganan Ruas Jalan Sei Asam – Sebele – Penarah – Lebu Kabupaten Karimun (DAK – Tematik 03)	173
Gambar 3.10	Peningkatan Jalan Belungkur (Lanjutan) Kabupaten Lingga	173





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Provinsi Kepulauan Riau. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.



1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002, Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto



penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 40P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2024, dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2024 merupakan periode pertama Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2021-2024.

Secara Administratif Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, serta memiliki 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Letak astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

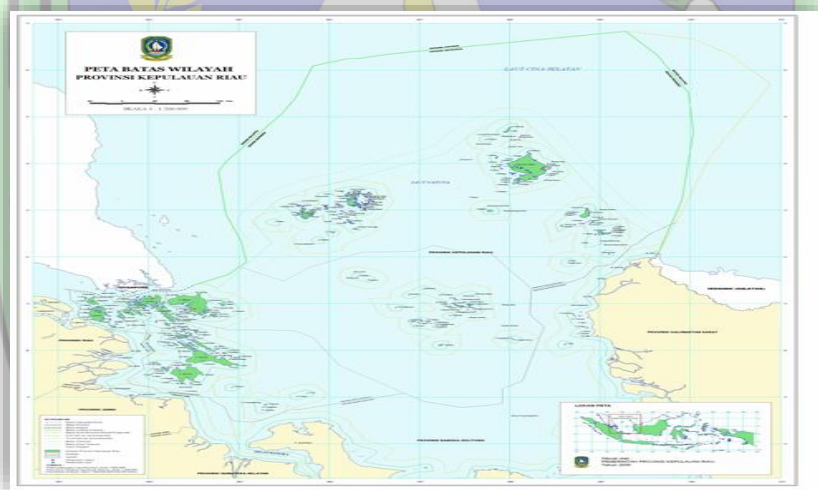
No	Kab / Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)			Jumlah Kel /Desa
			Daratan	% Daratan	Jumlah Kec	
1	Bintan	Bintan Buyu	1.317.149	15,93	10	51
2	Karimun	Tanjung Balai	930.453	11,25	14	71
3	Natuna	Ranai	1.999.155	24,17	17	77
4	Lingga	Daik	2.210.819	26,73	13	84
5	Kepulauan Anambas	Tarempa	627.027	7,58	10	54
6	Kota Batam	Batam	1.034.732	12,51	12	64
7	Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	150.373	1,82	4	18
Provinsi Kepulauan Riau			8.269.708	100	80	419



1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang daerahnya sebagian besar adalah daerah kepulauan. Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 425.282,68 km², dengan luas lautan 417.012,97 km² (98,05 persen) dan luas daratannya sebesar 8.269,71 km² (1,95 persen). Luas daratan sekitar 0,43 % dari luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' dan 109°40' Bujur Timur.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan. Letak dan kondisi geografis ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau, hal ini karena Provinsi Kepulauan Riau berada di jalur emas perdagangan di bagian barat Indonesia yang dapat menjadi potensi untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah maupun devisa bagi Negara Indonesia. Berikut ini peta Provinsi Kepulauan Riau:



Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota serta dikelilingi oleh lautan dan memiliki pulau terluar yang berbatasan dengan Negara tetangga, hal ini yang membuat Provinsi Kepulauan Riau harus memperkuat diplomatik wilayah, sehingga wilayah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau khususnya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan. Bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau laut merupakan potensi, jumlah lautnya yang luas, pantainya yang indah serta hasil lautnya yang melimpah sehingga membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi sasaran Negara luar/tetangga untuk berinvestasi, terutama dibidang perhotelan/resort. Luasnya wilayah laut lebih besar dibandingkan daratan, sehingga Provinsi Kepulauan Riau harus mengembangkan maritim menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Selain itu juga memiliki ribuan pulau dengan keindahan alami yang menawan dan eksotis, serta Kekayaan sumber daya alam (perikanan, kelautan, energi, mineral) yang melimpah. Tentunya hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaannya.

Berikut ini Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

**Gambar 1.2
Batas Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau**

1) Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

2) Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

3) Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi

4) Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002

1) Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja

2) Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

4) Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

5) Sebelah Barat: Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal klarifikasi data geografis Kabupaten/Kota dengan mengambil data dari interpretasi peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000. Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau dengan jumlah



yang bernama 1.350 pulau dan yang belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Adapun hasil verifikasi Ulang Pulau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 terdapat 2.028.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.028 pulau yang terdiri dari 395 pulau yang sudah berpenghuni dan 1.633 pulau yang belum berpenghuni, terdiri dari Kota Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit, yaitu 8 pulau, yang terdiri dari 2 pulau berpenghuni dan 6 pulau yang tidak berpenghuni, sedangkan Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak, dengan 630 pulau yang terdiri dari 77 pulau berpenghuni dan 553 pulau yang tidak berpenghuni. Kota Batam memiliki jumlah pulau yang berpenghuni terbanyak (6,56%), sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki jumlah pulau yang berpenghuni paling sedikit (1,33%). Jumlah masing-masing pulau yang dimiliki Kabupaten/Kota tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Pulau Berpenghuni		Pulau Tidak Berpenghuni		Total Jumlah Pulau
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
1	Bintan	48	2,37	215	10,60	263
2	Karimun	73	3,60	175	8,63	248
3	Natuna	35	1,73	137	6,79	172
4	Lingga	77	3,80	553	27,27	630
5	Kepulauan Anambas	27	1,33	212	10,45	239
6	Kota Batam	133	6,56	321	16	454
7	Kota Tanjungpinang	2	0,10	6	0,30	8
8	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	14	0,69	14
Provinsi Kepulauan Riau		395	19	1.633	80,52	2.028

Sumber: Verifikasi Ulang Pulau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 /Kepulauan Riau Dalam Angka 2023

1.4 Gambaran Umum Demografi

1.4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 berdasarkan data base kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 2.150.329 jiwa (Semester I Tahun 2023). Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 57,70% atau sekitar 1.240.792 jiwa, sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,30% atau sekitar 49,274 Jiwa. Hal ini memperlihatkan masih kurang meratanya persebaran penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut ini adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

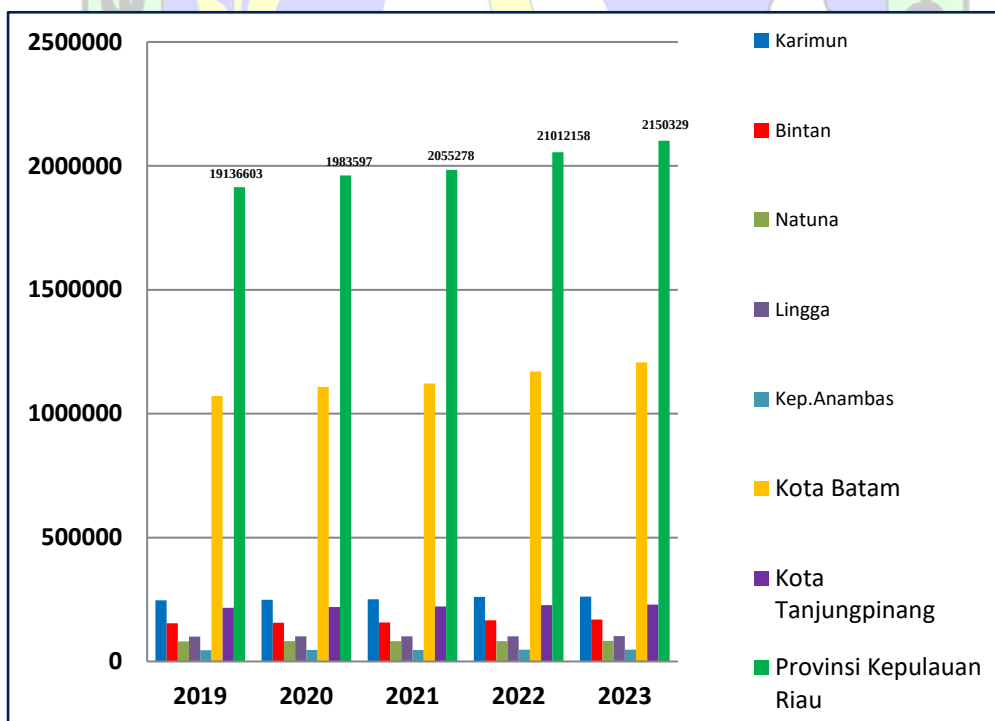
2023

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019 – 2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Karimun	249.375	251.510	260.438	262.075	267.762
2	Bintan	156.105	157.459	165.920	169.447	173.171
3	Natuna	81.786	82.192	82.537	82.824	83.450
4	Lingga	100.905	101.429	101.863	102.150	102.474
5	Kep.Anambas	46.271	47.022	47.803	48.084	49.274
6	Kota Batam	1.107.551	1.121.875	1.169.648	1.207.082	1.240.792
7	Kota Tanjung Pinang	219.395	222.110	227.069	229.553	233.406
	Provinsi Kepulauan Riau	1.961.388	1.983.597	2.055.278	2.101.215	2.150.329

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019 - 2023



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

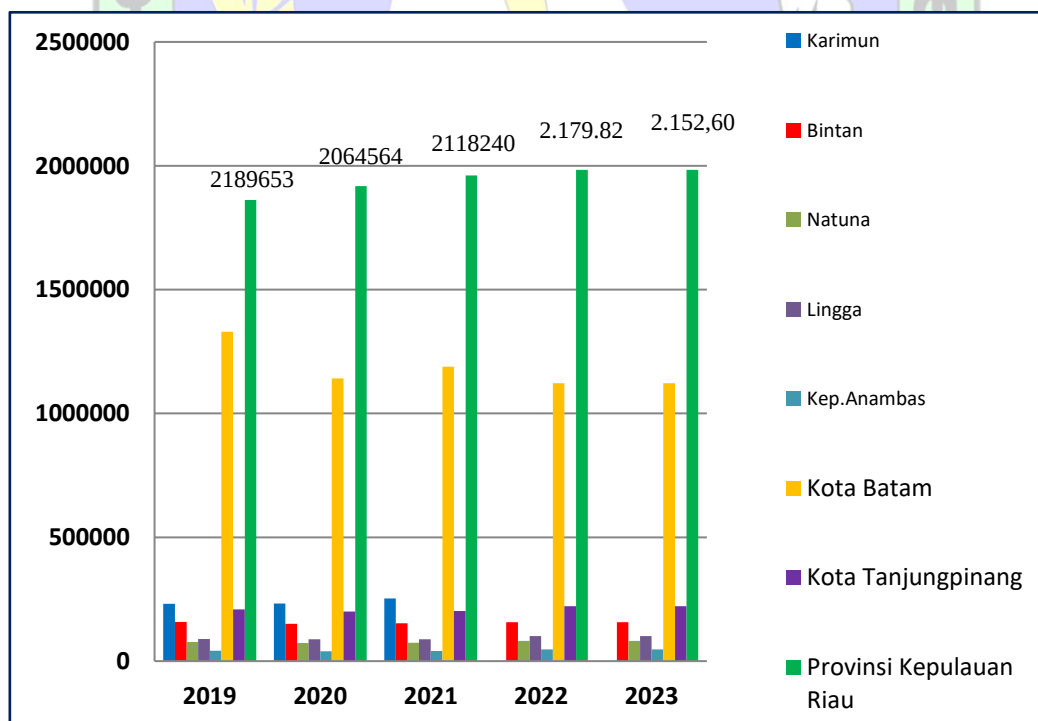
2023

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019 - 2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Karimun	232.797	253.457	259.45	266,18	260,60
2	Bintan	159.403	159.518	162.56	165,78	165,90
3	Natuna	77.771	81.495	83.36	85,45	84,60
4	Lingga	89.781	98.633	100.66	102,85	101,00
5	Kep.Anambas	42.309	47.402	48.74	50,30	49,10
6	Kota Batam	1.376.009	1.196.396	1.230.10	1.269,41	1.256,60
7	KotaTanjung Pinang	211.583	227.663	233.37	239,85	234,80
	Provinsi Kepulauan Riau	2.189.653	2.064.564	2.118.24	2.179,82	2.152,60

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup tinggi, Hal ini sebagaimana diungkapkan berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 2.152,60 jiwa, terutama dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-rata sebesar 58,37% atau sebesar 1.256,60 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk

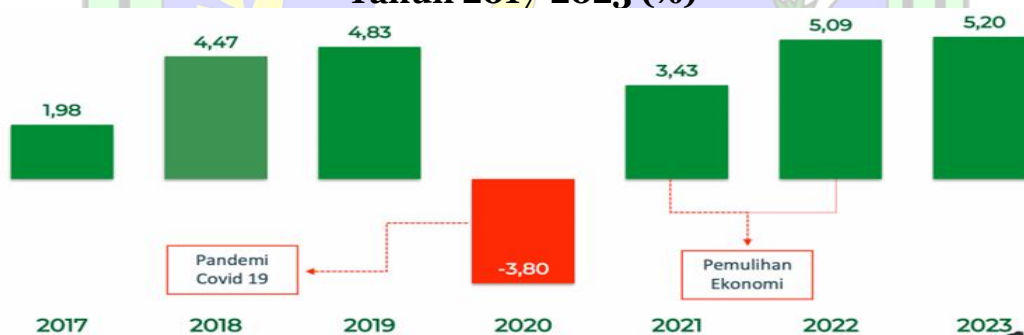


penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain.

1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun waktu tahun 2021-2022, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 %. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 5,20%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 %, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 1,99%. Secara lengkap perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 1.3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2023 (%)

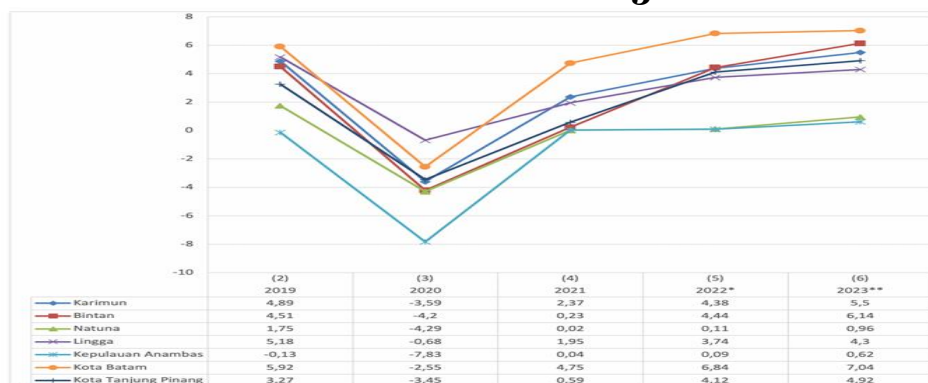


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan BPS Pusat Tahun 2023

Hampir seluruh sektor perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdampak akibat pandemik Covid-19. Sektor yang mengalami dampak paling besar terjadi pada sektor Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dan Jasa Lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif di atas 40% di tahun 2023 ini. Sementara itu, tercatat hanya 3 sektor yang bertumbuh secara positif di tahun 2023 yaitu pada sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.



Grafik 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 tertinggi adalah Kota Batam sebesar 6,84%, selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 4,44% dan Kabupaten Karimun sebesar 4,38%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,09%.

1.4.3 PDRB Per Kapita

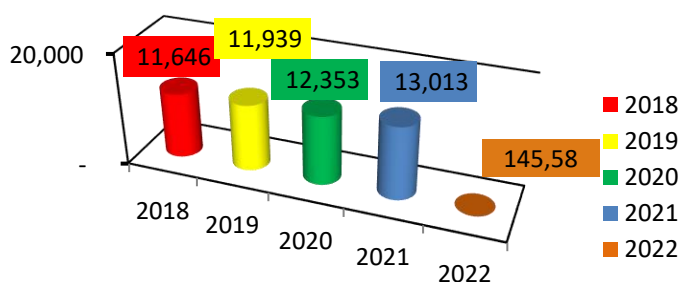
PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 145,58, ribu. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 116,46 ribu.

Tabel 1.5
**Perkembangan PDRB PerKapita Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018- 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp ribu)	116,46	119,39	123,53	130,13	145,58

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Grafik 1.5
**Perkembangan PDRB Per Kapita
Provinsi Kepulauan Riau**



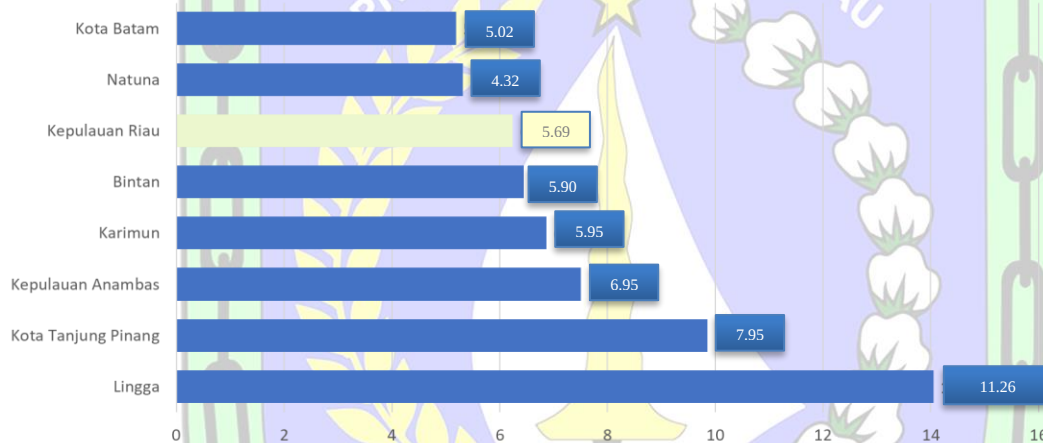
Sumber. BPS Provinsi Kepulauan Riau 2023



1.4.4 Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 5,69%, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,24% atau sebesar 1,15% dilihat pada grafik 1.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, yaitu dari sebesar 5,69%. Dalam kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 1,15%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya.

Grafik 1.6
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2022

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 5,69%, lebih baik dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,36%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, namun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



1.5 Tugas dan Struktur Organisasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dengan mensejahterakan masyarakat melalui penyiapan Sumber Daya Manusia dengan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan.



Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk

Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.6 Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi

Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Sekretariat

a. Sekretaris Daerah

- a.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
- a.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
- a.3. Asisten Administrasi Umum.

b. Staf Ahli

- b.1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum,
- b.2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan,
- b.3. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

c. Biro

- c.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
- c.2. Biro Hukum,
- c.3. Biro Kesejahteraan Rakyat,
- c.4. Biro Perekonomian dan Pembangunan,
- c.5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa,



- c.6. Biro Organisasi,
- c.7. Biro Umum,
- c.8. Biro Administrasi Pimpinan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Dinas Daerah

- 2.1. Dinas Pendidikan,
- 2.2. Dinas Kesehatan,
- 2.3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,
- 2.4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2.5. Dinas Sosial,
- 2.6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- 2.7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- 2.8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 2.9. Dinas Perhubungan,
- 2.10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 2.11. Dinas Komunikasi dan Informatika,
- 2.12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- 2.13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
- 2.14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 2.15. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga,
- 2.16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
- 2.17. Dinas Kelautan dan Perikanan,
- 2.18. Dinas Pariwisata,
- 2.19. Dinas Kebudayaan,
- 2.20. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan,
- 2.21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
- 2.22. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

3. Inspektorat Daerah.

4. Badan Daerah.

- 4.1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,
- 4.2. Badan Keuangan dan Aset Daerah,
- 4.3. Badan Pendapatan Daerah,
- 4.4. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI,

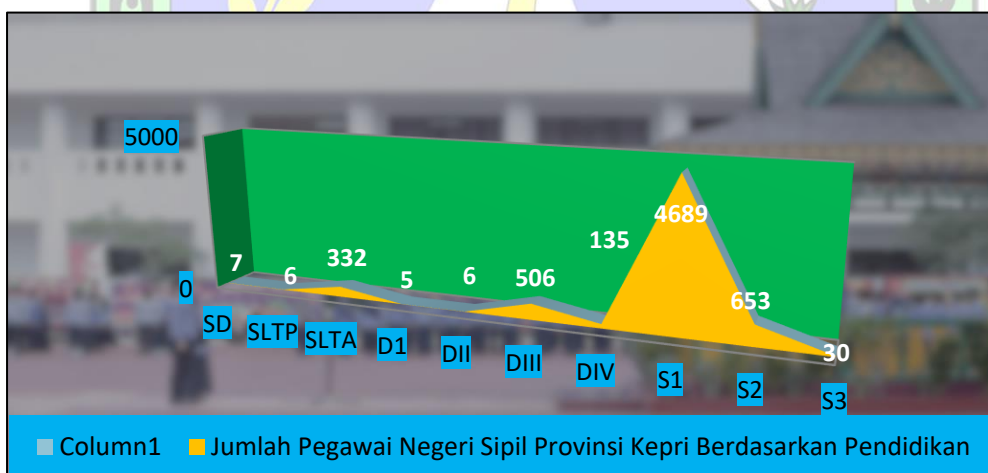


- 4.5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- 4.6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah,
- 4.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- 4.8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 4.9. Badan Penghubung Daerah.

1.7 Kondisi Pegawai

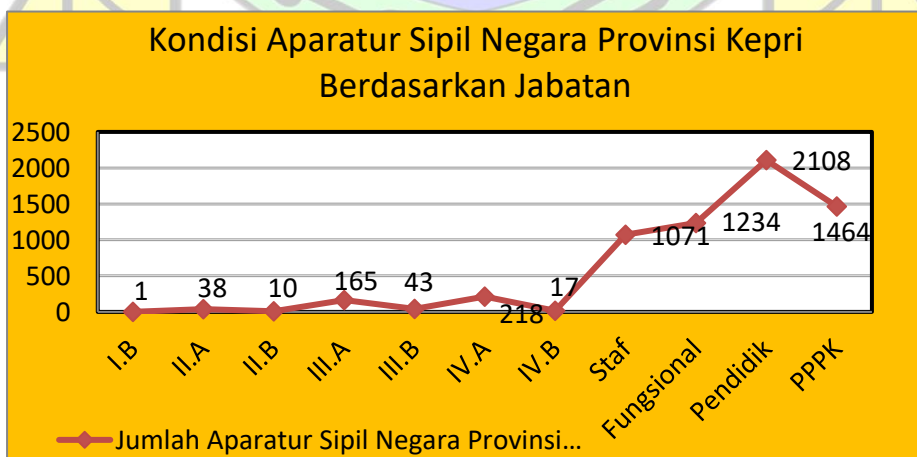
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6.369 orang, dimana jumlah tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Adapun kondisi atau jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2023 sebagai berikut :

Grafik 1.7
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023



Sumber: BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2023

Grafik 1.8
Kondisi Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan



Sumber: BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2023



1.8 Sistematika Penulisan

Laporan kinerja ini mengungkapkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Adapun sistematika penulisan laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi, profil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Dalam bab ini dijelaskan pencapaian sasaran-sasaran organisasi serta pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB IV Penutup.

Dalam bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Lampiran:

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan daftar penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 – 2026. Dalam RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*ultimate outcome*) yang diharapkan.

A.1 Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“ TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR,
BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA “**



Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kepulauan Riau yang makmur : mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
- Kepulauan Riau berdaya saing : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Kepulauan Riau berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

A.2 Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

2. Misi Kedua

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

3. Misi Ketiga

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan taqwa.

4. Misi Keempat

Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

5. Misi Kelima

Mempercepat konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.



A.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sementara itu sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan daerah.

Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*), menggambarkan hasil yang ingin dicapai, mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, mencerminkan *core area* dimana organisasi berperan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2026 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut :

1) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama

(1.1) *Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah dan Keberlanjutan Lingkungan.*

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	3.305	3.330

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Optimalisasi Sektor Perikanan - Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Harga berlaku (miliar rupiah)	3.305	3.330
2	Peningkatan Sektor Pariwisata - Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga berlaku (miliar rupiah)	2.626	3.495
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	69,95	70,38
4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari - Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku (miliar rupiah)	27,20	27,50



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

(1.2) Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	PDRB per Kapita ADHK (juta rupiah)	81,91	88,27
2	Indeks Gini (Indeks)	0,329	0,318
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9 - 5,8	5,2-6,3

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan - Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB Harga berlaku (miliar rupiah) - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku (%) - Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku (%) - Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%) - Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) - Persentase Koperasi yang Berkualitas (%) - Persentase UMKM yang Naik Kelas (%) - Nilai Realisasi Investasi PMA (miliar rupiah) - Nilai Realisasi Investasi PMDN (miliar rupiah)	59.334 40,20 8,56 6,00 3,40 53,04 30,55 23,000 13,500	71.550 41,55 8,62 6,60 4,20 56,04 31,57 24.500 15.500
2	Peningkatan PAD - Persentase Peningkatan PAD (%)	5,24	5,91
3	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan) - Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (miliar rupiah) - Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	2.181 62,81	2.196 62,84

2) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua

(2.1) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37	72,17



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi - Indeks SPBE (Indeks)	2,90	3,18
2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakip) - Indeks Pelayanan Publik (Indeks) - Opini Laporan Keuangan (Opini)	BB B WTP	BB B WTP
3	Management ASN yang Profesional - Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit) (Indeks)	Baik (294)	Sangat Baik (325)
4	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana - Indeks Kapasitas Daerah (Indeks)	0,46	0,73
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	1,25	1,25

3) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga

(3.1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Angka Kemiskinan	5,74	5,57

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Menurunnya angka Kemiskinan - Angka Kemiskinan (%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,74 9,50	5,57 7,50
2	Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif - Indeks Desa Membangun (Indeks)	0.6861 (Desa Berkembang)	0.7101 (Desa Berkembang)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

(3.2) Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	78,47

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat - Angka Harapan Hidup (Tahun) - Prevalensi Stunting (%)	70,41 15,30	70,85 12,80
2	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata lama Sekolah (Tahun) - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (%)	12,93 10,15 100	12,96 10,18 100
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak - Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks) - Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	93,30 66,00 76,03	93,60 69,00 79,36
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks) - SD (Sport Development Index) (Indeks)	0,58 20,29	0,672 7,67

4) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat

(4.1) Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,9	66,9



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu - Nilai Ekonomi Budaya (Nilai) - Nilai Warisan Budaya (Nilai) - Nilai Ekspresi Budaya (Nilai) - Nilai Budaya Literasi (Nilai)	28,16 49,64 1,55 72,25	28,27 52,04 1,69 73,50
2	Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama - Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks) - Indeks Ketahanan Nasional (Skor)	75,95 2,83	80,60 2,89

5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima

(5.1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Rasio Konektivitas	44,25	65

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar - Rasio Elektrifikasi (Rasio) - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%) - Cakupan Pelayanan Air Limbah (%) - Cakupan Pelayanan Drainase (%) - Cakupan Pelayanan Persampahan (%) - Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	96,00 97,03 93,06 51,3 68,90 123,73	96,60 98,63 100 60,3 72,00 0
2	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir - Persentase Jalan Kondisi Baik (%) - Rasio Konektivitas Angkutan Darat (Rasio) - Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan (Rasio) - Rasio Konektivitas Angkutan Laut (Rasio)	64,75 18 26,25 36,36	69,25 30 35 50

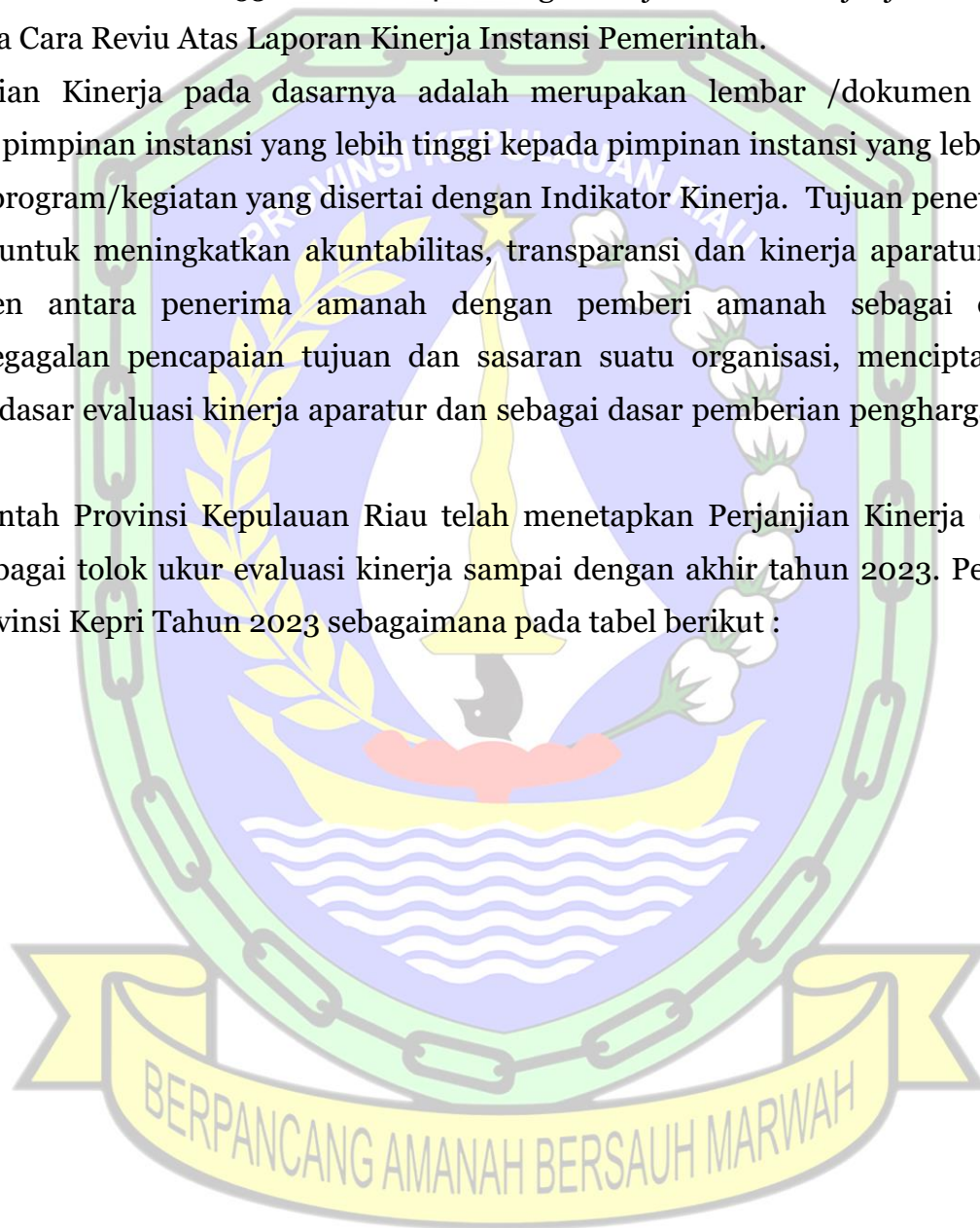


B. PERJANJIAN KINERJA

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan *reward and punishment*.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Provinsi Kepri Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	- Pertumbuhan Ekonomi	4,9-5,8 %
		- Pendapatan Per Kapita	81,91 Juta Rupiah
		- Indeks Gini	0,329 Indeks
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	- Angka Pengangguran	9,50 %
		- Angka Kemiskinan	5,74%
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 indeks
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37 Indeks
5	Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,14 Indeks
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30 Indeks
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,30 %
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	- Rasio Elektrifikasi	96 Rasio
		- Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	123,73 Ha
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	44,25 Rasio
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	64,75 %
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,9 Indeks



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *e-performance* adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{CAPAIAN KINERJA}}{\text{TARGET}} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{CAPAIAN KINERJA}}{\text{TARGET}} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 - 5,8 %	5,20 %	96 %
		Pendapatan Per Kapita	81,91 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	113 %
		Indeks Gini	0,329 Indeks	0,340 Indeks	89 %
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,50 %	6,80 %	128,42 %
		Angka Kemiskinan	5,74 %	5,69 %	100,87 %
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 Indeks	74,26 Indeks	106 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37 Indeks	73,56 Indeks	104,53 %
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,14 Indeks	79,08 Indeks	102 %
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	84,97 %	84,97 %
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30 Indeks	93,50 Indeks	100,21 %
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,30 %	15,40 %	99,3 %
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	123,73 Ha	135,07 Ha	51,77 %
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	44,25 Rasio	48,63 Rasio	109 Rasio
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	64,75 %	70,37 %	108,68 %
12	Pembinaan Keagamaan , Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indek Pembangunan Kebudayaan	63,9 Indeks	56,50 Indeks	88,41 Indeks

III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Tahun 2023 yang ditetapkan pada bulan Januari. Dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:



SASARAN. 1

Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terlepas dari adanya kritik yang meragukan kemampuan indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan, namun sejauh ini indikator tersebut masih dianggap sebagai alat ukur yang sederhana dan mudah digunakan. Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 salah satunya adalah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang indikator kinerja nya mencakup pertumbuhan ekonomi, Pendapatan PerKapita dan Indeks Gini, Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagai koordinator merangkul Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pendukung indikator Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita dan indeks Gini tersebut, tidak lepas juga dukungan dari semua elemen baik pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, dan juga media.

❖ **Pertumbuhan Ekonomi**

A. Data Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan informasi ketercapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 2023 :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 – 5,8%	5.20	106

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 4.9-5.8% pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 5.20% dan capaian kinerja sebesar 96% atau dalam **Kategori Sangat Baik**.

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan IV-2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,45 persen, tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan IV-2022 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 6,40 persen. Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan IV-

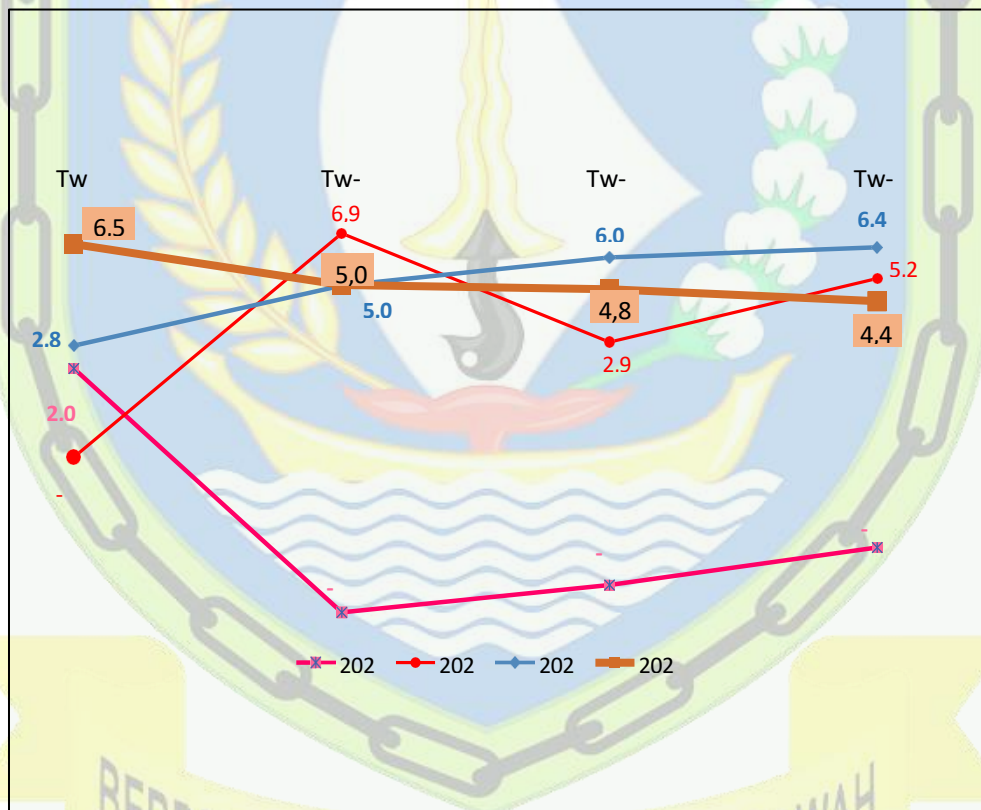


2023 dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 21,09 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,20 persen dan kategori konstruksi sebesar 11,07 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2023 secara *year on year*, konstruksi memberikan andil pertumbuhan ekonomi sebesar 12,8 persen diikuti industri keuangan sebesar 0,77 persen, dan kategori perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,46 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 13,91 persen; dan Konstruksi sebesar 13,89 persen.

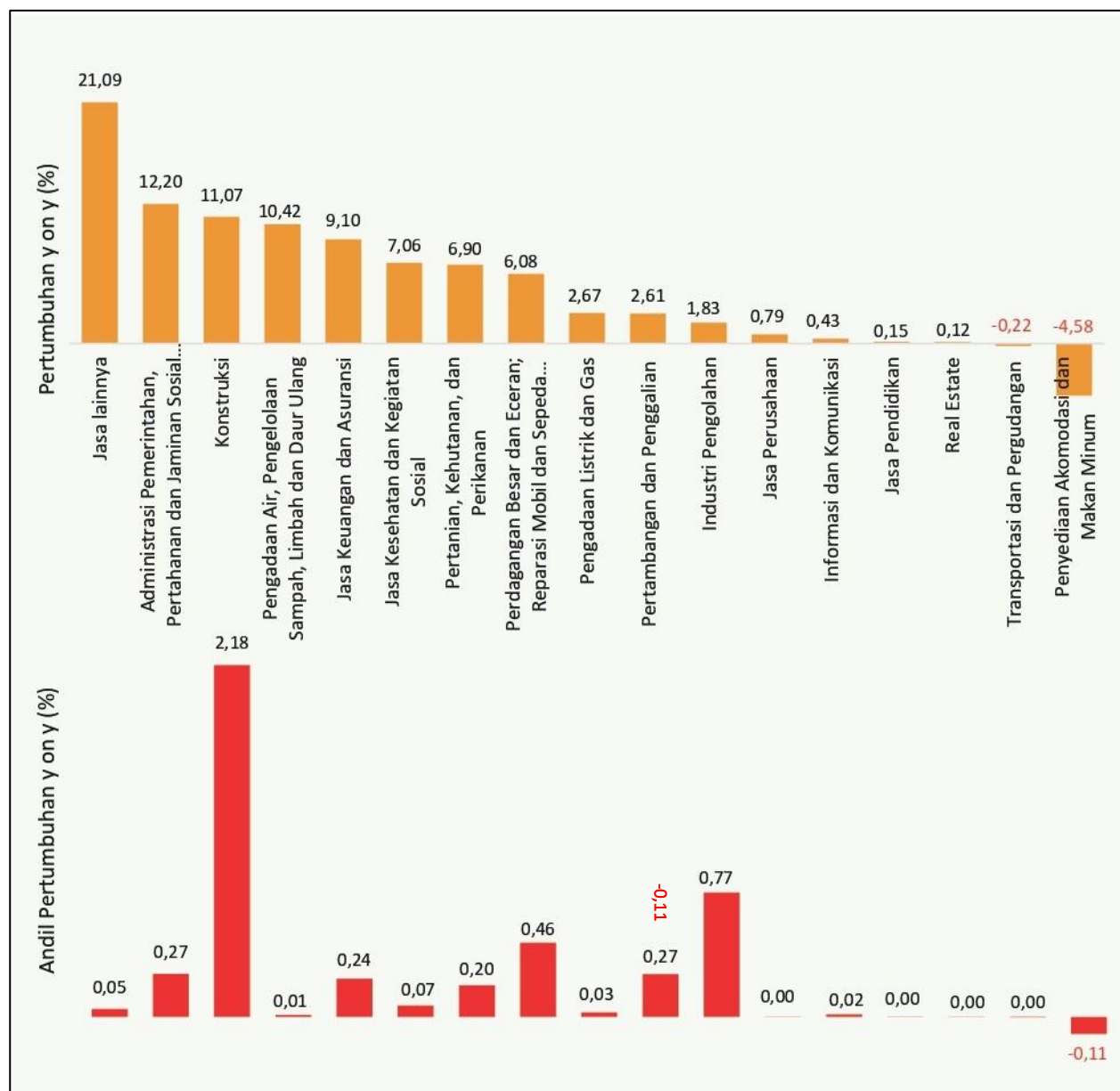
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan III-2023 secara *year on year*, Konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,56 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil sebesar 0,80 persen; dan Informasi dan Komunikasi memberikan andil sebesar 0,51 persen.

Grafik 3.1
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2020-2023 (y-on-y) (persen)



Grafik 3.2

Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan III 2023 (y-on-y) (persen)



➤ **Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)**

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 6,80 persen bila dibandingkan dengan triwulan III-2023 (q-to-q). Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 36,69 persen; disusul kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 36,67 persen; diikuti kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,14 persen.

Andil pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan sebesar 3,86 persen; diikuti kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan sebesar 2,41 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil

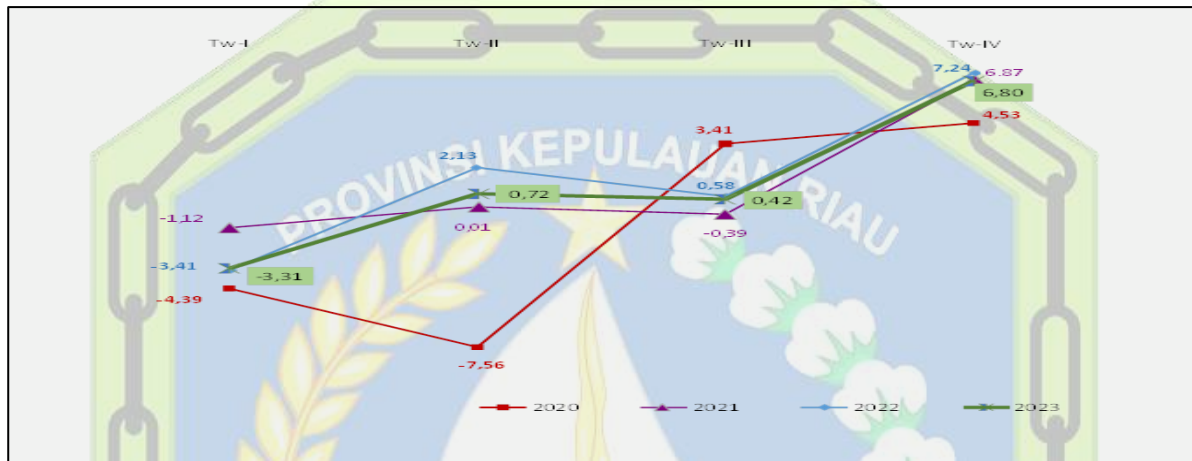


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

pertumbuhan sebesar 0,67 persen. Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2023 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (40,23 persen); Konstruksi (21,92 persen); dan Pertambangan dan Pengalihan (10,17 persen).

Grafik 3.3
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2020-2023 (q-to-q) (persen)



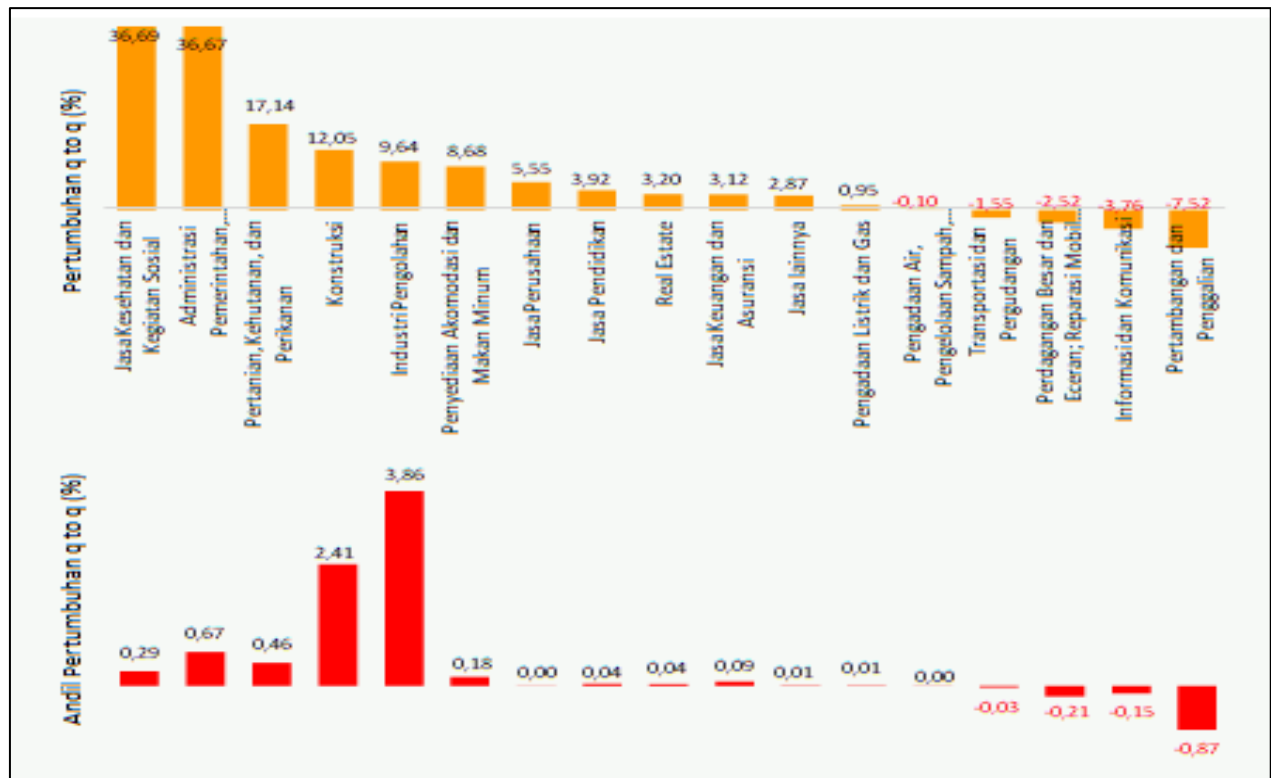
Grafik 3.4
Distribusi PDRB (ADHB) Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV-2023 (persen)





Grafik 3.5

Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV 2023 (q-to-q) (persen)



➤ **Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Triwulan III-2023 Terhadap Kumulatif Triwulan III-2022 (c-to-c)**

Grafik 3.6

Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan III – 2016 - 2023 (c-to-c) (persen)

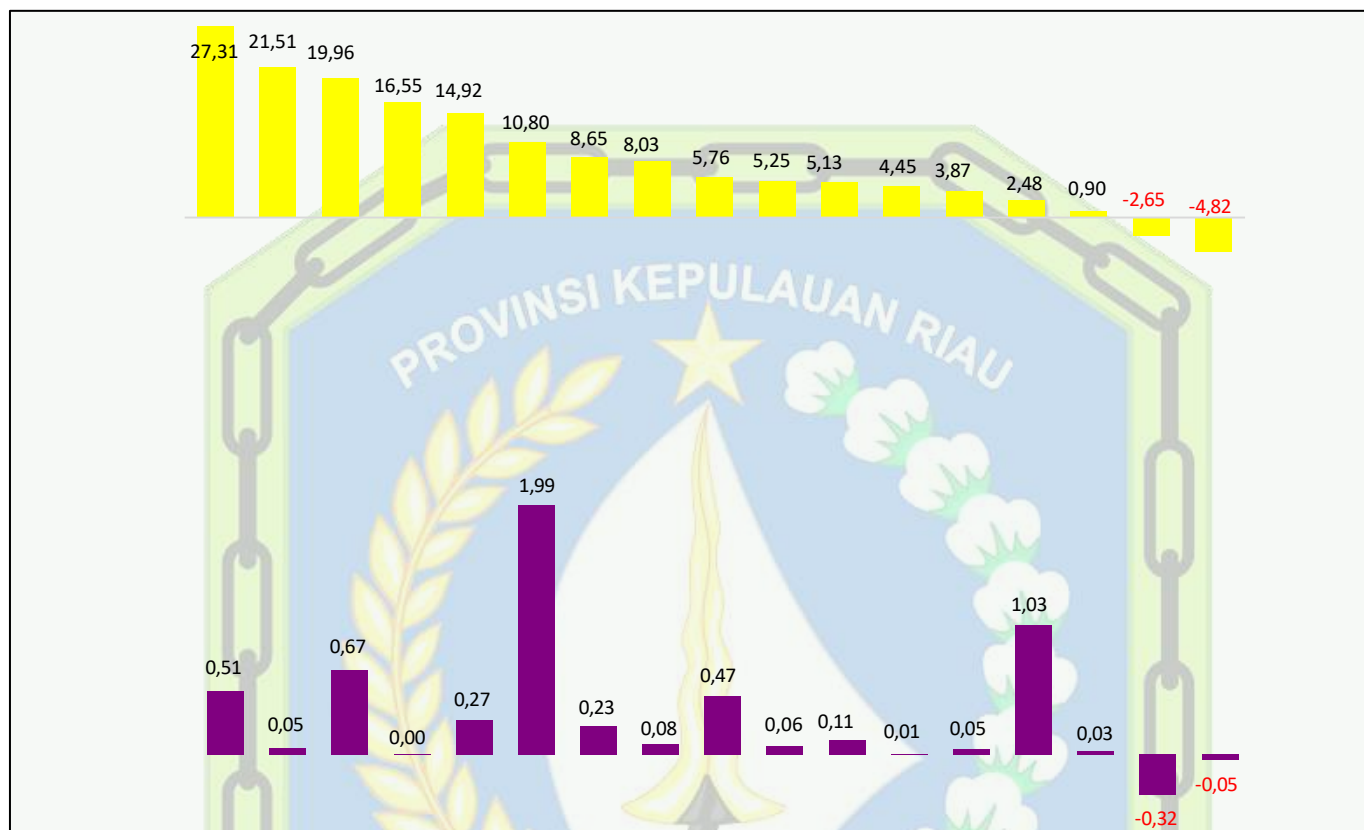


Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,20 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan tahun 2022 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 5,09 persen. Pertumbuhan tertinggi tahun 2023 dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 27,31 persen; diikuti kategori Jasa Lainnya sebesar 21,51 persen; dan kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 19,96 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau tahun 2023 (c-to-c), Konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 1,99 persen.



Grafik 3.7
Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan III-2023 (c-to-c) (persen)



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Sebagai perbandingan dari capaian data di atas berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan 2023

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.09	5.20	0,11 %

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 0,11 %. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,09%, dan dibawah nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31% pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan di angka 5,20%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 andil paling besar berada di sektor konstruksi dan industri pengolahan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

C. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja berdasarkan Target RPJMD

Sebagai Gambaran Target dan Realisasi berdasarkan Target RJMD dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.20	4,9 – 5,8%	106%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mencapai target yang telah ditetapkan RPJMD (2023). Dimana target RPJMD sebesar 4,9 - 5,8 % dapat tercapai sebesar 5,20.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,59 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 0,58 persen, dan secara c-to-c tumbuh sebesar 4,69 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,34 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,57 persen.

Tabel 3.5
Ringkasan Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan IV-2023

Wilayah		PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)			Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
		ADHB	ADHK	<i>q to q</i>	<i>y on y</i>	<i>c to c</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	61.265,28	39.226,43	7,16	4,15	4,23	5,27
2.	Sumatera Utara	271.385,40	153.716,63	0,53	5,02	5,01	23,34
3.	Sumatera Barat	80.552,36	49.006,16	2,31	4,30	4,62	6,93
4.	Riau	264.218,12	140.806,47	0,10	4,02	4,21	22,73
5.	Jambi	75.384,31	43.011,41	-1,00	4,03	4,66	6,48
6.	Sumatera Selatan	157.940,33	90.979,81	-1,90	4,94	5,08	13,59
7.	Bengkulu	25.122,39	13.352,55	3,04	4,76	4,26	2,16
8.	Lampung	112.258,84	66.782,53	-3,99	5,40	4,55	9,66
9.	Kepulauan Bangka Belitung	26.449,09	15.605,52	2,65	4,00	4,38	2,28
10.	Kepulauan Riau	87.967,66	52.719,49	6,80	4,45	5,20	7,57
	Sumatera	1.162.543,78	665.207,02	0,58	4,59	4,69	100,00

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau



Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 5,20% berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,69% dan Nasional sebesar 5,05%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2023, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Sebagai Gambaran Target dan Realisasi berdasarkan Target Nasional dapat diliath dari Tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Taerget Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional

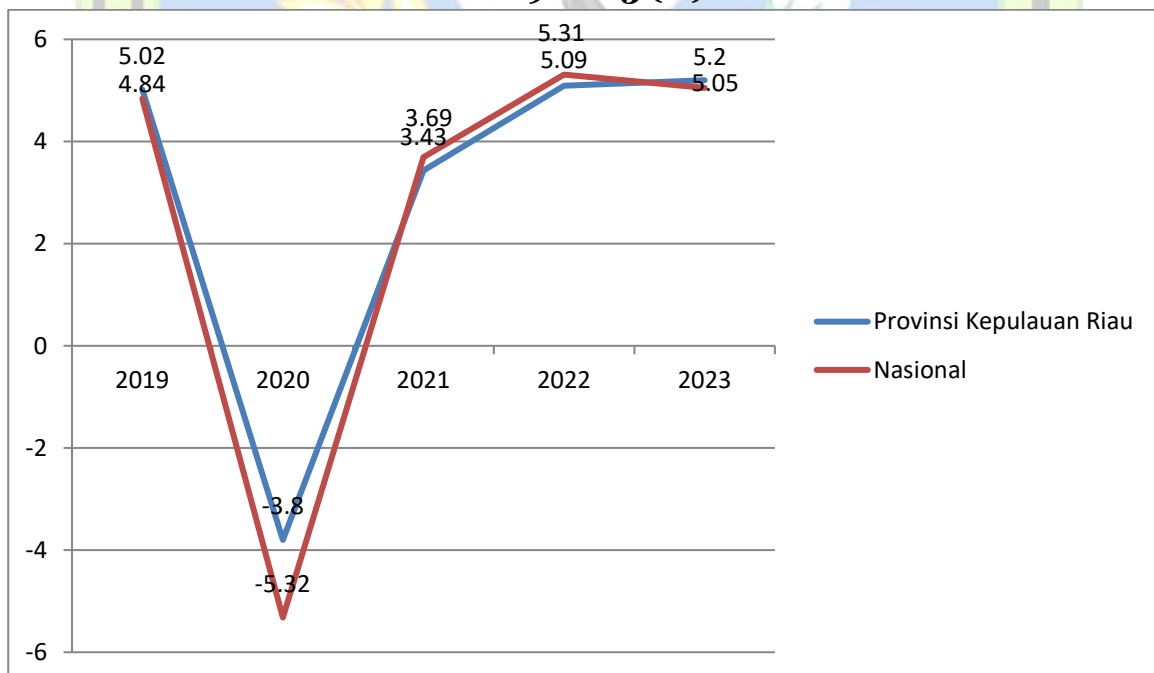
No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.20	5,3 – 5,5%	98,11

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2023 menyatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dibawah target nasional.

Grafik 3.8

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 dan BPS Nasional 2024



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diarahkan pada Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:

- 1) Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
- 2) Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan ekonomi nasional di daerah.
- 3) Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa digital park dan KEK maintenance, repair and overhoul (MRO) Batam Aero Technic dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
- 4) Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
- 5) Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif dengan cara: mendorong industri eksisting untuk meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dibentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID Provinsi Kepri) berdasarkan lampiran III huruf a Keputusan Mendagri RI No.500.05-8135 Tahun 2017, terdiri atas :

1. Ketua : Gubernur
2. Pelaksana Harian Tugas : Sekretaris Daerah Provinsi
3. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi
4. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

TPID ini dibentuk dengan tugas dan kewajiban :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;



2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota; dan/atau
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat:
 - a) Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

❖ **Pendapatan Per Kapita**

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh. PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak



terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara :

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun;
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah;
4. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah;
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

A. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan informasi ketercapaian Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau 2023 :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Pendapatan Per Kapita
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita (ADHK)	81,91 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	113

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan perkapita berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pendapatan perkapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 81,91 juta pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 92,93 juta dan capaian kinerja sebesar 113% atau dalam **Kategori Sangat Baik**.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Dari capaian data di atas berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan 2023.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Pendapatan Per Kapita	89,64 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	3,29 %

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau capaian kinerja Pendapatan Per Kapita Tahun 2022 sebesar 89,64 Juta Rupiah dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 92,93 Juta Rupiah maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 3,29 %.

C. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita	92,93 Juta Rupiah	81,91 Juta Rupiah	113

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan Per Kapita dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja pendapatan per Kapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 81,92 Juta Rupiah pada tahun 2023 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,93 Juta Rupiah dan capaian kinerja sebesar 113 %.

Tabel 3.10

PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023 dan Triwulan IV-2023 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw IV-2022**	Triw III-2023**	Triw IV-2023**	Triw IV-2022**	Triw III-2023**	Triw IV-2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.476,49	2.293,76	2.666,89	1.439,81	1.313,94	1.539,10
B.	Pertambangan dan Penggalian	8.546,41	9.555,39	8.950,04	5.138,69	5.701,64	5.272,79
C.	Industri Pengolahan	34.324,18	32.376,77	35.388,33	21.283,19	19.766,51	21.672,37
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	884,29	893,83	902,63	513,31	522,08	527,03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	76,83	85,17	85,67	59,52	65,79	65,72



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

F.	Konstruksi	17.190,05	17.101,21	19.278,26	9.950,77	9.863,89	11.052,16
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	6.912,16	7.649,23	7.504,34	3.812,82	4.149,07	4.044,63
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.751,44	1.684,92	1.714,67	979,71	992,91	977,56
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.620,55	1.438,17	1.570,15	1.165,60	1.023,37	1.112,22
J.	Informasi dan Komunikasi	2.269,27	2.384,78	2.300,80	1.887,11	1.969,21	1.895,24
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.106,45	2.241,88	2.324,52	1.312,39	1.388,47	1.431,81
L.	Real Estat	903,43	889,59	920,26	622,55	603,95	623,28
M,N.	Jasa Perusahaan	2,60	2,54	2,69	1,86	1,78	1,88
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertah- anan dan Jaminan Sosial Wajib	1.951,10	1.631,08	2.236,99	1.105,20	907,29	1.240,00
P.	Jasa Pendidikan	1.106,27	1.061,63	1.099,17	585,87	564,60	586,75
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	709,58	564,44	771,40	500,00	391,62	535,31
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	202,54	243,27	250,88	116,98	137,69	141,64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		83.033,66	82.097,63	87.967,66	50.475,37	49.363,82	52.719,49
PDRB Tahun 2022 Harga Berlaku		308.842,68					
PDRB Tahun 2022 Harga Konstan		190.163,70					
PDRB Tahun 2023 Harga Berlaku		331.889,50					
PDRB Tahun 2023 Harga Konstan		200.043,86					

Keterangan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Tabel 3.11
**Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau *q-to-q*,
y-on-y dan *c-to-c* Triwulan IV-2023 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)**

Lapangan Usaha	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (<i>q-to-q</i>)**	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (<i>y-on-y</i>)**	Kumulatif Triw IV-2023 Terhadap Kumulatif Triw IV-2022 (<i>c-to-c</i>)**	Sumber Pertumbuhan (<i>q-to-q</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>y-on-y</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>c-to-c</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,14	6,90	0,90	0,46	0,20	0,03
B. Pertambangan dan Penggalian	-7,52	2,61	-2,65	-0,87	0,27	-0,32
C. Industri Pengolahan	9,64	1,83	2,48	3,86	0,77	1,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,95	2,67	8,03	0,01	0,03	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,10	10,42	4,45	0,00	0,01	0,01
F. Konstruksi	12,05	11,07	10,80	2,41	2,18	1,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,52	6,08	5,76	-0,21	0,46	0,47
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,55	-0,22	14,92	-0,03	0,00	0,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,68	-4,58	27,31	0,18	-0,11	0,51
J. Informasi dan Komunikasi	-3,76	0,43	19,96	-0,15	0,02	0,67



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,12	9,10	8,65	0,09	0,24	0,23
L.	Real Estat	3,20	0,12	5,25	0,04	0,00	0,06
M,N.	Jasa Perusahaan	5,55	0,79	16,55	0,00	0,00	0,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36,67	12,20	5,13	0,67	0,27	0,11
P.	Jasa Pendidikan	3,92	0,15	3,87	0,04	0,00	0,05
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,69	7,06	-4,82	0,29	0,07	-0,05
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	2,87	21,09	21,51	0,01	0,05	0,05
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6,80	4,45	5,20	6,80	4,45	5,20

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 3.12
PDRB Per Kapita Kepulauan Riau

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	131,88	145,58	154,18
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	86,58	89,64	92,93

Tabel 3.13
PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Triwulan IV-2022, Triwulan III-2023, dan Triwulan IV-2023 (miliar rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw IV- 2022**	Triw III- 2023**	Triw IV- 2023**	Triw IV- 2022**	Triw III- 2023**	Triw IV- 2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32.495,14	34.128,88	35.686,10	19.274,64	19.660,72	20.234,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	183,98	207,65	216,90	101,61	113,09	117,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.920,57	3.442,81	6.623,71	3.277,69	1.912,94	3.559,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.207,42	37.385,02	38.983,35	19.839,02	20.886,92	21.655,57
5. Perubahan Inventori	1.442,45	261,87	2.328,93	821,19	143,95	1.270,40
6. Ekspor Barang dan Jasa	113.637,68	114.831,06	111.815,69	81.202,67	82.292,22	78.605,47
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	105.853,57	108.159,65	107.687,02	74.041,45	75.646,01	72.722,69
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	83.033,66	82.097,63	87.967,66	50.475,37	49.363,82	52.719,49

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.14
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau *q-to-q*, *y-on-y* dan *c-to-c*
Triwulan IV-2023 Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (persen)

Komponen	Triw IV- 2023 Terhadap Triw III- 2023 (<i>q-to-q</i>)**	Triw IV- 2023 Terhadap Triw IV- 2022 (<i>y-on-y</i>)**	Kumulatif Triw IV- 2023 Terhadap Kumulatif Triw IV- 2022 (<i>c-to-c</i>)**	Sumber Pertumbuhan (<i>q-to-q</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>y-on-y</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>c-to-c</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,92	4,98	4,17	1,16	1,90	1,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	4,06	15,82	6,77	0,01	0,03	0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	86,05	8,58	6,84	3,33	0,56	0,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,68	9,16	8,72	1,56	3,60	3,45
5. Ekspor Barang dan Jasa	-4,48	-3,20	-2,46	-7,47	-5,15	-4,19
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-3,86	-1,78	-2,54	-5,92	-2,61	-3,93
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,80	4,45	5,20	6,80	4,45	5,20

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

❖ Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan indeks Gini. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan melalui hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Semakin mendekati 1 maka nilai ketimpangan semakin besar, sebaliknya semakin mendekati 0 maka nilai ketimpangan semakin kecil.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan pulau yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakatnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

A. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan informasi ketercapaian Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau 2023 :

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,329 Indeks	0,340 Indeks	89

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Indeks Gini dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,329 dengan capaian realisasi sebesar 0,340 dan capaian kinerja sebesar 89% atau dalam **Kategori Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Indeks Gini	0,325 indeks	0,340 Indeks	15%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan capaian kinerja Indeks Gini Tahun 2022 sebesar 0,325 dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 0,340 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 15 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $> 0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan nilai indeks gini pada tahun 2023 sebesar 0,340 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,325. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah.

C. Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,340 Indeks	0,329 Indeks	89

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau



Analisis terhadap pendapatan Indeks Gini dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja Indeks Gini belum mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 0,329 Indeks pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 0,340 Indeks dan capaian kinerja sebesar 89 %.

D. Data Capaian Pemerintah Daerah Terhadap Target Nasional

Berikut ini data perbandingan Capaian dan Target Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Nasional:

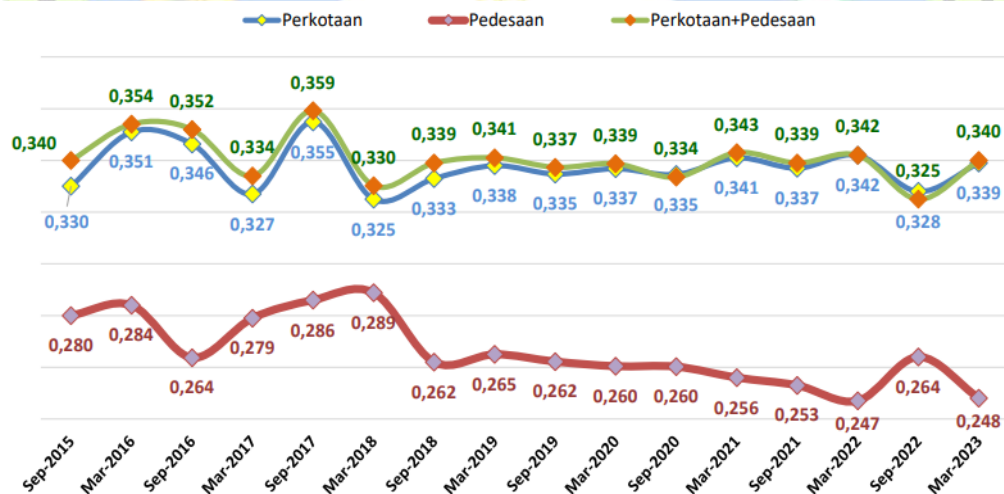
Tabel 3.18
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,340	0,375 – 0,378%	89,91

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 menyatakan bahwa capaian Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau dibawah target nasional.

Grafik 3.9
Perkembangan Gini Ratio, September 2015–Maret 2023



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,340. Angka ini naik sebesar 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,325. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, naik 0,011 poin dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,328. Gini Ratio di daerah pedesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,248, turun 0,016 poin dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,264. Selama periode September 2022 - Maret 2023, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah mengindikasikan penurunan, yaitu dari 20,53 persen pada September 2022 menjadi 20,04 persen pada Maret 2023.



Berdasarkan daerah, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada periode September 2022-Maret 2023 mengalami penurunan yaitu dari 20,39 persen pada September 2022 menjadi 20,08 persen pada Maret 2023. Kondisi yang berbeda terjadi di daerah perdesaan, dimana distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mengalami peningkatan dari 23,02 persen menjadi 24,76 persen pada periode tersebut.

Gini Ratio pada September 2015 sebesar 0,340. Pada Maret 2023 Gini Ratio tercatat sebesar 0,340, naik 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2022 yang sebesar 0,325. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode September 2022-Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022-Maret 2023 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin yaitu dari 0,328 pada September 2022 menjadi 0,339 pada Maret 2023. Berbeda dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode September 2022-Maret 2023, yaitu sebesar 0,016 poin.

Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 20,04 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau, hal tersebut menurun bila dibandingkan dengan kondisi pada September 2022 yang sebesar 20,53 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 20,08 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mengarah kepada penurunan distribusi pengeluaran sebesar 0,31 persen dibandingkan kondisi September 2022. Sementara di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat sebesar 24,76 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat dibanding kondisi September 2022 yang sebesar 23,02 persen. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2022–Maret 2023 Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.19
Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2022	19,94	36,98	43,08
September 2022	20,39	38,17	41,44
Maret 2023	20,08	37,1	42,83
Perdesaan			
Maret 2022	24,82	39,64	35,54
September 2022	23,02	41,86	35,12
Maret 2023	24,76	40,85	34,39
Perkotaan+Perdesaan			
Maret 2022	20,02	36,97	43,02
September 2022	20,53	38,37	41,09
Maret 2023	20,04	36,96	43,00

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

➤ Realisasi Anggaran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Secara Langsung dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	PROGRAM	APBD-Perubahan		
		Pagu	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
1	3	8	9	10
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.428.618.646	2.211.457.686	91,06
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.124.440.070	15.955.648.717	98,95
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.054.047.690	4.926.384.393	97,47
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.440.400.936	3.394.739.725	98,67
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	760.292.930	687.998.700	90,49
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	13.685.252.939	13.319.419.434	97,33
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	99.444.600	98.805.350	99,36
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	228.741.850	208.094.400	90,97
9	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	439.140.835	399.828.064	91,05
10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000	228.935.899	91,57
11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.240.700	43.960.694	79,58
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	246.147.805	227.572.050	92,45
13	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	472.448.079	443.462.000	93,86
14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	698.494.000	636.152.259	91,07
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	35.906.000	28.948.400	80,62
16	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	309.166.661	301.781.680	97,61
17	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	99.597.500	98.651.899	99,05
18	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.000.000	38.829.600	97,07
19	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.374.530.000	1.245.876.679	90,64
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	436.912.808	401.748.758	91,95
21	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.745.636.400	2.741.607.058	99,85
22	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.707.670.000	1.211.533.618	70,95
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	857.125.140	852.522.007	99,46
24	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	4.900.455.958	4.316.625.258	88,09
25	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	414.998.435	410.591.568	98,94
26	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.197.324.430	1.157.228.947	96,65
27	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.106.585.637	5.073.017.109	99,34
28	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	40.573.009	35.978.796	88,68
29	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	391.152.344	357.487.761	91,39
30	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	503.471.000	495.215.254	98,36
31	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	931.975.050	925.691.741	99,33
32	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	962.296.528	881.993.388	91,66
33	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	89.515.100	84.391.162	94,28
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.260.927.985	6.747.427.941	92,93
35	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.638.963.367	2.404.261.830	91,11
36	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	54.472.340.251	50.935.248.146	93,51
37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.109.197.225	968.908.820	87,35
38	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	31.869.738	11.611.350	36,43
39	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	59.347.441	55.829.700	94,07
40	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.933.923.787	5.097.525.950	85,9
41	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.653.746.373	3.428.718.708	93,84
42	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	411.397.294	395.114.554	96,04
43	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	17.718.148	10.549.600	59,54
44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.284.312.921	1.116.075.834	86,9
	JUMLAH	143.001.347.610	134.613.452.487	94,13



**SASARAN. 2
Menurunnya Angka Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan.

Untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi, kesehatan, dan sosial yang ada, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai program yang terkait pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Berikut disampaikan penjelasan indikator-indikator dalam mendukung sasaran Menurunnya angka Kemiskinan.

❖ **Angka Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan evaluasi capaian sebagai berikut:

Tabel 3.20

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Pengangguran / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,5	6,80	128,42

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT menjelaskan seberapa banyak jumlah pengangguran dalam setiap 100 angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja.



Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari :

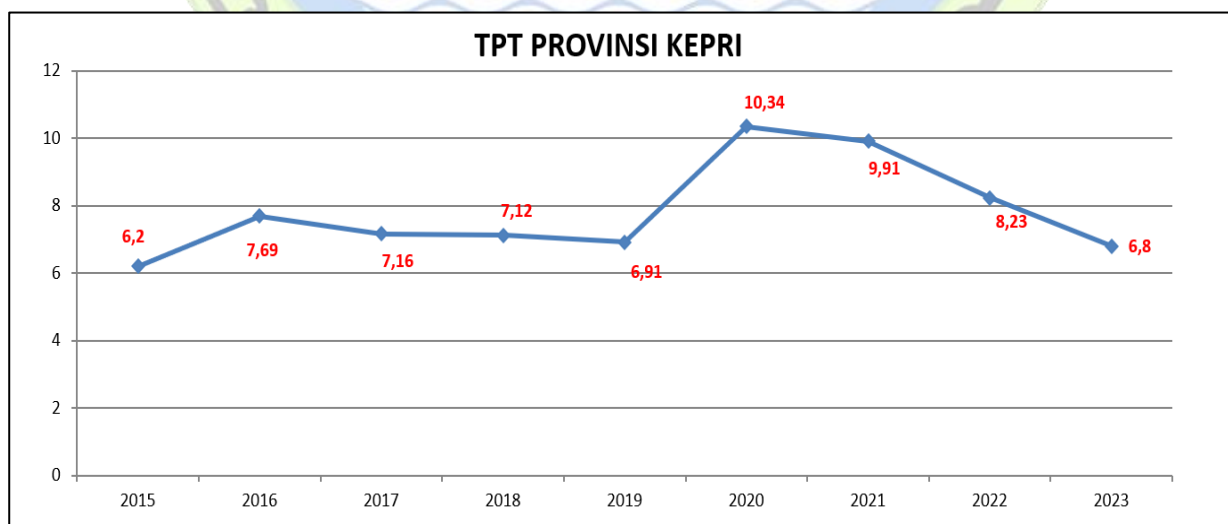
1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 74.330 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.093.686 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,80%. Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 9,5 dan terealisasi sebesar 6,80 (**angka TPT semakin rendah semakin baik**) sehingga capaian kinerja adalah sebesar **128,42** persen termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Agustus 2023 sebanyak 1.093.686, turun sebesar 166.026 orang dibanding Agustus 2022 sebesar 1.259.712 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan sebesar 0,26 dari 68,94 persen tahun 2022 menjadi 68,68 persen tahun 2023.

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2023 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.10
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Tahun 2023, Diolah

Dalam Dua Belas tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan yang cukup



signifikan sebesar 3,43 poin persen, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Pengaruh Covid -19 menyebabkan angka TPT Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan perekonomian TPT tahun 2023 mengalami penurunan sampai diangka 6.8 atau turun 1,43 poin dibandingkan tahun 2022 dan 3,11 pada Tahun 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah/daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,77 persen, TPT wilayah perkotaan Lebih rendah dibandingkan TPT di daerah Pedesaan yang sebesar 7,00. Berbeda dengan TPT perkotaan, TPT Pedesaan mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan Agustus 2022 TPT di daerah Perkotaan menurun sebesar 1,75 persen poin, sementara itu TPT di daerah pedesaan meningkat sebesar 1,12 persen poin. Begitu juga jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT di daerah perkotaan lebih rendah 1,02 persen poin, dan TPT di daerah pedesaan lebih tinggi 2,49 persen.

Tabel 3.21
Karakteristik Pengangguran, Agustus 2019—Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	-0,70	-1,43
TPT Menurut Jenis Kelamin							
- Laki-laki	7,97	10,87	9,42	7,78	5,95	-2,02	-1,83
- Perempuan	6,59	9,38	10,72	9,03	8,22	1,63	-0,81
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	7,79	10,89	10,45	8,52	6,77	-1,02	-1,75
- Pedesaan	4,51	5,41	4,43	5,88	7,00	2,49	1,12

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 2023

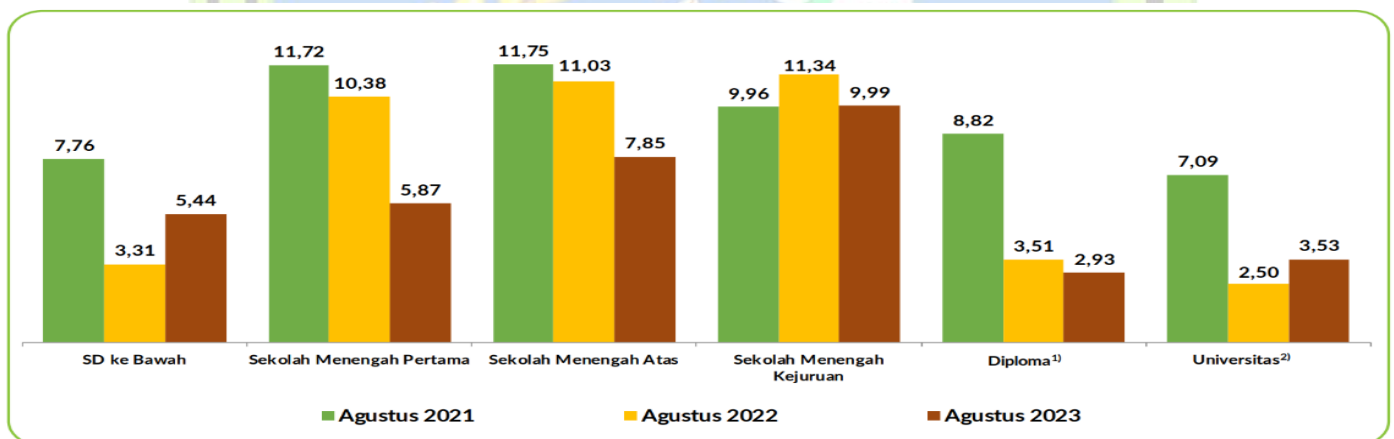
Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 5,95 persen, terendah dalam lima tahun terakhir. TPT laki-laki lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 8,22 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, yaitu masing-masing sebesar 1,83 persen poin dan 0,81 persen poin. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (kondisi sebelum pandemi COVID-19), TPT laki-laki menurun sebesar 2,02 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat 1,63 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2023 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT dari



tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat) masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,99 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 2,93 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua kategori tamatan pendidikan kecuali tamatan SD ke bawah dan tamatan universitas. Penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) yaitu sebesar 4,51 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 2,13 persen poin dan kategori tamatan universitas yaitu sebesar 1,03 persen poin.

Grafik 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut tingkat Pendidikan Tahun 2021-2023



Keterangan: ¹⁾ Diploma mencakup Diploma I/II/III

²⁾ Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT pada Tahun 2023 terjadi pada hampir semua kategori pendidikan. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah dan Tamatan Universitas. TPT tertinggi kedua terdapat pada Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 7,85 persen, Dan tamanan SMP sebesar 5,87 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang masih belum optimal terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK, SMA dan SMP. Namun begitu, berdasarkan tren karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja khususnya tamatan berpendidikan SD dan universitas Pada tahun 2023. Berdasarkan data karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan kategori tamatan SMP jauh mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 10,38 menjadi 5,87, atau turun sebesar 4,51 persen poin dari tahun 2023.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Berikut rincian TPT pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023:

Tabel 3.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten Kota Tahun 2023

No	Kab/ Kota	Data 2023		
		Jumlah Penganggur Terbuka (Orang)	Angkatan Kerja	TPT
1	Tanjungpinang	5.622	118,104	4,76
2	Bintan	4.543	83.592	5,43
3	Batam	52.203	641.605	8,14
4	Karimun	7.606	126.421	6,02
5	Lingga	1.896	53.889	3,52
6	Natuna	1.809	44.721	4,05
7	Anambas	647	25.354	2,55
8	Provinsi Kepri	74.330	1.093.686	6,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023.

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2023 terjadi di Kota Batam sebesar 8,14% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 2,55%.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepri Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019— Ags 2023	Perubahan Ags 2022— Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten Karimun	5,83	8,36	7,20	6,87	6,02	0,19	-0,85
Kabupaten Bintan	8,68	8,86	8,62	6,91	5,43	-3,25	-1,48
Kabupaten Natuna	3,82	4,10	5,15	4,15	4,05	0,23	-0,10
Kabupaten Lingga	4,35	4,41	4,23	3,09	3,52	-0,83	0,43
Kab. Kep. Anambas	3,21	3,44	1,27	2,15	2,55	-0,66	0,40
Kota BATAM	8,31	11,79	11,64	9,56	8,14	-0,17	-1,42
Kota Tanjungpinang	6,31	9,30	6,31	5,27	4,76	-1,55	-0,51
Kepulauan Riau	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	-0,70	-1,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan kabupaten/Kota Berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya masih perlu dioptimalkan. Secara absolut, jumlah pengangguran di Kota Batam turun sekitar 52.203 orang. Sehingga, angka TPT Kota Batam menurun sebesar 1,42 dari Agustus 2022 menjadi 8,14 persen pada Agustus 2023. Dari Tabel diatas tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Kota Batam sebesar 8,14 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,55 %. Namun secara keseluruhan dapat tergambar bahwa terjadi penurunan TPT di hampir keseluruhan

kabupaten/kota kecuali Kabupaten Lingga (Kenaikan 0,43) dan kepulauan Anambas yang mengalami kenaikan sebesar 0,40 pada Tahun 2023.

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2023	Target akhir RPJMD (2026)	%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,80	7,50	109,33

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau dibawah dari target RPJMD, di mana pada target RPJMD jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5%, sedangkan realisasi sebesar 6,80%, sehingga telah mencapai 109,33%. Perbandingan target RPJMD dengan capaian tahun 2026 dijelaskan pada tabel di atas.

Secara Nasional Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, naik 3,99 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022. TPT Provinsi Kepulauan Riau termasuk tertinggi setelah Provinsi Banten dan Jawa Barat Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2023

Provinsi	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021-Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022-Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,30	6,17	6,03	-0,13	-0,14
Sumatera Utara	6,33	6,16	5,89	-0,17	-0,27
Sumatera Barat	6,52	6,28	5,94	-0,24	-0,34
Riau	4,42	4,37	4,23	-0,05	-0,14
Jambi	5,09	4,59	4,53	-0,50	-0,06
Sumatera Selatan	4,98	4,63	4,11	-0,35	-0,52
Bengkulu	3,65	3,59	3,42	-0,06	-0,17
Lampung	4,69	4,52	4,23	-0,17	-0,29
Kepulauan Bangka Belitung	5,03	4,77	4,56	-0,26	-0,21
Kepulauan Riau	9,91	8,23	6,80	-1,68	-1,43
DKI Jakarta	8,50	7,18	6,53	-1,32	-0,65
Jawa Barat	9,82	8,31	7,44	-1,51	-0,87
Jawa Tengah	5,95	5,57	5,13	-0,38	-0,44
D.I. Yogyakarta	4,56	4,06	3,69	-0,50	-0,37
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	-0,25	-0,61
Banten	8,98	8,09	7,52	-0,89	-0,57
Bali	5,37	4,80	2,69	-0,57	-2,11
Nusa Tenggara Barat	3,01	2,89	2,80	-0,12	-0,09
Nusa Tenggara Timur	3,77	3,54	3,14	-0,23	-0,40
Kalimantan Barat	5,82	5,11	5,05	-0,71	-0,06
Kalimantan Tengah	4,53	4,26	4,10	-0,27	-0,16
Kalimantan Selatan	4,95	4,74	4,31	-0,21	-0,43
Kalimantan Timur	6,83	5,71	5,31	-1,12	-0,40
Kalimantan Utara	4,58	4,33	4,01	-0,25	-0,32
Sulawesi Utara	7,06	6,61	6,10	-0,45	-0,51
Sulawesi Tengah	3,75	3,00	2,95	-0,75	-0,05
Sulawesi Selatan	5,72	4,51	4,33	-1,21	-0,18
Sulawesi Tenggara	3,92	3,36	3,15	-0,56	-0,21
Gorontalo	3,01	2,58	3,06	-0,43	0,48
Sulawesi Barat	3,13	2,34	2,27	-0,79	-0,07
Maluku	6,93	6,88	6,31	-0,05	-0,57
Maluku Utara	4,71	3,98	4,31	-0,73	0,33
Papua Barat	5,84	5,37	5,38	-0,47	0,01
Papua	3,33	2,83	2,67	-0,50	-0,16
Indonesia	6,49	5,86	5,32	-0,63	-0,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Pada Tahun 2023 Penduduk bekerja naik sebanyak 30,539 orang dan pengangguran turun sebanyak 5.827 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta komponennya secara absolut mengalami Penurunan, namun secara kualitas indikator ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 68,68 persen mengalami Penurunan 0,26 persen point dibanding Agustus 2022. Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi Penurunan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori Angkatan kerja ke kategori bukan Angkatan kerja (Penduduk yang sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan lainnya). Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun Tahun 2019 - 2023

Karakteristik Angkatan Kerja	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2019-Ags 2023	Perubahan Ags 2022-Ags 2023
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,69	66,28	68,27	68,94	68,68	3,99	-0,26
TPAK menurut Jenis Kelamin							
- Laki-Laki	83,18	82,86	83,93	86,44	84,92	1,74	-1,52
- Perempuan	45,35	48,93	51,92	50,68	51,95	6,60	1,27
TPAK menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	64,98	66,72	68,99	68,96	68,11	3,13	-0,85
- Pedesaan	61,98	62,62	61,77	68,73	73,04	11,06	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 84,92 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 51,95 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,52 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,27 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pada Agustus 2023, TPAK Perkotaan sebesar 68,11 persen, lebih rendah dibanding TPAK Pedesaan yang sebesar 73,04. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK Perkotaan mengalami penurunan 0,85 persen poin, sedangkan TPAK Pedesaan mengalami kenaikan sebesar 4,31 persen poin.

Adapun target yang ditetapkan dapat tercapai dikarenakan adanya kondisi perekonomian yang semakin membaik pasca covid-19 yang secara internasional dan nasional sangat berdampak kepada perekonomian sehingga sangat berpengaruh kepada kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS Tahun 2023 tidak adanya lagi Data ketenagakerjaan dan permasalahan pengangguran yang disebabkan oleh pengaruh covid-19.

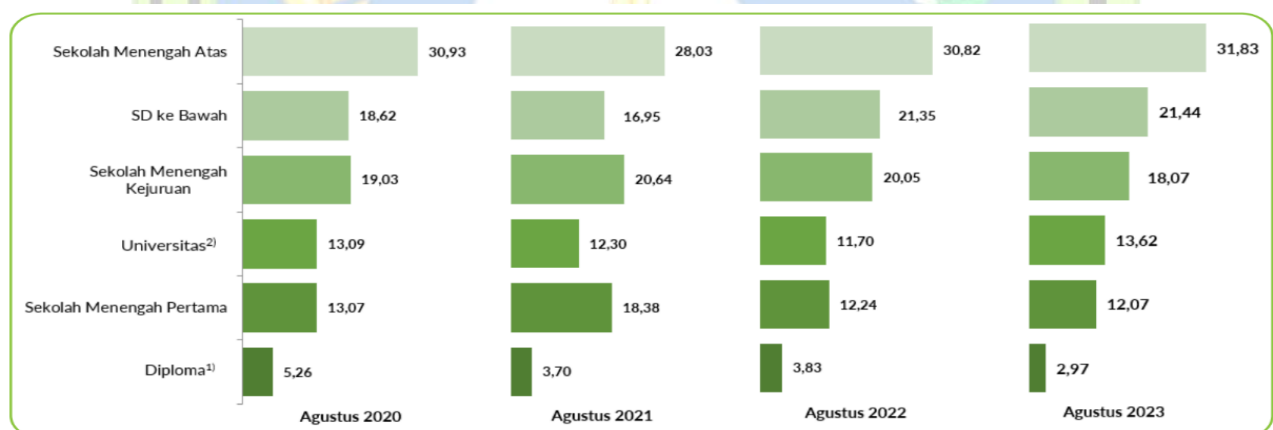


TPT di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami Penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan TPT tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Tidak adanya lagi komponen ketenagakerjaan yang menunjukkan Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2023 sehingga Komposisi penduduk usia kerja, Bukan Angkatan Kerja (BAK), sementara tidak bekerja, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, orang pengangguran yang terdampak COVID-19 Keempat komponen tersebut terus mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2023.
2. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2023 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 324,461 orang (31,83 persen) dan Sekolah Dasar sebanyak 218,549 orang (21,44 persen). Kemudian disusul tamatan sekolah Mengah kejuruan sebesar 18,07 persen Dalam tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.019.356 orang, mengalami penurunan sebanyak 136,641 orang dari Agustus 2022.

Grafik 3.12

Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 - 2023



Keterangan: ¹⁾ Diploma mencakup Diploma I/II/III
²⁾ Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Sumber: Badan Pusat Statistik prov. Kepri Tahun 2023

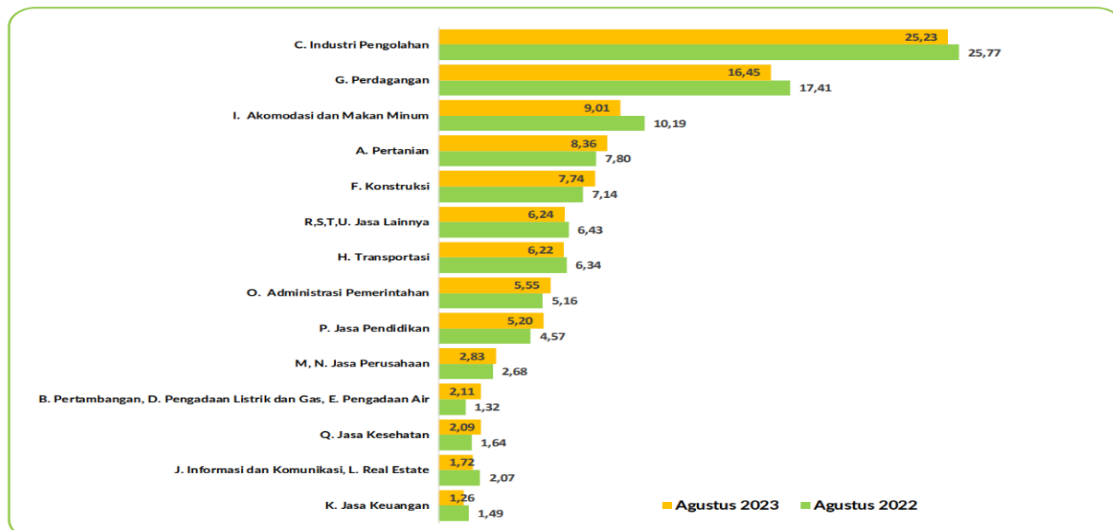
3. Adanya perubahan kondisi tenaga kerja selama Tahun 2023 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,23 persen; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,45 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,01 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022, dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati posisi keempat terbesar. Dibandingkan Agustus 2022, tujuh lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja, peningkatan terbesar pada sektor Pertambangan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor



Pengadaan Air sebesar 0,78 persen poin. Sementara itu, enam lapangan pekerjaan mengalami penurunan persentase penyerapan tenaga kerja, dengan penurunan terbesar pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,18 persen poin.

Grafik 3.13
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, agustus 2022 dan 2023 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik prov. Kepri, Tahun 2023

- b. Kondisi ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota pasca pandemi menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja akibat semakin membaiknya kesempatan kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2023 masih merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukan penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 1,42 persen dari tahun 2022. Kondisi ini disebabkan beberapa peningkatan produktifitas disektor formal dan informal. Pada Agustus 2023, penduduk Kota Batam yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 29,11 persen, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 70,89 persen. Persentase penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2023 naik sebesar 3,17 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022. Peningkatan penduduk bekerja pada kegiatan formal ini seiring dengan peningkatan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap.
- c. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2023 jumlahnya mencapai 825.548 (80,99 persen). Dibandingkan dengan Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 9,61persen poin. Sementara itu dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja



kurang dari 35 jam per minggu) berkurang sebanyak 45.304 orang (18,94 persen) yaitu dari 239.112 orang pada Agustus 2022 menjadi 193.808 (19,01%) orang pada Agustus 2023. dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.27
Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2022-2023

NO	Karakteristik	2022 (org)	2023 (org)	Perubahan 2022-2023	persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	916.885	825.548	-91.337	9,61
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	239.112	193.808	- 45,304	18,94

Sumber, Bursa Resmi Statistik Tahun 2023

A. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mengatasi TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan program dan kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendataan pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, Pendaftaran pemagangan Ke luar negeri, sertifikasi BNSP, Pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti job fair.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan mendorong siswa SMK yang mengikuti pemagangan, sehingga ketika lulus nanti mereka siap bekerja. Diharapkan nantinya lulusan SMK maupun BLK mampu mengisi pasar kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.
3. Kegiatan 2023 disusun dengan konsep *tailor made training* dengan pendekatan penempatan di perusahaan, Untuk AK3 umum sinkronisasi program --> praktek di perusahaan, mendapatkan materi langsung di tempat kerja, magang di departemen safety. Training bidang perhotelan yang fokus pada housekeeping, praktek dilakukan di hotel dengan melibatkan supervisor maupun HRD di hotel. Para peserta pada kesempatan ini praktek di I hotel Batam. Pelatihan las pada kesempatan 2023, training dilakukan dengan melibatkan praktisi dengan adopsi welding prosedur dari perusahaan sehingga akhir training melibatkan dengan melakukan welding tes.
4. Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Adapun program yang dilaksanakan di Tahun 2023 untuk mendukung kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada 2, yaitu:

- A. Program Penempatan Tenaga Kerja
- B. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 3.28

Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator Angka Pengangguran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Efesiesi	Ket
1	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,5	6,80	128,42	4.467.054.446	4,349,811,653	97,37%	Efisien

Hasil analisis Sasaran Strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Angka Pengangguran Terbuka (TPT) diketahui dari target yang telah ditetapkan yakni 9,5 terealisasi sebesar 6,80 (angka TPT semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 128,42% Kinerja dalam hal ini termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Demikian juga realisasi anggaran yang mendukung indikator angka Pengangguran adalah Pertama Program Pelatihan dan Produktivitas dengan anggaran sebesar Rp. 4.392.235.946 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.283.678.003 (97,53 persen). Kedua Program Penempatan Tenaga Kerja Rp. 74.818.500 dengan realisasi sebesar Rp. 66,133,650 (88,39 persen). Untuk kedua program tersebut dalam pencapaian target indikator angka pengangguran sebesar Rp. 4.467.054.446 dengan realisasi Rp. 4,349,811,653 atau sebesar 97,37 persen. Realisasi anggaran tersebut termasuk kategori Sangat Tinggi (ST).

B. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pembangunan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kondisi perekonomian makro, dimana pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan utama di bidang ketenagakerjaan baik menyangkut optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Masalah pokok penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi khususnya di Kota Batam.
2. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri.
3. Belum maksimalnya pelayanan informasi pasar kerja mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.



Sedangkan masalah yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Belum terpenuhinya dukungan anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

Sedangkan permasalahan masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Masih terbatasnya tempat uji kompetensi (TUK) beserta sumber daya pendukungnya.
- b. Belum optimalnya produktifitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.
- c. Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.
- d. Minimnya SDM fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- e. Sistem, mekanisme, dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.
- f. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.
- g. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- h. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga berdampak terhadap pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan.
- i. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap lulusan BLK belum optimal terpenuhi
- k. Belum tersedianya alokasi dana dalam pelaksanaan pelayanan perluasan kesempatan kerja dalam rangka Meningkatkan partisipasi ibu rumah tangga untuk menjadi pelaku ekonomi dan juga Meningkatkan pelatihan-pelatihan berbasis kemasyarakatan.



❖ Angka Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 akan dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 3.29
Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kemiskinan	5,74	5,69	100,87%

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (142.500 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.504.394 orang) dengan nilai persentase 5,69%. Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dengan target 5,74% dapat tercapai sebesar 5,69% sehingga capaian kinerja sebesar 100,87% atau dalam kategori kinerja relatif **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja Penurunan Angka Kemiskinan didukung oleh 13 Perangkat Daerah dengan 16 (Enam belas) program dengan indikator program dari masing-masing Perangkat Daerah, berikut di tampilkan target dan capaian indikator program dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Target dan Realisasi indikator Program Pendukung Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2023

No	OPD Penanggung Jawab	Program Pendukung Taskin	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partispasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	84,97	84,97
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98,5	115,00	116,75
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	85	97,74	114,99



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	79	92,29	116,82
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,37	0,06	200,00
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,11	95,43	99,29
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	99,08	100,88	101,82
			Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Rasio	33,8	35,91	106,24
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	124	98	121
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	per 100.000 KH	13	12	110
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,4	15,4	100
			Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	100	100
			Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	100	100
			Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/kota	5	5	100
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	92	81	89
			Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	68	47	69
			Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43	71	166
			Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94	74	79
			Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan	%	71	100	141



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

			terpadu (pandu) PTM di atas $\geq 80\%$ Puskesmas				
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	90	96	107
3	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,15	0,32	213,33
			Persentase PMKS ruanglingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	36,11	114,16
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,90	28,64	99,10
5	Dinas Perikanan Dan Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307691	317.042,5	103,04
			Nilai Tukar Nelayan/NTN	%	115	104,14	90
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	28473	31.250	109,75
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Persampahan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	%	111	96,08	86,83
			Persentase Pengurangan Sampah	%	26	21,73	83,58
			Persentase Penanganan Sampah	%	72	67,65	93,95
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Dikembangkan	%	29,36	26,82	91,34
		Program Pengembanga n Umkm	Rasio Wirausaha Baru	%	28,52	32,73	114,76
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja Dan	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan	%	56,41	56,17	99,57



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

		Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Berbasis Kompetensi				
			Persentase Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Baru	%	8	7,16	89,5
			Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	45,45	38,28	84,22
9	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan	%	114	117,44	103,02
			Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (Beras) Ditingkat Konsumen	%	Cv<10	9,01	110
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87,70	89,9	102,51
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1.42	1,56	109,96
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0.77	0,86	111,69
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3	2,92	97,33
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%	52,64	66,67	126,65
11	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang dibenahi	%	15	15,23	101,55
			Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	23,51	12,17	51,77
12	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikas	%	96	97,99	98,97
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100	100	100
13	Dinas Pu	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	97,03	91,82	94,63



Dari capaian indikator program pengentasan kemiskinan di atas secara garis besar sudah dapat terealisasi dengan baik oleh Perangkat Daerah pengampu program Penurunan angka kemiskinan, ada beberapa capaian yang belum terealisasi maksimal khususnya untuk program pendukung penurunan angka kemiskinan pada Dinas Kesehatan, yaitu indikator Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) yang belum tercapai Dimana dari 92 persen yang di targetkan baru terealisasi 81 % dengan alasan (1) Pelaksanaan Actife Case Finding belum maksimal meliputi Investigasi kontak terhadap kontak serumah dan kontak erat, (2) Kab/ Kota melakukan Update Ketersediaan logistik pada Aplikasi SITB : OAT, Non OAT dan Terapi Pencegahan TBC secara realtime, (3) Masih adanya Delay report (Keterlambatan input data) terduga TBC, kasus TBC dan pengobatan ke SITB di tingkat faskes (Klinik dan DPM), (4) Masih Rendahnya Capaian Pemberian Terapi Pencegahan TBC (<10%), 5) Belum semua Lintas Sektor terkait berperan aktif dalam Penanggulangan TBC. Untuk indikator Capaian ODHA yang mendapatkan ARV juga capaiannya masih rendah yaitu dari target 68 % baru terealisasi 47 %, disebabkan karena (1) ODHIV Lost Follow UP (2) ODHIV Pindah Layanan PDP ke Luar Daerah Kepri 3. Kesadaran ODHIV yang Rendah dalam mengkonsumsi ARV. Indikator Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap juga realisasinya belum tercapai maksimal disebabkan karena 1. Kurangnya Petugas Penginput Aplikasi ASIK : Masih ada Petugas Imunisasi merangkap Logistik dan Penginput ASIK oleh 1 orang, ada PKM yang belum punya SK Tim Imunisasi (2) Masih ada Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang belum didapat datanya. Sebagian besar klinik swasta/DPS dan RS swasta belum diambil ata imunisasi-nya (3) Belum semua petugas di puskesmas memahami Defenisi Operasional (DO) dalam Pelaksanaan Skrinning Imunisasi Tetanus (termasuk Bidan2 Pustu).

Indikator Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja juga belum tercapai maksimal yaitu Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru dari target 8 persen baru terealisasi 7,16 atau sekitar 89,5 persen capaiannya, ini di sebabkan belum optimalnya modul materi setiap pelatihan yang terkait langsung terhadap akses kewirausahaan yang dapat mengembangkan daya kreasi dan inovasi, dan indikator persentase lulusan pelatihan yang di terima kerja juga belum tercapai maksimal dari target 45,45 persen baru terealisasi 38,28 (84,22 persen) hal ini disebabkan kurangnya Kerjasama /link and match dengan dunia usaha dan dunia industry.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Berikut Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan dari tahun 2022- 2023:

Tabel 3.31

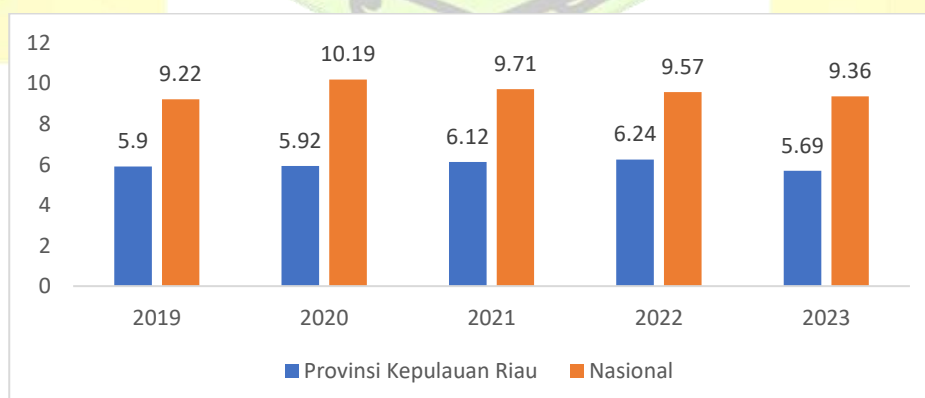
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Dari Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Angka Kemiskinan	6,03 (148.890 org)	5,69 (142.500 org)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,34% (6.400 orang). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 67,55 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2022 yaitu sebesar 67,25 persen. Penurunan angka kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tampaknya mulai pulih dan menguat pasca pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 5,47%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 142,5 ribu orang (5,69 persen), berkurang sebanyak 9,18 ribu orang (0,55 persen) dibandingkan dengan kondisi September 2022 sebanyak 151,68 ribu orang (6,24%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan, sebelumnya berada di angka 6,24% namun di tahun 2023 menjadi 5,69 persen. Meski demikian angka kemiskinan Provinsi Kepri masih dibawah angka kemiskinan nasional seperti terlihat pada gambar berikut.

Grafik 3.14
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2023



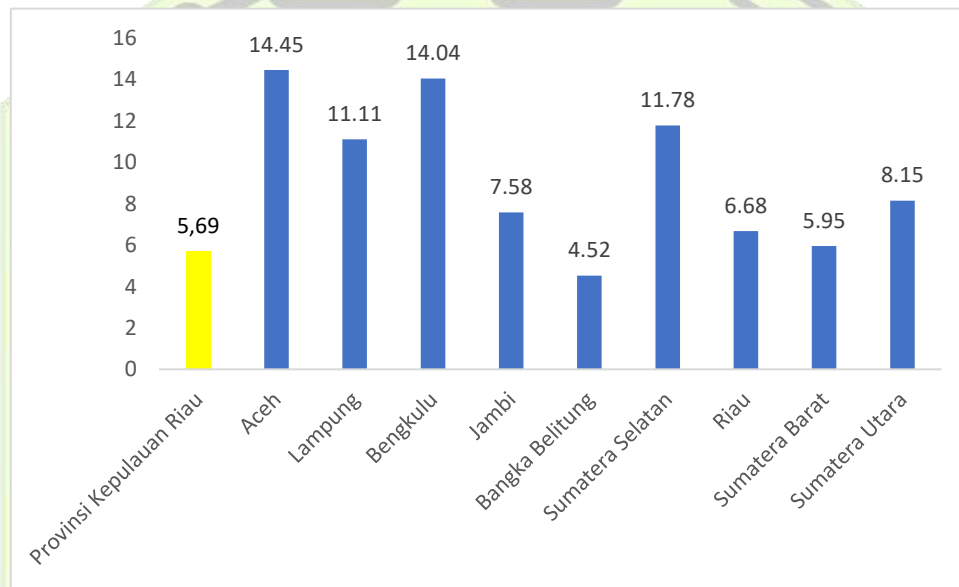
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Jika dibandingkan dengan kemiskinan dengan provinsi lainnya di sekitar Pulau Sumatera, kemiskinan di Kepulauan Riau berada di posisi yang paling rendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 3.15

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 September (%).



Sumber: BPS Kepri, 2023

Persentase penyebaran penduduk miskin juga dapat kita lihat di Kabupaten/kota berdasarkan indek keparahannya. Adapun Persentase penyebaran Penduduk Miskin pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.32

Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	P0	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Karimun	5,95	0,53	0,09	14.330	240.840
2	Bintan	5,90	0,68	0,14	9.860	167.119
3	Natuna	5,25	0,70	0,14	4.300	81.905
4	Lingga	11,26	1,60	0,43	10.180	90.409
5	Kepulauan Anambas	6,95	0,78	0,12	3.080	44.317
6	Kota Batam	5,02	0,59	0,13	83.080	1.654.982
7	Kota Tanjungpinang	7,95	1,18	0,33	16.670	209.686
Kepulauan Riau		6,03	5,69	0,82	142.500	2.504.394



Keterangan :

P0 = Persentase Kemiskinan

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (11,26%) dan yang paling sedikit di Kota Batam (5,02%). Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2023 paling besar adalah di Kota Batam (83.080 Jiwa) dan yang paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas (3.080 Jiwa). Di samping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2023 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (1,60%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Karimun (0,53%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2023, yakni paling besar adalah di Kabupaten Lingga (0,43%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Karimun (0,09%).

➤ FAKTOR ANALISIS KEBERHASILAN PENCAPAIAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ini dipengaruhi oleh Perekonomian, diketahui mulai pulih dan menguat pasca pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 5,20%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dinas Sosial sebagai penanggungjawab utama dari program pengentasan kemiskinan ini telah melakukan berbagai Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ini, melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan Provinsi Kepulauan Riau dalam Program Perlindungan dan jaminan sosial, mereka telah memberikan bantuan kesejahteraan sosial kepada sebanyak 17.090 kk, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga sebanyak 62,752 kk dari 40.896 kk yang di targetkan di tahun 2023, sebanyak 63.151 kk- yang mendapatkan pengentasan kemiskinan lintas Kab/kota dari 41.086 kk yang di targetkan, serta ada sebanyak 399 kk yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat, sehingga dari pencapaian program ini bisa meningkatkan indikator Program Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya dari target 0,71% terealisasi sebanyak 13,52% sehingga capaian realisasinya mencapai lebih dari 100 %.

Pemerintah Kepri juga meningkatkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 melalui bantuan sosial dengan tujuan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan sembako.

Selain Dinas sosial ada Dinas Pendidikan yang juga berperan dalam penuntasan kemiskinan melalui program Pengelolaan Pendidikan telah memberikan bantuan beasiswa untuk siswa miskin



Tingkat SMA dan SMK, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan telah memberikan bantuan transportasi laut, darat dan kompensasi SPP bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi sebanyak 22.825 peserta didik Tingkat SMA serta bantuan biaya praktek kerja lapangan peserta didik kurang mampu SMK dan bantuan diklat keterampilan kepelautan bagi Masyarakat kepulauan sebanyak 5.770 peserta didik.

Pemberian beasiswa tidak hanya di berikan kepada siswa SMA dan SMK yang tidak mampu tetapi juga di berikan kepada mahasiswa/yang sedang aktif melaksanakan Pendidikan di jenjang perguruan tinggi dalam negeri, pemberian beasiswa di berikan kepada mahasiswa/i yang orangtuanya atau walinya tidak mampu namun berprestasi yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/Desa atau pejabat yang berwenang mengeluarkan atau terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di tahun 2023 ini ada sebanyak 622 mahasiswa/I yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baik yang terdaftar di kampus yang ada di provinsi kepri maupun yang berada di luar provinsi kepri.

Upaya penanggulangan kemiskinan dari bidang Kesehatan dilakukan melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan menyediakan bantuan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu serta memberikan pelayanan jumlah RS yang bekerjasama dengan JKN/KIS serta Jamkesda, disamping itu juga dilakukan Kerjasama lintas sektor untuk pemanfaatan Rumah Singgah yang ditujukan sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sedang mendapatkan pengobatan/perawatan di rumah sakit daerah Jakarta dan Batam.

Mengacu pada RPJMN 2021-2024, pada tahun 2024 ditargetkan minimal 98% penduduk Indonesia telah dilindungi dalam Program JKN-KIS. Untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC), Provinsi Kepulauan Riau masih tersisa 1, 59% penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS.

Dalam mendukung program JKN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, integratif dan sistematis. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 telah mencapai 2.73.076 jiwa (96,41 %) dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2.150.329 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah peserta JKN/KIS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 meningkat sebesar 3,7%.

Adapun faktor penentu keberhasilan terhadap capaian Kepesertaan JKN di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah melalui cukai pajak rokok, baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi.
2. Telah optimalnya data kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau



3. Komitmen Pemda dalam pengintegrasian penduduk kedalam JKN
4. Keterlibatan sektor swasta (perusahaan) yang telah memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada para pekerjaannya melalui program BPJS
5. Dinas Kesehatan bersama BPJS terus melakukan evaluasi terhadap kepesertaan JKN dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
6. Kerjasama lintas sektor untuk pemanfaatan Rumah Singgah yang ditujukan sebagai tempat tinggal sementara bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sedang mendapatkan pengobatan/perawatan di rumah sakit daerah Jakarta dan Batam

Di sektor perikanan, Upaya penanggulangan kemiskinan- yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan antara lain memberikan bantuan kepada 4.040 nelayan berupa 25.888 unit alat atau sarana prasarana yang di butuhkan nelayan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil dengan tujuan untuk membantu aktivitas nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan sehingga menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap, untuk meningkatkan produksi perikanan secara keseluruhan, dengan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah kepada para pelaku pembudidaya ikan di laut maka ongkos produksi yang akan dikeluarkan dapat ditekan dan hasil produksi diharapkan dapat dihasilkan secara optimal.

Untuk meningkatkan peluang industri bagi rumah tangga tidak mampu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melakukan kegiatan pemberian pelatihan industri rumah tangga kepada sebanyak 1.265 peserta dari Kabupaten/Kota. Melalui program Peningkatan Kualitas Keluarga kegiatan pemberian pelatihan kepada ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan ibu rumah tangga kepala keluarga yang terdaftar di DTKS, untuk tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan peserta sebagai berikut: (1) Kota Batam (100 Peserta mendapatkan 1 Set Prasmanan untuk setiap kelompok yang berisi 10 orang, 70 Peserta mendapatkan 1 Mixer dan 1 Gilingan Mie/Molen per orang dan 660 Peserta terdiri dari 20 Kelompok Mendapatkan Doorprize Prasmanan, Mixer dan Gilingan Mie/Molen) (2) Kab. Karimun 50 Peserta mendapat Mixer dan Gilingan Mie per Orang (3) Kab. Bintan 50 Peserta mendapat Mixer dan Gilingan Mie per Orang (4) Kota Tanjungpinang 85 Peserta Mendapatkan Doorprize Prasmanan, Mixer dan Gilingan Mie/Molen (5) Kab. Natuna 50 Peserta Mendapatkan Doorprize Prasmanan, Mixer dan Gilingan Mie/Molen (6) Kab. Lingga 50 Peserta Mendapatkan Doorprize Prasmanan, Mixer dan Gilingan Mie/Molen

Upaya penanggulangan kemiskinan di Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui program Pengelolaan Persampahan pemerintah provinsi telah memberikan bantuan kepada 8 kelompok Bank sampah meliputi 6 kelompok bank sampah di kabupaten Lingga, 1 kelompok



bank sampah di Kabupaten Bintan dan 1 kelompok bank sampah di Kota Tanjungpinang, di mana setiap bank sampah di berikan sosialisasi, edukasi dan pendampingan pembentukan bank sampah dan di berikan masing-masing unit timbangan manual, buku Tabungan bank sampah dan bantuan 1 unit kendaraan beroda 3 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para petugas bank sampah.

Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja sebagai salah satu dari penyebab meningkatnya Tingkat kemiskinan maka dinas Tenaga Kerja melakukan Upaya penurunan kemiskinan melalui program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan mengadakan pelatihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industry dan juga dipersiapkan untuk membuka usaha di dalam sektor informa, pada tahun 2023 ini ada sebanyak 560 orang yang telah mendapatkan pelatihan, peserta pelatihan merupakan peserta yang terdaftar di DTKS. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan.

Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pertanian dan Peternakan telah melaksanakan hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis yang dikembangkan hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan kajian Komoditi/Produk/Jenis Unggulan (KPJu) di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh KPJu di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- Sub sektor Tanaman Pangan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.
- Sub sektor Hortikultura adalah cabe, kacang panjang, ketimun, sawi, bayam, kangkung, terong, durian, pisang, nenas, pepaya, manga, manggis
- Sub sektor perkebunan adalah karet, kelapa, sagu, cengkeh, lada, gambir.
- Sub sektor peternakan adalah sapi, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik dan kambing

Sektor pertanian sebagai tugas pokok dan fungsi utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya guna mendukung pengembangan dan pembangunan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya petani dan peternak. Maka dari itu konsentrasi pembangunan pertanian dapat digambarkan dan dijelaskan melalui sasaran meningkatnya hasil produksi pertanian yang bertujuan utama untuk peningkatan produksi pertanian di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk variabel yang terukur dalam pengembangan pertanian.

Persentase RTLH yang dibenahi merupakan salah satu komitmen Kepala Daerah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, ditargetkan sebanyak 15% dan terealisasi 15,23% dari total rekapitulasi rumah tidak layak huni pada



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebesar 1.333 unit rumah, dibandingkan dengan rumah yang ditargetkan semula untuk dilakukan peningkatan dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 200 unit rumah di Kabupaten Lingga dan 3 unit rumah di Kabupaten Bintan, sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 101,53%. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditetapkan 200 unit rumah Suku KAT yang tersebar di 10 (sepuluh) pulau di Kabupaten Lingga, yaitu:

- 1) Pulau Senang Desa Temiang Kecamatan Temiang Pesisir 24 unit rumah;
- 2) Pulau Air Bingkai Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 13 unit rumah;
- 3) Pulau Kampung Baru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 14 unit rumah;
- 4) Pulau Air Ingat Desa Baran Kecamatan Senayang 8 unit rumah;
- 5) Pulau Secawar Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun 16 unit rumah;
- 6) Pulau Linau Batu Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun 54 unit rumah;
- 7) Pulau Selat Kongki Desa Penaah Kecamatan Senayang 14 unit rumah;
- 8) Pulau Mentengah Desa Mentuda Kecamatan Daik 30 unit rumah;
- 9) Pulau Pasir Panjang Desa Pasir Panjang Kecamatan Bakung Serumpun 12 unit rumah;
- 10) Pulau Kentar Akat Desa Kentar Kecamatan Senayang 15 unit rumah; dan
- 11) 3 unit rumah di Kabupaten Bintan terdapat di beberapa lokasi antara lain; 1 unit rumah di Desa Sebondong Perih Kecamatan Teluk Sebondong, 1 unit rumah di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebondong, dan 1 unit rumah di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan.

Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi- Kepulauan Riau berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dimana pengurangan luas kawasan kumuh ditargetkan menjadi seluas 123.73 Ha dan/atau ditargetkan berkurang 23.51 Ha dari realisasi pengurangan luas kawasan kumuh tahun sebelumnya (147.24 Ha - 123.73 Ha). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 12.17 Ha atau menjadi 135.07 Ha (147.24 Ha - 12.17 Ha), sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2023 sebesar $(12.17 \text{ Ha} : 23.51 \text{ Ha}) \times 100\% = 51.77\%$. Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini seluas (23.30 Ha + 12.17 Ha = 35.47 Ha), persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 20.80% $(35.47 \text{ Ha} : 170.54 \text{ Ha} = 20.80\%)$ dari 170.54 Ha. Sedangkan persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh secara Nasional yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 0.35% $(35.47 \text{ Ha} : 10.000 \text{ Ha} = 0.35\%)$ dari 10.000 Ha. Lokasi pengurangan luas kawasan kumuh antara lain terdapat di Sagulung Kota, Baloi Permai dan Sungai Harapan di Kota Batam seluas 8,44 Ha dan Dompok dan Kampung Bulang di Kota Tanjungpinang seluas 3,73 Ha pada lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam pengurangan luas kumuh, berdasarkan pada keputusan kepala daerah kabupaten/kota. Pada tahun berjalan terdapat



revisi keputusan kepala daerah kabupaten/kota tentang luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang sebelumnya seluas 170,54 Ha menjadi 374,68 Ha.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah memberikan bantuan kepada Masyarakat kurang mampu yaitu melalui pemberian bantuan pasang baru Listrik (BPBL) kepada 238 Rumah Tangga yang belum berlistrik: di Kota Batam 55 rumah tangga, di Kota Tanjung Pinang 46 rumah tangga, di Kabupaten Karimun 74 rumah tangga dan di Bintan = 63 rumah, selain pemberian bantuan BPBL juga di berikan 1Mesin Genset 10 kVa untuk 23 rumah tangga dengan jam oprasi selama 5 Jam di kepulauan Anambas.

Dari Dinas Pekerjaan Umum melalui program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, telah dilakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan untuk 6.405 kk berdasarkan capaian TW2 Perumda Tirta Kepri.

➤ **ANALISIS PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN**

1. Pada Bidang Kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) di Kepulauan Riau mencapai 98%, peran kepersertaan mandiri peserta BPJS baru mencapai 18,7%,. Belum penuhnya kepersertaan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah namun juga pihak penyelenggara yaitu BPJS, karena selain pembiayaan JKN daerah, pemerintah daerah juga menganggarkan Jamkesda yaitu bantuan transportasi dan penginapan kepada pasien dan keluarga pasien jika dirujuk keluar daerah.
2. Pada Dinas Sosial, saat ini keterediaan BNBA pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak menggunakan *system clustering* atau peringkat lagi sehingga pemberian bantuan DTKS dilakukan secara keseluruhan. Pensasaran kemiskinan ekstrim saat ini menggunakan data P3KE (Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem) yang harus dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu dengan DTKS, sehingga memperpanjang proses dan biaya di pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa.
3. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, belum sepenuhnya peserta dari kelompok masyarakat miskin yang terdata di DTKS atau kelompok-kelompok tertentu dengan sasaran masyarakat cluster utnuk ditingkatkan kemampuan ekonominya karena proses pendataan target sasaran belum berjalan dengan baik.
4. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sulit merubah pola pikir (mindset) masyarakat tentang pengelolaan sampah dan tidak ada fasilitas Tempat Penampungan Sampah (TPS) di lokasi terdekat
5. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Proposal Badan/ Lembaga terlambat dalam pengajuan sehingga menunggu kebijakan dalam proses pelaksanaan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan Pelaku UMKM masih memiliki pinjaman lain melalui KUR pada Bank Lainnya sehingga



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

tidak dapat diberikan Subsidi Margin 0% sebagaimana ketentuan Perbankan di Bintang Proposal Badan/ Lembaga tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak dapat dilaksanakan sementara di Batam elum dapat melakukan penyesuaian penerima manfaat dengan data P3KE.

6. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesulitan dalam menentukan titik temu antara kriteria peserta yang masuk data DTKS dengan persyaratan Pelatihan kerja yang harus dipenuhi peserta dalam setiap program pelatihan.
7. Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan, telambat mou dengan Bulog karena penentuan harga cppd ditingkat pusat dan terlambat dalam pengadaan.
8. Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, lokasi antar Desa dengan Ibu Kota sangat jauh, dan harus banyak menggunakan mobilisasi laut.
9. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala di antaranya: Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh sehingga sulit untuk menjangkaunya disamping itu rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.

➤ REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Tabel 3.33

Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,74	5,69	100,87	119.970.665.843	113.973.514.417	95,00	

Hasil analisis sasaran Strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Kinerja Angka Kemiskinan terlihat dari tabel diatas bahwa provinsi Kepulauan Riau telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,5 persen Dimana dari target yang telah di tetapkan di RPJMD pada tahun 2023 sebesar 5,74 persen dapat terealisasi sebesar 5,69 persen (angka kemiskinan semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerjanya adalah 100,87 dan termasuk dalam kategori kinerja sangat baik. Sementara realisasi anggaran kegiatan yang di gunakan untuk mendukung indikator angka kemiskinan juga sudah berjalan dengan baik dimana targetkan anggaran sebesar Rp. 119.970.665.843,- dapat terealisasi sebssar Rp. 113.973.514.417,- atau capaian sebesar 95 %. Berikut ini akan di tampilkan pagu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Anggaran dan realisasi Anggaran yang di capai untuk setiap program pendukung penurunan angka kemiskinan sebagai berikut :

Tabel 3.34
Pagu dan Realisai Anggaran Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

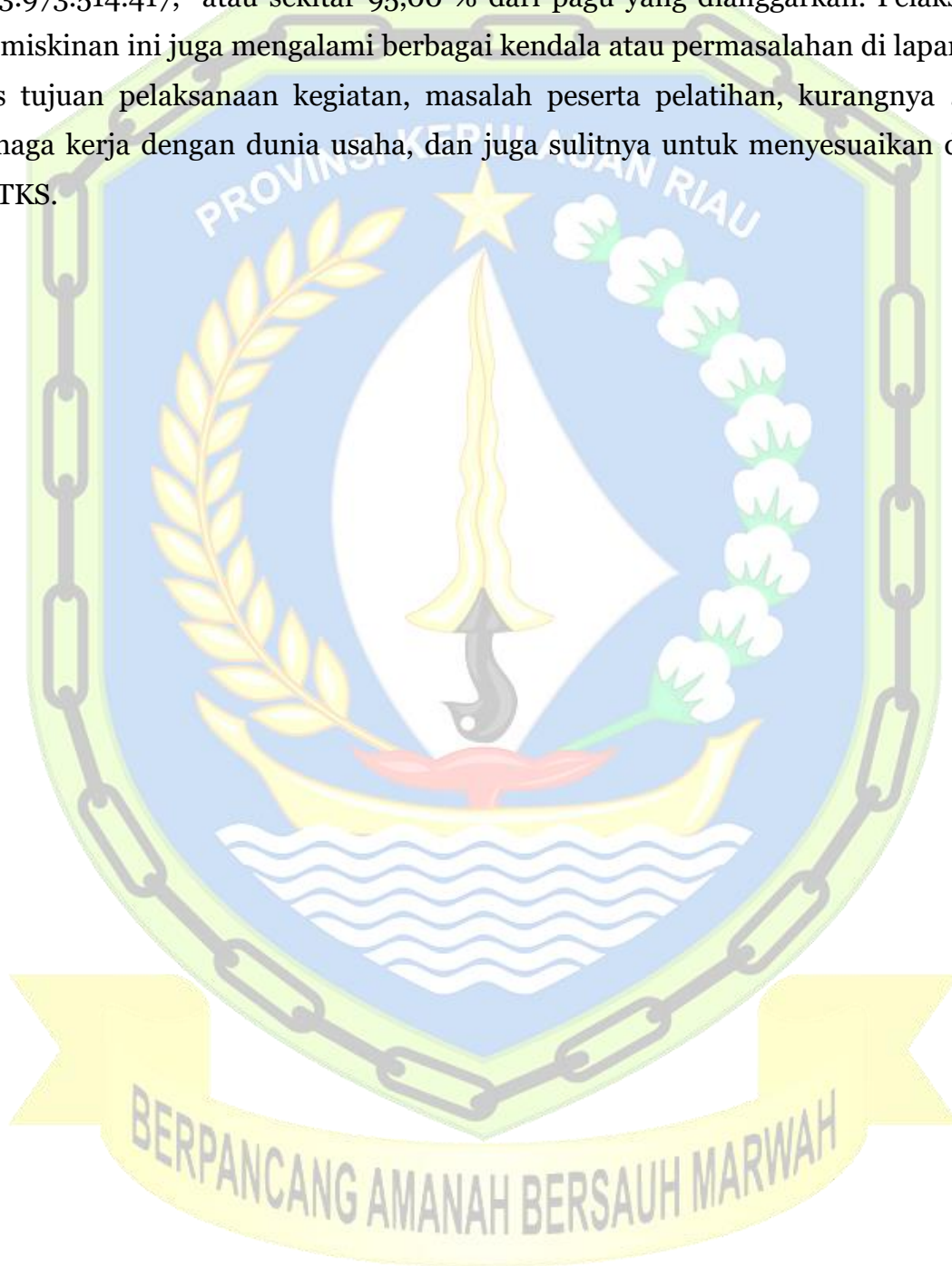
No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Efisiensi
1.	Pengelolaan Pendidikan	20.372.730.000	19.616.529.800	96,29
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.329.254.372	29.836.111.258	98,37
3.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.629.366.655	3.559.864.878	98,09
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.452.414.230	2.412.603.567	98,38
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	15.804.463.449	15.659.494.677,35	99,08
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.943.104.821	4.817.863.963	97,47
7.	Program Pengelolaan Persampahan	246.147.805	227.572.050	92,45
8.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	2.745.636.400	2.741.607.058	98,85
9.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.084.081.323	982.329.994	90,61
10.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.372.235.946	4.265.314.003	97,55
11.	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	187.942.546	176.211.884	93,76
12.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.656.563.817	5.737.512.226	86,19
13.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	408.096.000	408.082.606	99,99
14.	Kawasan Permukiman	7.555.989.285	7.555.989.285	100
15.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	782.639.194	774.093.631	98,91
16.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.150.000.000	15.202.333.537	94,13
17.	Kesejahteraan Rakyat	2.250.000.000	1.866.000.000	82,93
TOTAL PAGU		119.970.665.843	113.973.514.417	95,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha melalui perangkat daerah terkait untuk membantu masyarakat miskin dengan berbagai upaya dengan ketersediaan anggaran pada tahun 2023 tercatat sekitar Rp.119.970.665.843,- dialokasikan untuk penurunan angka kemiskinan melalui beberapa program yang sudah dijalankan, dari pagu yang tersedia dapat terealisasi pada tahun 2023 sebesar Rp.113.973.514.417,- atau sekitar 95,00 % dari pagu yang dianggarkan. Pelaksanaan program penurunan kemiskinan ini juga mengalami berbagai kendala atau permasalahan di lapangan, mulai dari kendala akses tujuan pelaksanaan kegiatan, masalah peserta pelatihan, kurangnya *link and match* kebutuhan tenaga kerja dengan dunia usaha, dan juga sulitnya untuk menyesuaikan data kemiskinan yang ada di DTKS.





SASARAN. 3

Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

❖ **Indeks Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Mulai tahun 2020 ini, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan, serta dipengaruhi oleh keberadaan kanal dan kejadian kebakaran jika berada di kawasan ekosistem gambut; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Dasar hukum penyusunan IKLH sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan untuk kelestarian pembangunan. Selama 5 tahun belakangan kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Riau terus menunjukkan penurunan kualitas. Ukuran kualitas lingkungan hidup menunjukkan angka yang terus menurun, baik dari air, udara maupun dari tutupan lahan. Berikut disajikan kinerja urusan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter :
 - TSS - Total Fosfat
 - pH - NO₃, dan
 - DO - Fecal Coli
 - BOD - COD
2. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter :
 - SO₂ da
 - NO₂;
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;
4. Indeks Kualitas Ait Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS,DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Berikut disampaikan informasi ketercapaian kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau 2023 :

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualitas Lingkungan Hidup	69,95	74,26	106

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,26 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 69,95 dengan Rating **Sangat Baik** dengan Indeks Respon sebesar 8,32. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia. Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu:

- a. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,93 dengan rating Sedang;

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air.

- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,13 dengan rating Sangat Baik;

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti Car Free Day (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Sementara itu, target dan capaian pada IKU.

Tabel 3.36
Indeks Kualitan Udara Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri

No	Kab/Kota	Target IKU	Capaian IKU	Kriteria
1	Kab. Bintan	88,76	93,62	Baik
2	Kab. Karimun	90,41	93,05	Baik
3	Kab. Kep. Anambas	85,55	89,37	Baik
4	Kab. Lingga	93,57	95,04	Baik
5	Kab. Natuna	86,06	89,37	Baik
6	Kota Tanjungpinang	87,84	86,37	Baik
7	Kota Batam	86,30	84,12	Baik

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya. Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah:

1. Transportasi Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara disekitar jalan raya yang



dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 - 10 meter dari bahu jalan. Metodologi LAPORAN IKLH 2021 13.

2. Pemukiman Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.
3. Perkantoran/pasar/komersial Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/ komersil. Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO₂ dan SO₂ dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut: • Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali) • Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam) • AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun) • AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun) Jumlah titik sampling menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 6. Jumlah titik sampling ini merupakan gabungan antara titik sampling menggunakan metode passive sampler baik yang dilakukan dengan dana APBN maupun APBD ditambah dengan titik sampling pemantauan udara ambien otomatis kontinu (AQMS)

Tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Batam karena adanya pembukaan Kawasan industri, penambahan ruas jalur jalan dan bertambahnya jumlah transportasi di Kota Batam sehingga menyebabkan target indeks kualitas udara di Kota Batam belum tercapai. Namun jika dilihat dari skor dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Batam masih masuk **kategori Baik**. Target Indeks Kualitas Udara (IKU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 86,20 dengan capaian 87,71, sehingga di tahun 2023 Pemerintah Kota Batam meningkatkan target IKU sebesar 86,30 yaitu naik 0,1 dari tahun sebelumnya dengan harapan dapat tercapai seperti pada tahun sebelumnya. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 66,97 dengan rating Sedang;

Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangsih yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,81 dengan rating Baik.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat (*LANDBASE POLLUTION*).

Adapun realisasi IKLH 2023 sebesar 74,26 indeks sedangkan tahun 2022 sebesar 74,13 sehingga ada kenaikan 0,13 indeks dibanding tahun 2022. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.37

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 Indeks	74,13 Indeks	106,31 %	69,95 Indeks	74,26 Indeks	106,16%
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	20 %	50 %	250 %	20 %	20 %	100%
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	76,75 Indeks	85,56 Indeks	111,48 %	77,39 Indeks	81,81 Indeks	105,71%
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,70 Indeks	56,79 Indeks	100,16 %	56,80 Indeks	54,93 Indeks	96,71%
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,25 Indeks	90,27 Indeks	102,29 %	88,35 Indeks	90,13 Indeks	102,01%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59,08 Indeks	58,00 Indeks	98,17 %	59,09 Indeks	66,97 Indeks	113,33%

➤ Alternative solusi yang dilakukan

a. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh :

- Pembuangan sampah di laut



- Pembuangan Limbah oleh sektor industri
- Reklamasi pantai
- Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak di olah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kabupaten/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.

Alternatif solusi yang dilakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara :

- Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
- Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantau dalam setahun (PP 22 Tahun 2021)
- Pemberdayaan Instrumen Pemantauan secara online kualitas air yang ada di Sei jago di Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sekaligus penyediaan petugas beserta honorarium petugas jaga.

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara :

- Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
- Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengurangi Kendaraan Pribadi.
- Membatasi Penggunaan Pendingin Udara.
- Efisiensi Penggunaan Listrik sebagai Solusi Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
- Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai.



d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk melakukan program dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

➤ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan beserta besaran anggaran pendukung**

Pelaksanaan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- yang dialokasikan untuk penganugerahan dan penyerahan sertifikat Penghargaan Perusahaan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup pada periode penilaian tahun 2021 - 2022 serta dilakukan inspeksi ke lapangan kepada perusahaan peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan periode tahun 2022 – 2023, Program Pengelolaan persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 246.147.805,- dialokasikan untuk pengelolaan sampah berupa pemberian bantuan kepada 8 (delapan) kelompok bank sampah yaitu 6 (enam) kelompok bank sampah di Kab. Lingga, 1 (satu) kelompok di Kab. Bintan dan 1 (satu) di Kota Tanjung Pinang. Program pengelolaan hutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 297.035.500,- dialokasikan untuk pengawasan supaya hutan tersebut tetap lestari dan tidak dirusak oleh masyarakat dan penanaman mangrove seluas 2 (dua) Hektar di Batam. Maka capaian kinerja IKLH Tahun 2023 sebesar 74,26 dari target 69,95 dari program yang langsung mengampu indikator tersebut belum ada tetapi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pendukung atas keberhasilan seperti pada tabel berikut :

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000	228.935.899	91,57
1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000	228.935.899	91,57
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	246.147.805	227.572.050	92,45
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	246.147.805	227.572.050	92,45
3	PROGRAM PENGELOLAAN	297.035.500	287.461.100	96,78

	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2023
--	--	-------------

	HUTAN			
3.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	297.035.500	287.461.100	96,78
	JUMLAH	793.183.305	743.969.049	93,80

➤ **Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.**

Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja			Target RPJMD	Standar Nasional
		2021	2022	2023		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69.95	73.19	74.13	74.26	69.95	73,08

Pencapaian kinerja IKLH sebesar 74,26 dari target 69,95 merupakan hasil dari kegiatan dari berbagai lintas sektor. Analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja DLHK tahun 2023 adalah :

- Sumber Daya Manusia (SDM) ;

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani Lingkungan Hidup ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian. Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini sebanyak 11 (sebelas) orang yang tersebar di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebanyak 6 (enam) orang, UPTD. Laboratorium Lingkungan sebanyak 2 (dua) orang dan di Bidang persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan 3 (tiga) orang, seperti tabel dibawah ini :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN
1.	Roki, S.H	19840712 201001 1 021	Penata Tk.I / III.d	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.	Erlangga Wisnu Wardana, S.E	19760627 200604 1 023	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
3.	Vera Herlina, S.Sos	19881007 201101 2 008	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
4.	Axsal, SKM., M.Kes	19800524 200604 1 012	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
5.	Iran Andrianto, S.E	19790615 201101 1 004	Penata Tk.I / III.d	Penelaah Dampak Lingkungan
6.	Cici Septiarini, S.Si.	19851117 201101 2 009	Penata Tk.I / III.d	Analisis Lingkungan Hidup
7.	Mardinayanti, S.Si.	19840331 201101 2 011	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
8.	Milya Hariza, S.T.P.	19761223 201101 2 002	Penata Muda / III.a	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir
9.	Rupi'ah, S.P.	19730315 200502 2 006	Penata Tk.I / III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
10.	Raden Mariadi N, S.P.	19841105 200904 1 002	Penata Tk.I / III.d	Pengendali Dampak



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

11.	Said Syahro Marfandy, S.E.	19751019 201001 1 007	Penata Tk.I / III.d	Lingkungan Ahli Muda Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
-----	----------------------------	-----------------------	---------------------	--

- Sarana

Saat ini sarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah :

o AQMS mobile station

AQMS mobile station yang ada saat ini ada 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) di Kota Batam tepatnya di batua Aji dan 2 (dua) di Kota Tanjungpinang yang terletak di Pamedan.

o UPTD. Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Pramuka No.7B Sekupang – Batam. UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah di dukung dengan instrumen atau peralatan untuk pengujian kualitas air, baik air bersih maupun air laut.





SASARAN. 4

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin baik pula pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dapat terwujud.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahkan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Hal tersebut dapat terwujud apabila ada upaya Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Upaya reformasi diharapkan semakin berkualitasnya tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan Reformasi Birokrasi hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pencapaian kondisi tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan Roadmap Reformasi Birokrasi Nomor 460 Tahun 2023 dengan mempertajam Sasaran, indikator dan target beserta rencana aksi Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024.

Dalam memenuhi Sasaran Strategis RPJMD bidang Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif telah ditetapkan indikator kinerja sebagaimana target dan capaian sebagai pada tabel berikut:

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Antisipatif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	70.37	73.56	104.53%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Indeks Reformasi birokrasi merupakan nilai hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai gambaran sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan sebesar 70,37 dapat dicapai sebesar 73,56 dengan persentase capaian sebesar 104,53%. Berikut disampaikan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Terdapat target Kegiatan Utama Roadmap RB yang perlu disusun berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) – Rencana aksi yang disusun harus berupa "how to" atau langkah-langkah untuk mencapai kegiatan utama dan mempertajam rencana aksi yang disusun agar dapat mencapai sasaran kegiatan utama
2. Implementasi AKIP sudah sangat baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pada Road Map RB 2021-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Keberhasilan Refromasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 didukung dengan pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagai berikut :

	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2023
--	--	-------------

➤ **REFORMASI BIROKRASI GENERAL**

Tabel 3.39

Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1	Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (persen)	100%	100%
2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai (persen)	75%	75%
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (persen)	100%	-
		Indeks SPBE	2,9	2,68
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan	93.00	83,82
		Nilai SAKIP	75.00	76.14
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0 Unit WBK/ WBBM	0
		Tingkat Maturitas SPIP	3.00	3.00
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	100.00	100
		Hasil Survei Penilaian Integritas	72.00	70.58
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	75.00	79,80
		Indeks Kualitas Kebijakan	0.00	-
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	85	90,40
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,6	1,9
8	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	90,11
		Opini BPK	WTP	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	88.00	89.25
9	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Dan Fungsional	Indeks Sistem Merit	316.00	330,5
10	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien			
11	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja			
12	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan fisien			
13	Terwujudnya percepatan tranformasi disgital manajemen ASN			
14	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN			
15	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN			
		Indeks BerAkhlaq	70.00	56
16	Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.00	84,91
		Indeks Pelayanan Publik	4,1	4,13

	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2023
--	--	-------------

		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	86.00	86,74
--	--	--	-------	-------

Beberapa informasi capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari tingkat Penyederhanaan birokrasi dengan target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 100%. Penyetaraan jabatan dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Implementasi penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 433 jabatan struktural telah dialihkan menjadi jabatan fungsional dengan rincian Jabatan administrator sebanyak 14 Jabatan dan jabatan pegawai sebanyak 419 jabatan.

2. Terimplikasinya Kebijakan Sistem kerja dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik

Terimplikasinya kebijakan sistem kerja dengan model fleksibel dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau dengan target 100 % dan telah tercapai sebesar 75 %. Kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan telah pernah disosialisasikan di lingkungan perangkat daerah difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 November 2023 di Batam. Hasil evaluasi dari Kemendagri bahwa Implementasi Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kategori B. Faktor penyebab tercapainya target indikator ini, adalah sistem kerja telah menjadi 3 prioritas kerja penyederhanaan birokrasi di provinsi Kepulauan Riau setelah tahapan penyederhanaan struktur organisasi dan penyederhanaan jabatan (dari jabatan struktural ke jabatan fungsional) dilakukan.

3. Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional

Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari indikator indeks SPBE dengan target sebesar 2,9 dan capaian sebesar 2,68. Belum tercapainya target Indeks SPBE dikarenakan belum adanya Arsitektur SPBE, Road Map SPBE, Rencana Induk SPBE, dan belum melaksanakan audit TIK.

4. Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan



dengan target sebesar 93,00 dengan capaian sebesar 83,82 dan indikator Nilai Sakip dengan target sebesar 75 dan capaian sebesar 76,14. Indeks Perencanaan Pembangunan masih belum meningkat sesuai dengan target RPJMD, namun beberapa upaya sudah dilakukan dengan cara adanya keselarasan antara muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota serta muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD didukung dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang semakin baik dan intensif antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi dengan Badan Perencanaan Kabupaten/Kota serta dengan Mitra Perangkat Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senantiasa memastikan keterlibatan dan peran serta yang aktif dari Kab/Kota dan Perangkat Daerah dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu didukung pula dengan Sumber Daya Manusia Fungsional Perencana yang semakin memadai serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi memungkinkan terjadinya keselarasan antar dokumen perencanaan.

Tercapainya nilai Sakip di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau didukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, Hasil evaluasi terhadap nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/282/AA. 05/2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Meningkatnya kualitas pengawasan dapat dilihat dari :

- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan target sebesar 3.00 dan tercapai sebesar 3.00 Berdasarkan Lembar kerja Evaluasi Kementerian PAN dan RB seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun dan memperbaiki perencanaan dengan baik, khususnya terkait keselarasan antara sasaran, kualitas indikator, target kinerja, dan kelengkapan komponen perencanaan di beberapa OPD yang belum tepat, Peningkatan implementasi Manajemen resiko pada Provinsi Kepulauan Riau melalui penyediaan sumber daya dan peningkatan kompetensi pegawai.
- Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) harus memenuhi standar syarat indikator yang



telah ditentukan, diantaranya adalah dalam dua tahun terakhir tidak ada kerugian negara yang belum diselesaikan, tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, adanya komitmen pimpinan dan pegawainya akan bekerja berdasarkan indikator dan target kerja yang jelas, dengan menandatangani Pakta Integritas, penguatan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan menyusun indikator kinerja, menetapkan target kinerja, serta meningkatkan capaian kinerja.

Pencanangan ZI Provinsi Kepulauan Riau sudah dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2023 di Best Western Premiere Panbil Batam, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala UPT Batam Center, Kepala Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah yg ditetapkan dalam program OLGOZI (Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, Rumah Sakit, SAMSAT) namun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum terbentuk koordinator/satgas ZI, Unit yang dicanangkan masih memiliki temuan APIP/BPK yang belum selesai di tindaklanjuti.

- Hasil Survey Penilaian Integritas

Hasil Survei Penilaian Integritas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 72.00 dengan capaian sebesar 70.58. Berikut salah satu rekomendasi dari Kemenpan RB terhadap hasil Survey Penilaian Integritas yaitu Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.

6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Meningkatnya kualitas kebijakan dan Regulasi dapat diukur dari Kualitas Kebijakan dan Indeks Reformasi Hukum, Indeks ini sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi.

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan. Salah satu inisiatif yang perlu menjadi agenda ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dalam manajemen kebijakan di setiap instansi Pemerintah.



Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi pada provinsi Kepulauan Riau telah didapat indeks reformasi hukum dengan bobot 79,80 dari 148 produk hukum daerah yang telah difasilitasi.

7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan Data Statistik Sektoral

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari :

- Pada tahun 2023 ANRI telah melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.
- Adapun hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 serta Keputusan Kepala ANRI Nomor 395 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **90,40 (sembilan puluh koma empat nol)** dengan kategori AA (**Sangat Memuaskan**).

HASIL PENILAIAN :

A. DIGITASI ARSIP

(untuk arsip statis)

- Unit Kearsipan Pemerintah Daerah (Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau) telah melakukan alih media dan sudah sesuai dengan standar. Alih media sesuai dengan standar adalah melaksanakan prosedur alih media yaitu:
 1. Menyusun Berita Acara Alih Media Arsip;
 2. Menyusun Daftar Arsip yang Dialihmediakan; dan
 3. Melakukan autentikasi arsip pada hasil alih media.

B. IMPLEMENTASI ABKD (Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis)

(untuk arsip dinamis)

1. Pemerintah Daerah telah menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) versi live serta telah terdapat transaksi pengguna minimal 5 perangkat daerah dan ke instansi lain di luar pemerintah daerah.



2. Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis pada Pemerintah Daerah melaksanakan proses bisnis penciptaan arsip, penggunaan arsip, dan pemeliharaan arsip (pemberkasan).
3. Pemerintah Daerah telah melakukan pembuatan draft/konsep naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Naskah dinas ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik, dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar.
4. Pemerintah Daerah melakukan penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
5. Naskah Dinas telah teregistrasi, terdistribusi, dilakukan pengendalian naskah dinas masuk, dan dicatat pada agenda naskah dinas masuk secara elektronik melalui aplikasi kearsipan dinamis.
6. Pengguna Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis pada Pemerintah Daerah melakukan pemberkasan terhadap naskah dinas lebih dari 20% s.d. 50%.

C. SUMBER DAYA ABKD (Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis)

1. Pemerintah Daerah memiliki Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis yang telah dilakukan seluruh Audit TIK.
2. Pemerintah Daerah telah memiliki Sumber Daya Manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui bimbingan teknis.
3. Pemerintah Daerah telah memiliki sarana penyimpanan arsip elektronik berupa data center minimal memenuhi persyaratan tier 3. Penjelasan Tier 3 – Concurrently Maintainable Tier 3 memiliki persyaratan seluruh data center harus memiliki lebih dari satu sumber listrik dan jaringan sehingga tidak ada shutdown. Tingkat uptime server juga dibatasi maksimal 99,982% atau sekitar 1,5 jam dalam satu tahun. Untuk urusan uptime server antara tier 2 dan tiga terpaut perbedaan yang cukup jauh. Untuk tier 3 keatas, saat terjadi maintenance atau penggantian komponen tidak perlu dilakukan shutdown.
4. Pemerintah Daerah telah terdapat tim helpdesk dalam rangka penerapan aplikasi bidang kearsipan dinamis yang ditetapkan dalam surat keputusan/surat perintah.

D. JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

1. Lembaga Kearsipan Daerah terdaftar sebagai simpul dan telah melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional secara terjadwal minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan 4 (empat) sampai 6 (enam) dari 8 (delapan) tanggung jawab sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.



8. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan dan Aset

Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan dan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat dari :

- Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dengan target nilai Baik dan tercapai dengan nilai Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya perencanaan yang baik dalam perumusan Kebijakan, pendampingan dan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Terlaksananya Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pembinaan SDM, Kelembagaan dan pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa yang tepat fungsi, Jumlah Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompetensi telah sesuai dengan rencana aksi pemenuhan kebutuhan.

- Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meraih opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Berbagai Upaya atau strategi yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI), penetapan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Meningkatkan kapasitas aparatur penyusun laporan keuangan dan pengurus barang perangkat daerah melalui bimbingan teknis dan penyempurnaan pengelolaan barang dan pengelolaan barang yaitu aplikasi SIPD. SIPD dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik terkait perencanaan pembangunan daerah sampai pelaporan keuangan daerah.

Gambar 3.1
Penghargaan Keberhasilan Menyusun Dan Menyajikan Laporan Keuangan Dengan Opini WTP



- Tindaklanjuti rekomendasi BPK

Tindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan target sebesar 88% dan dapat tercapai sebesar 89,25. Hal ini dapat terwujud karena perangkat daerah kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK.

9. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan dan Fungsional, Terselenggaranya Manajemen talenta yang efektif dan efisien, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil layak dan berbasis kinerja, Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien, terwujudnya Percepatan transformasi digital manajemen ASN, terwujudnya Percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN

Dalam mewujudkan Penataan kepegawaian di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan indikator kinerja yaitu indeks sistem merit. Sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, berintegritas, profesional, adaptif, kolaboratif, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme Penerapan Penilaian Sistem Merit pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimulai sejak tahun 2020 yang dilakukan penilaian oleh KASN melalui Aplikasi SIPINTER berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

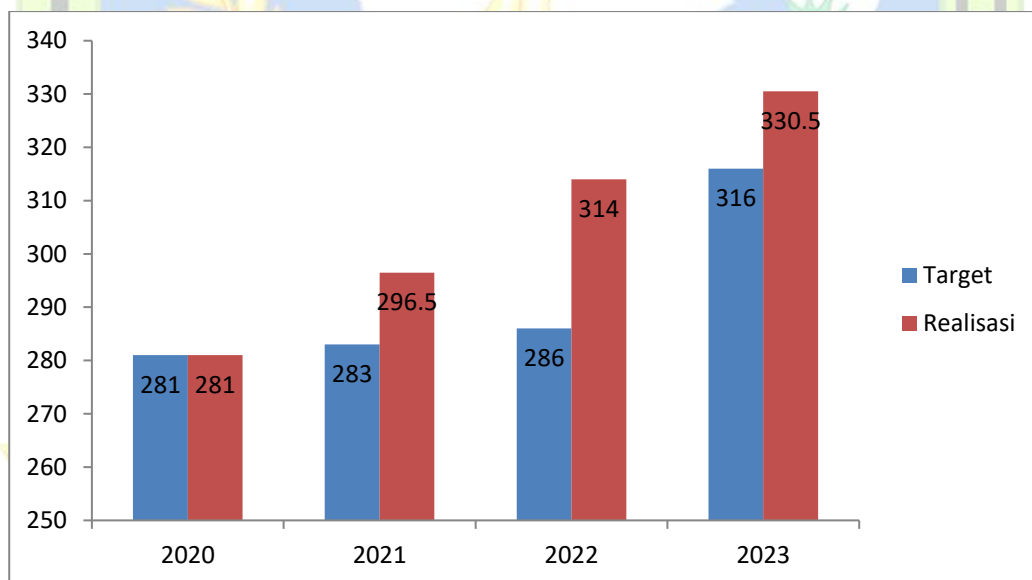
2023

Tabel 3.40
Capaian Indeks sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI TERTINGGI	REALISASI			
			2020	2021	2022	2023
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan	40	37,5	37,5	40	40
2	Pengadaan	40	32	34	34	38
3	Pengembangan Karir	130	67,5	65	72,5	80
4	Promosi dan Mutasi	40	20	20	20	20
5	Manajemen Kinerja	80	60	70	72,5	77,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	30	35	40	40
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16	16	16
8	Sistem Informasi	24	18	19	19	19
Skor Nilai			281	296,5	314	330,5
Indeks			0,68	0,72	0,75	0,81
Kategori			III	III	III	IV
Sebutan			Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

10. Meningkatnya kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN

Grafik 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi indeks Sistem Merit



Hasil Indeks Sistem Merit di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 281 pada tahun 2020, yang berarti penerapan system merit dalam manajemen ASN di provisni Kepulauan Riau dalam kategori III dengan 296,5 tahun 2022 memperoleh nilai 314, ditahun 2023 mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 330,5 dalam kategori IV dengan sebutan **Sangat Baik**.

Gambar 3.2
Penghargaan Nilai Sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau



Dalam memenuhi kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari indikator Indeks BerAkhlak. Berdasarkan survey Pemetaan Budaya Kerja dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diikuti oleh 1100 Responden dengan nilai indeks 57,5% di kategori B Cukup Sehat. Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai BerAKHLAK diperlukannya penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK diantaranya dengan mengadakan internalisasi berupa Kick off/Launching Core Values ASN BerAKHLAK, penguatan komitmen pimpinan, sosialisasi dan internalisasi pemahaman core values BerAKHLAK Penyelarasan Sistem memasukkan budaya kerja ke dalam system pembelajaran terintegrasi, mengikat budaya dengan system pengelolaan kinerja (SPK), Menyelaraskan SPK dengan system penghargaan, manajemen talenta dan karier. Adapun kegiatan yang terlaksana selama tahun 2023 dalam rangka mendukung meningkatkan Indeks BerAkhlak, sebagai berikut :

1. 7 edisi Seri Webinar “NGOPI TIME” Nilai BerAkhlak, dengan peserta lebih dari 12.000 ASN;
2. Terlaksananya “Quiz ASN BerAkhlak” antar OPD secara daring yang memperbutkan piala bergilir Gubernur Kepri.

11. Terwujudnya pelayanan publik secara prima

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (excellent service) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik secara prima dapat dilihat dari ketercapaian indikator berikut :

- Indeks Pelayanan Publik

Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek

Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indeks pelayanan publik Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 4,1 dan capaian sebesar 4,13 kategori Sangat Baik. Faktor penyebab tercapainya target indikator ini, antara lain telah terbangunnya koordinasi yang baik antara Biro Organisasi dengan Perangkat Daerah yang dinilai, sehingga perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publiknya dengan memenuhi aspek-aspek dan indikator yang dinilai.

**Gambar 3.3
Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**



- Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan pengukuran dengan cara survey secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 84,00 dan tercapai sebesar 84,91 kategori Baik. Faktor penyebab tercapainya target antara lain adalah telah terbangunnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan kewajiban Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan melaporkan hasilnya serta adanya upaya dari Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Hal-hal yang telah dilakukan terkait hal ini, antara lain Biro Organisasi telah melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait tatacara pelaksanaan SKM dan selalu berkoordinasi untuk pelaporan hasil SKM melalui surat.

- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan

Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik adalah penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/lembaga/Daerah terhadap Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini merupakan upaya pencegahan mal administrasi dengan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dengan hasil akhir berupa opini pelayanan publik. Nilai Tingkat kepatuhan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

pelayanan publik Provinsi Kepulauan Riau sebesar 86,74 (Zona Hijau, kategori B Kualitas Tinggi). Salah satu faktor penyebab tercapainya target adalah telah terjalinnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana penyelenggaraan pelayanan publik saling bekerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal yang telah dilakukan untuk pencapaian target ini yaitu melakukan koordinasi baik dengan Perangkat Daerah yang dinilai maupun dengan Ombudsman dan dilaksanakannya Asistensi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman.

Gambar 3.4
Penghargaan kepatuhan pelayanan publik





➤ Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

**Tabel 3.41
Capaian Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	5,74	5,69
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,3	15,4
3.	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	(3.13)±1	(3.13)±1
4.	Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	23.000 Miliar	11.308 Miliar
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	13.500 Miliar	8.856 Miliar
5	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk dalam negeri	96,20	96.16

Informasi capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kemiskinan (Angka Kemiskinan)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk



miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 akan dibandingkan dengan tahun 2022.

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (142.500 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.504.394 orang) dengan nilai persentase 5,69%.

Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 dengan target 5,74% dapat tercapai sebesar 5,69% sehingga capaian kinerja sebesar 100,87% atau dalam kategori kinerja relatif **sangat baik**.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Digitalisasi Stunting)

Stunting adalah Keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya (-2 SD Median) dimana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan eye contact, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat.

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin. Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U - 3 SD < - 2 SD). Untuk data prevalensi stunting didapat melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan RI. Per tahun 2023, capaian prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dari hasil data SSGI sebesar 15,4%. Namun untuk rincian perhitungan capaian tersebut tidak dipublikasikan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau baik. Prevalensi stunting Tahun 2023 ditargetkan sebesar 15,3%, dikarenakan data SKI tahun 2023 belum dipublikasikan maka capaian tahun 2023 menggunakan data SSGI tahun 2022 di mana prevalensi stunting mencapai angka 15,4%, dengan capaian kinerja sebesar 99,3% atau dalam kategori **baik**.

3. Terkendalinya tingkat inflasi daerah (Tingkat Inflasi)

Stabil dan Terkendalinya Inflasi Kepulauan Riau triwulan IV dikarenakan Inflasi yang terkendali. Hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan



Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada bulan Desember 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melaksanakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran bahan pangan bersubsidi di berbagai Kab/Kota disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Penguatan sinergi juga telah dilakukan dengan lembaga/instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan yang ditandai dengan Peluncuran Mobil Pasar Keliling oleh TPID Kota Batam bersinergi dengan Asosiasi Distributor yang menjual komoditas dengan harga distributor dan menjangkau seluruh kelurahan/kecamatan. Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat strategi pengendalian inflasi, TPID Kepulauan Riau telah melaksanakan capacity building di tingkat kota dan kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau.

- **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Di Daerah**

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan IV Tahun 2023 antara lain:

1. Kenaikan tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan jelang libur Nataru. Angkutan udara sebesar 0,07 persen; dan angkutan laut sebesar 0,06 persen.
2. Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni kenaikan harga bayam, bawang merah, kacang panjang, dan tomat.
3. Peningkatan curah hujan dan gelombang laut yang berpotensi menurunkan pasokan ikan segar dan mempengaruhi produksi aneka cabai, sayur – sayuran.
4. Kenaikan sub kelompok rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 128,95% pada Desember 2023.
5. Pakaian dan alas kaki komoditas yang dominan memberikan andil inflasi mtm, yaitu sepatu anak sebesar 0,01% tingginya permintaan jelang masuk sekolah semester baru.
6. Komoditas Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: sewa rumah sebesar 0,10 persen; kontrak rumah sebesar 0,09 persen; dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen.
7. Komoditas Kesehatan yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,80 persen; dan sub kelompok jasa kesehatan lainnya sebesar 0,17 persen.
8. Kenaikan Harga Ikan di provinsi Kepulauan Riau lantaran nelayan tidak melaut karena angin kuat, sehingga membuat stok ikan berkurang.

- **Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah**

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2023 terkendali oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Beberapa kegiatan di triwulan IV



ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Pada bulan Desember 2023, TPID telah melaksanakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran bahan pangan bersubsidi di berbagai Kab/Kota disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh Kepala Daerah.
 2. Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
 3. Penguatan sinergi juga telah dilakukan dengan lembaga/instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan yang ditandai dengan Peluncuran Mobil Pasar Keliling oleh TPID Kota Batam bersinergi dengan Asosiasi Distributor yang menjual komoditas dengan harga distributor dan menjangkau seluruh kelurahan/kecamatan.
 4. TPID Kepulauan Riau telah melaksanakan capacity building di tingkat kota dan kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau.
- Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah
- Berapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :
1. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka rute pelayaran baru maupun peningkatan kapasitas kapal pengangkut yang sudah ada sehingga akan mempersingkat waktu tempuh serta memperlancar proses pengiriman dan arus bongkar muat bahan pangan strategis.
 2. Mendorong penggunaan Smart Green House untuk mengatasi masalah siklus tanam agar memperoleh produktivitas tanaman yang berkesinambungan sepanjang tahun sehingga jumlah pasokan tetap stabil.
 3. Penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yakni mendorong implementasi MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada dan memperluas kerja sama dengan daerah baru lainnya dengan melibatkan BUMD/asosiasi distributor/koperasi/kelompok tani/nelayan yang dapat dilakukan melalui Forum Bussiness Matching antara produsen dan distributor.
 4. Meningkatkan extra effort pengendalian inflasi menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan sebagai upaya penguatan operasional Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi



Pangan (GNPIP) 2023, serta sosialisasi dan koordinasi penguatan operasionalisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023.

5. Optimalisasi pemanfaatan APBD khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi juga success story inovasi distribusi pangan di daerah perbatasan. 6. Mendorong perkembangan harga komoditas berupa beras, rokok kretek filter, cabai merah, emas perhiasan, sewa rumah. Upaya ini dapat dilakukan dengan menekan laju inflasi.

- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

1. Memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota baik jangka pendek maupun jangka Panjang dengan mengacu pada Peta Jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi yang telah disusun, serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap implementasi roadmap tersebut terutama untuk mengendalikan inflasi komoditas pangan.
2. TPID akan terus mengawal inflasi dengan memperkuat GNPIP. Penguatan GNPIP akan dilakukan melalui pelaksanaan HLM TPID, optimalisasi KAD, serta monitoring harga dan pasokan.
3. Memperkuat pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di tingkat pedagang dan distributor, termasuk margin di setiap rantai distribusi terutama pada komoditas pangan strategis. Koordinasi dengan distributor perlu terus dilakukan untuk memperoleh informasi kondisi pasokan terkini dan arah harga ke depan sebagai dasar penyusunan upaya antisipasi pengendalian inflasi.
4. Meningkatkan intensitas pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di pasar serta distributor secara intensif khususnya pada komoditas pangan strategis antara lain bayam, kangkong, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan kacang panjang untuk memastikan kecukupan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan sehingga tidak melebihi ketentuan HET. Koordinasi yang lebih intensif dengan distributor juga diperlukan untuk mendapatkan informasi prospek harga dan pasokan untuk menyusun langkah antisipasi di tengah peningkatan inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
5. Melakukan operasi pasar murah bersama distributor dan pihak lainnya khususnya untuk komoditas pangan strategis terutama aneka cabai dan telur ayam disertai dengan upaya menambah pasokan dari daerah lain yang memiliki tingkat harga lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau.



6. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar daerah/provinsi baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka rute pelayaran baru maupun peningkatan kapasitas kapal pengangkut yang sudah ada sehingga akan mempersingkat waktu tempuh serta memperlancar proses pengiriman dan arus bongkar muat bahan pangan strategis.
7. Mengamankan ketersediaan pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan lokal, mendorong dan mengoptimalkan program tanam pekarangan, meningkatkan produksi ikan budidaya air tawar dan air laut, serta pemenuhan pakan ternak dengan harga lebih terjangkau.

4. Peningkatan Investasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi, ditetapkan dua indikator kinerja yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan evaluasi capaian sebagai berikut :

Tabel 3.42
Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	23.000 Miliar	11.308 Miliar	49,16
2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	13.500 Miliar	8.856 Miliar	65,6

**data BKPM / Kementerian Investasi Tahun 2024*

Jumlah nilai realisasi investasi PMA tahun 2023 sebesar Rp. 11.308.680.000.000 (Sebelas Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Juta Rupiah) dari target sebesar Rp. 23.000.000.000 (Dua Puluh Tiga Triliun Rupiah) atau terealisasi sebesar 49,16% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 8.856.600.000.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Ribu Rupiah) dari target Rp13.500.000.000.000 (Tiga Belas Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) atau terealisasi 65,6% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026. Namun jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan oleh BKPM/Kementerian Investasi kepada Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 20,5 Triliun (gabungan PMA dan PMDN), maka nilai realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 20,1 Triliun atau sekitar 98% dari target yang ditetapkan.

- Nilai Realiasi Investasi PMA

Nilai Realisasi Investasi diperoleh dari dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang rutin dilaporkan oleh perusahaan. Setiap investor yang melakukan penanaman modal



berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi perusahaan. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi yang dilakukan. LKPM juga mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip.

Dari tabel di atas diketahui realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.308.680.000.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.000.000.000.000 atau capaian 49,16% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026. Capaian nilai realisasi investasi PMA masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan dikarenakan banyak rencana penanaman modal asing yang tidak terealisasi.

Tabel 3.43
Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Investasi PMA (Rp)
2021	15.237.808.300.000
2022	13.403.492.655.000
2023	11.308.680.000.000

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi investasi PMA pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 15,6% dibandingkan dengan capaian nilai realisasi investasi PMA tahun 2022 atau sekitar Rp. Rp. 2,09 Triliun. Penurunan nilai realisasi ini disebabkan sejumlah rencana penanaman modal asing di provinsi Kepulauan Riau tidak terlaksana dikarenakan berbagai alasan.

Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Karimun, jauh meninggalkan capaian empat kabupaten/kota lainnya. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terjadi pemerataan realisasi investasi. Salah satu yang menjadi hambatan adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di kabupaten Anambas, Lingga, dan Natuna. Walaupun potensi yang ditawarkan cukup tinggi, namun minimnya sarana pendukung menjadi hambatan tersendiri bagi perkembangan investasi di daerah tersebut.

- **Nilai Realisasi PMDN**

Sebagaimana nilai realisasi PMA, nilai realisasi PMDN juga dapat diketahui dari LKPM yang disampaikan oleh perusahaan yang berinvestasi di suatu daerah. Data akhir realisasi yang dikeluarkan oleh BKPM sebagai lembaga yang berwenang menyampaikan data investasi di Indonesia, nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar Rp.



8.856.600.000.000 (Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dari target Rp. 13.500.000.000.000 (Tiga Belas Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) yang ditetapkan dalam RPJMD. Adapun nilai realisasi investasi PMDN tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44
Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Investasi PMDN (Rp)
2021	9.768.685.700.000
2022	4.817.424.100.000
2023	8.856.600.000.000

**data BKPM Tahun 2024*

Dari tabel diatas terlihat nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 45,6% atau Rp. 4,03 Triliun. Peningkatan capaian nilai realisasi investasi PMDN dikarenakan bergairahnya ekonomi dalam negeri yang ditunjang dengan berbagai fasilitas insentif penanaman modal baik dari kawasan FTZ maupun diluar FTZ.

5. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efesiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah Daerah wajib Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95% dari belanja pemerintah melalui APBD.

Target Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 96,20% dari pagu Belanja Barang dan Jasa serta Modal (kecuali Modal Tanah) yaitu Rp 1.967.901.517.320, dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.966.962.280.809 (96,16% terhadap pagu). Belum tercapainya target dikarenakan ada belanja impor sebesar Rp 165.320.511.607.

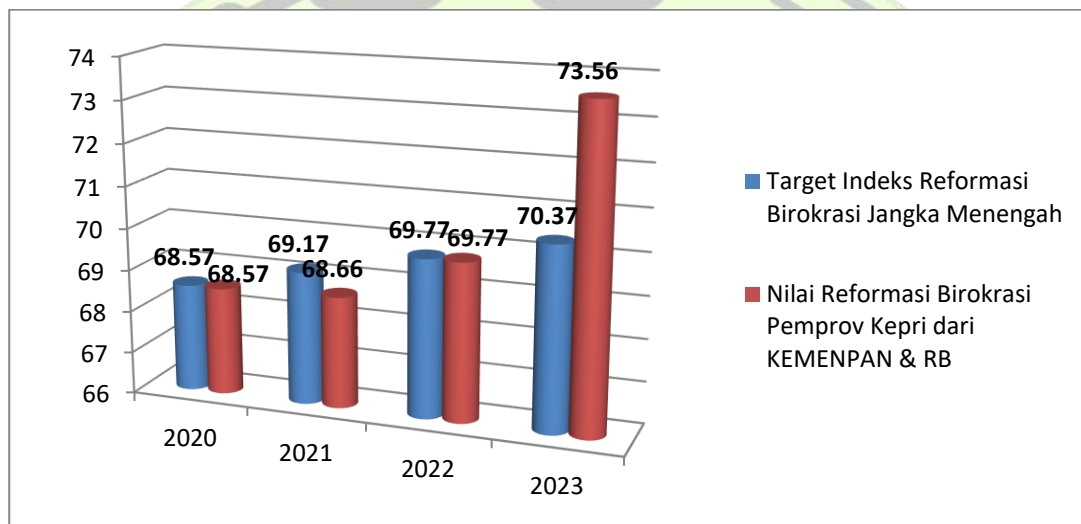


➤ **PERKEMBANGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Berikut disampaikan perkembangan capaian indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau dan target Indeks Reformasi Birokrasi sesuai yang tertuang pada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 3.17

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Target RPJMD Provinsi Kepulauan Riau



Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2022 nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan yang ditargetkan oleh Target Jangka Menengah, pada tahun 2021 dan 2023 nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diatas target jangka menengah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai dari tahun sebelumnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.45
REALISASI ANGGARAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI
1	Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Program Penataan Organisasi	81,132,000	77,738,118
2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Program Penataan Organisasi	105,381,200	101,346,529
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Program pengelolaan aplikasi informatika	161,767,902	160,204,978
		Indeks SPBE		51,009,059	49,983,051
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5,939,832,462	5,723,996,143
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,372,851,990	2,288,870,888
		Nilai SAKIP	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,372,851,990	2,288,870,888
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	86,689,600	86,652,000
			Program Penataan Organisasi	75,242,000	68,268,284
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	22,148,115	22,148,115
		Tingkat Maturitas SPIP	Program	43,408,800.00	43,408,800.00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

			Penyelenggaraan Pengawasan		
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	388,333,814	388,333,814
		Survei Penilaian Integritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	-
6	Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi	Indeks reformasi hukum Indeks kualitas kebijakan	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	565,563,177	551,132,407
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik	Tingkat Digitalisasi Arsip Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Pengelolaan Arsip Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	23.320.500 120,929,678	23.258.100 119,231,343
8	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, pengelola keuangan dan aset	Indek Tata Kelola Pengadaan Opini BPK Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan	330,868,393 206,906,000 1,224,267,248 840,992,100 567,065,400	325,357,284 175,244,901 1,170,965,935 817,969,200 542,330,200
9	1. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Dan Fungsional 2. Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien	Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	864,330,791	837,795,860



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau**

2023

	3. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja				
	4. Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan fisien				
	5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN				
	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN yang Memiliki Kompetensi		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,801,732,632	1,659,230,088
10	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Indeks BerAkhlaq	Program Penataan Organisasi	81,225,000	79,855,912
11	Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Program Penataan Organisasi	136,291,102	133,649,283
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)			
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai)			
		TOTAL ANGGARAN		18,440,820,453	17,712,584,021
		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN		96.05	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau**

2023

**Tabel 3.46
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN
PENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2023**

No.	Sasaran	Indikator	Program Kegiatan	Target	Capaian
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	Program Kawasan Permukiman	7,555,989,285	7,555,989,285
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16,150,000,000	15,202,333,537
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	782,639,194	774,093,631
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,211,883,840	6,106,791,431
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30,329,254,372	29,836,111,258
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2,452,414,230	2,412,603,567
			Program Pengembangan UMKM	1,399,839,000	915,236,615
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2,745,636,400	2,741,607,058
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	408,096,000	408,082,606
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5,933,923,787	5,097,525,950
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	722,640,030	639,986,276
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	187,942,546	176,211,884
			Program Pengelolaan Persampahan	246,147,805	227,572,050
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,084,081,323	982,329,994
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3,294,654,408	3,271,680,595
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4,372,235,946	4,265,314,003
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	15,804,463,449	15,659,494,677



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,786,181,858	1,756,927,338
			Program Pengelolaan Pendidikan	21,672,722,000	20,848,484,862
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2,757,448,900	2,510,764,349
3	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	14,740,000	12,069,000
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	174,131,466	171.711.038,00
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4,616,640,000	4,144,917,900
			Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	695,275,966	616,867,122
			Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	905,330,388	862,534,770
			Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,882,729,800	2,740,989,322
			Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	48,376,543	47,743,110
			Program Hubungan Industrial	115,752,332	113,703,000
				57,292,100	55,654,200
				146,898,726	140,912,200
			Program Pengelolaan Pelayaran	36,286,380,738	35,499,917,381
				4,544,434,136	4,544,434,135
				544,987,900	542,506,890
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	12,074,666,354	11,155,794,508
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,224,401,717	1,158,472,655
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,786,181,858	1,753,227,338
4	Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA),	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	234,103,575	234,076,261
			Program Pelayanan Penanaman Modal	864,840,144	856,200,597
			Program Peningkatan Daya Tarik	102,128,250	68,997,800



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Destinasi Pariwisata		
			Program Pengelolaan Pelayaran	4,544,434,136	4,544,434,135
				35,529,858,238	34,828,588,912
				187,811,900	185,957,000
5	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk dalam negeri		-	
TOTAL ANGGARAN				233.479,590,640	225,497,139,204
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN				96,58 %	





SASARAN. 5

Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

c. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi: $IPM \geq 80$
2. tinggi: $70 \leq IPM < 80$
3. sedang: $60 \leq IPM < 70$
4. rendah: $IPM < 60$



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Dari uraian diatas dapat kami gambarkan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepri sebagai informasi ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023 :

A. Target dan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.47

Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	79,08	102

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja Indeks Pembangunan Manusia dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 77,14 pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 79,08 indeks dan capaian kinerja sebesar 102 atau dalam **Kategori Tinggi**.

B. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.48

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023	Kenaikan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,48	79,08	0,6 %

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 mencapai 79,08 meningkat 0,6 poin (0,76 persen) di bandingkan tahun sebelumnya (78,48).

C. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan dan RPJMD

Tabel 3.49

Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target RPJMD	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	79,08	77,14	102

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kinerja indek Pembangunan Manusia dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 77,14 pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 79,08 Indeks dan capaian kinerja sebesar 102 %.



D. Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional

Tabel 3.50
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	79,08	73,31 - 73,49	107

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

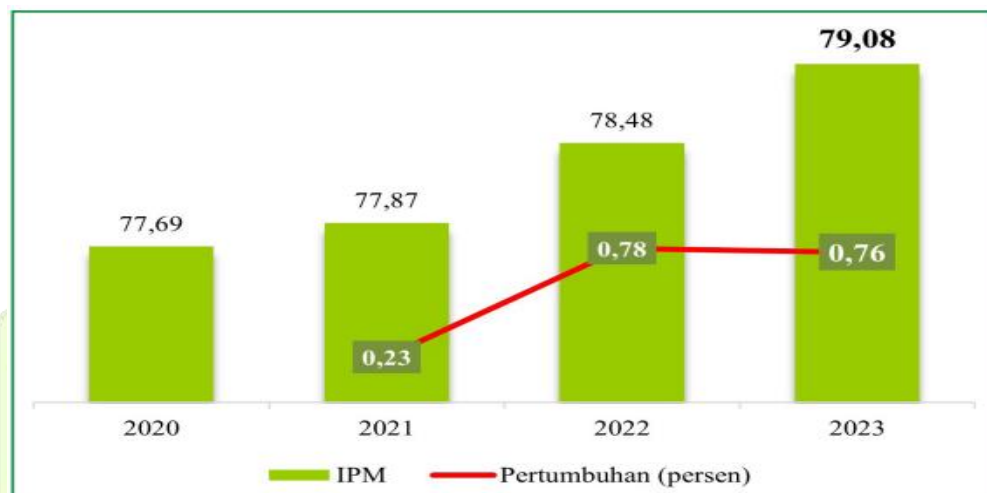
Berdasarkan tabel Target Kinerja di atas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 menyatakan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau diatas target nasional. Selama 2020-2023, IPM Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,59 Tahun. Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh peningkatan dimensi penyusunannya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui harapan lama sekolah (HRS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil perkapita pertahun yang disesuaikan.

Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH lahir di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,90, artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga 74,90 tahun, lebih lama 0,28 tahun atau mengalami kenaikan 0,3 % dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2022. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (LFSP2020).

Perkembangan IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 Selama empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 77,69 pada tahun 2020 menjadi 79,08 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM “tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen per tahun.

Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 IPM Kepulauan Riau tahun 2023 tumbuh 0,76 persen dibandingkan tahun 2022 dan tumbuh 1,79 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2023 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH); dimensi pengetahuan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran riil per kapita per tahun yang merupakan indikator dari dimensi standar hidup layak.

Grafik 3.18
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau, 2022-2023



Tabel 3.51
Perkembangan Indikator-Indikator Indeks (IPM) Kepulauan Riau, 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) (tahun)	74,25	74,36	74,62	74,90
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,87	12,98	12,99	13,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	10,12	10,18	10,37	10,41
Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah)	14.209	14.122	14.469	14.998
IPM	77,69	77,87	78,48	79,08

Perkembangan IPM Kepulauan Riau dan indikator penyusunnya selama 2020-2023 dapat dilihat pada Grafik dan Tabel diatas. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa hanya RLS yang mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1,87 persen menjadi 0,39 persen. Sementara indikator lainnya mengalami percepatan pertumbuhan. HLS mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi sebesar 0,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya 0,08 persen. UHH mengalami sedikit percepatan pertumbuhan, yaitu dari 0,35 persen menjadi 0,38 persen. Sedangkan Pengeluaran Riil per Kapita juga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 3,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya 2,46 persen.



➤ Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk meningkatkan kualitas data, pada tahun 2023, BPS melakukan updating sumber data UHH hasil SP2010 dengan hasil LF SP2020 yang menyediakan data parameter kependudukan terbaru. Hal ini dengan mempertimbangkan perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir. UHH Kepulauan Riau saat lahir terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH Kepulauan Riau yang sebesar 74,25 pada tahun 2020, naik secara berturut-turut hingga mencapai 74,90 pada tahun 2023 yang artinya bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,90 tahun. Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), UHH Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,65 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,29 persen per tahun.

Dalam meningkatkan keberhasilan ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

- Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;
- Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan – bidan di wilayah kerja puskesmas.

Grafik 3.19
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau, 2020 – 2023



Gambar 3.5
Kegiatan yang Menunjang Meningkatkan UHH Kepulauan Riau



➤ **Dimensi Pengetahuan**

Dimensi pengetahuan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Selama 4 tahun terakhir (2020-2023), HLS Kepulauan Riau rata-rata meningkat 0,46 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,95 persen per tahun. Jika dibandingkan tahun 2022, HLS Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,06 tahun (0,46 persen) dan RLS meningkat sebesar 0,04 tahun (0,39 persen). Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana sekolah yang mencukupi;
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi.

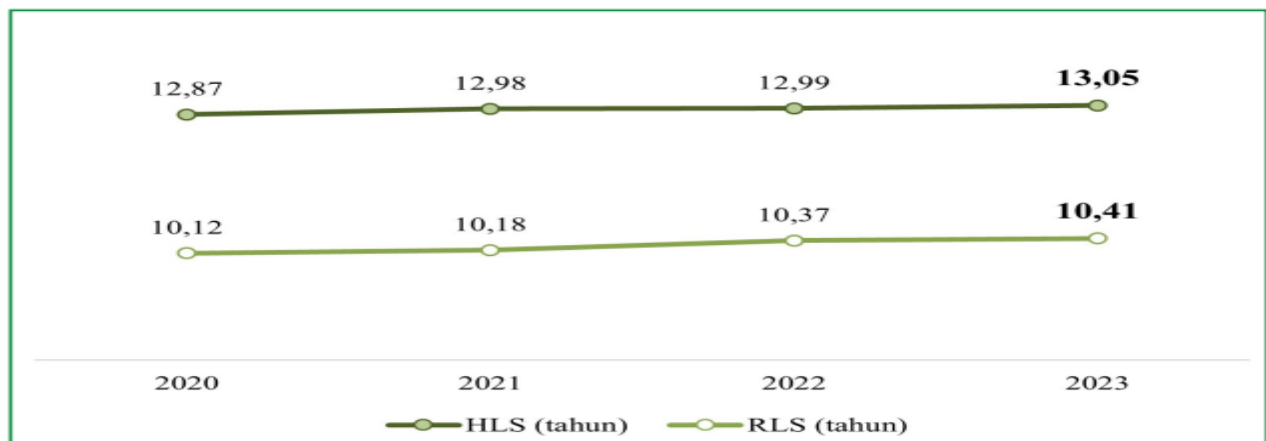
Faktor Penghambat:

Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan namun disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak.

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak tidak sekolah.

Grafik 3.20
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kepulauan Riau, 2020–2023



➤ **Dimensi Standar Hidup Layak**

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023 pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) penduduk Kepulauan Riau mencapai Rp 14.998.000 per tahun. Dimensi standar hidup layak tahun 2023 mulai meningkat kembali, seiring dengan pemulihan ekonomi Kepulauan Riau yang terus berlanjut. Selama empat tahun terakhir (2020-2023), pengeluaran riil per kapita Kepulauan Riau telah meningkat sebesar Rp. 789.000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,83 persen per tahun.

Grafik 3.21
Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kepulauan Riau (ribu rupiah) 2020–2023



Perkembangan IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 Selama empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 77,69 pada tahun 2020 menjadi 79,08 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM “tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59 persen per tahun. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kepulauan Riau Tahun 2020-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

2023 IPM Kepulauan Riau tahun 2023 tumbuh 0,76 persen dibandingkan tahun 2022 dan tumbuh 1,79 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2023 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH); dimensi pengetahuan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran riil per kapita per tahun yang merupakan indikator dari dimensi standar hidup layak.

Grafik 3.22
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau 2020–2023



➤ Realisasi Program dan Anggaran dalam Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.52
Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	343,849,050,681	332.123.887.540	96,59
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	183.690.074.285	177.004.165.941	96,36
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	146.924.996.066	142.125.535.790	96,73
Pengelolaan Pendidikan Khusus	13.233.980.330	12.994.185.809	98,18
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	795.960.700	766.615.950	96,31
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	795.960.700	766.615.950	96,31
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	58.560.229.542	57.423.795.849,88	98,06



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19.962.085.512	19.716.590.319,88	98,77
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	37.748.601.110	36.877.460.179	97,69
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	812.464.100	792.734.375	97,57
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	37.078.820	37.010.976	99,82

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)





SASARAN. 6

Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan

❖ **Angka Partisipasi Sekolah**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia, mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. dengan mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia yaitu:

“Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha / industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035.

10 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar:

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal)
2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah
3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata
6. Membangun sekolah / lingkungan belajar masa depan
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi
9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mendapatkan pendidikan.

Tabel 3.53

Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan Tahun 2023

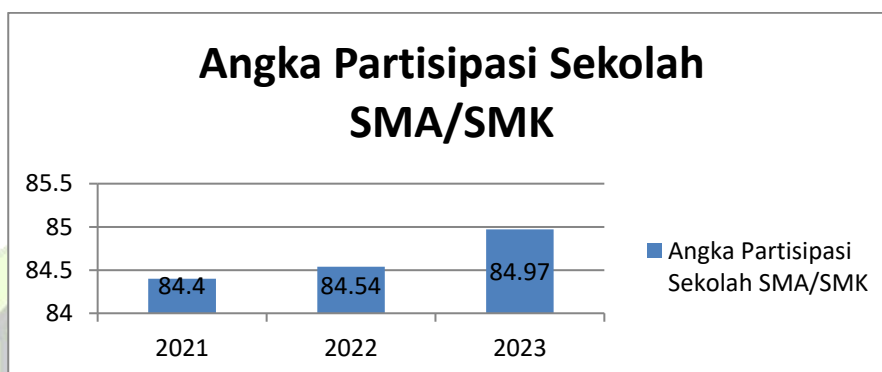
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100	84,97	84,97

Sumber Data BPS

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar 84,97 atau 84,97% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan **Kategori Kinerja BAIK**, Capaian 84,97% merupakan hasil dari perhitungan Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah (79145) dibagi Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun (93145) dikali 100%. Ini berarti bahwa sekitar 84,97% Penduduk usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemenuhan Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Menengah sebesar 100%. Dengan belum mencapai nya target APS 100% menandakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau masih ada sekitar 15% belum atau tidak sedang sekolah pada usia 16-18 Tahun. Kondisi ini mesti dicarikan jalan keluar agar terjadi peningkatan sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai, meskipun saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih mencanangkan wajib belajar 9 Tahun.



Grafik 3.23
Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2023,2022 dan Tahun 2021

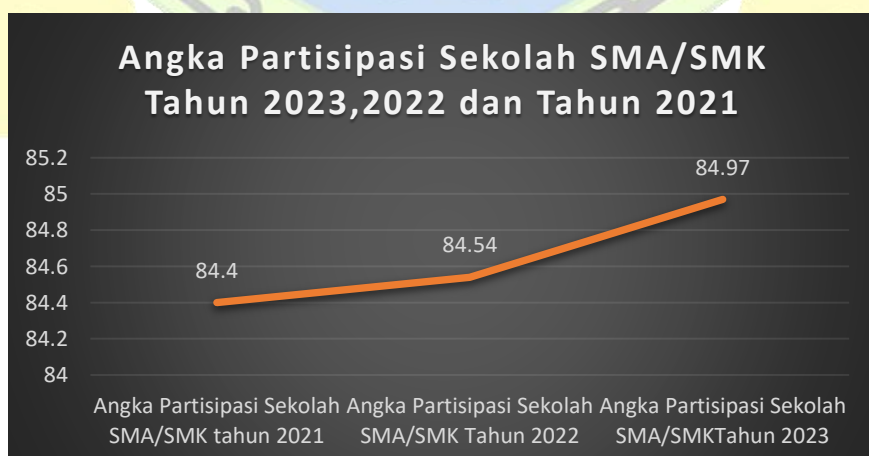


Sumber Data BPS

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada tahun 2023 sebesar 84,97% mengalami kenaikan 0,47 % dengan persentase capaian sebesar 84,97%, dibandingkan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2022 yaitu 84,54%.

Meskipun belum mencapai target 100%, Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau, ini sebagai alat untuk melihat efektivitas program pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan melihat capaian target pembangunan pendidikan, Peningkatan ini juga karena Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang sudah meningkat setiap tahunnya. Program Pemberian Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada tahun 2023 yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengurangi beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya, sehingga anak tetap dapat sekolah. Meski belum mencapai target APS akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) di tahun 2023 mencapai angka 115% dan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai angka 92,29% meningkat pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) di tahun 2023.

Grafik 3.24
Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Adapun program/kegiatan pendukung guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebagai berikut:

1. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah,
2. Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2021 s/d 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.54
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota (Persen)				
	16-18				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Riau	82,9	84,6	84,4	84,54	84,97
Kabupaten Karimun	77,82	77,16	76,91	77,41	76,92
Kabupaten Bintan	90,8	90,20	90,36	90,42	92,54
Kabupaten Natuna	76,54	77,57	77,55	77,59	75,86
Kabupaten Lingga	79,21	80,11	79,06	79,11	80,3
Kabupaten Kepulauan Anambas	87,86	88,90	78,3	83,64	88,36
Kota Batam	81,46	84,74	79,88	82,16	85,85
Kota Tanjungpinang	90,91	91,51	85,83	88,44	87,03

Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2023 mencapai angka 92,54% atau 4,18% lebih tinggi di bandingkan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 88,36%. Pencapaian angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan di bandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi, ini berarti Penduduk usia 16-18 Tahun di Kabupaten Bintan terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Di Tahun 2023 ini Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Kabupaten Natuna memiliki Persentase yang kecil hanya sebesar 75, 56% di banding dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Hal ini menunjukkan bahwa, hanya terdapat 75% penduduk yang berpartisipasi sekolah dari 100% penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Natuna pada tahun 2023, ini



menandakan belum meratanya akses layanan pendidikan di Kabupaten Natuna, sehingga angka partisipasi sekolahnya rendah.

Perbandingan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.55
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK secara Nasional

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2021	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2022	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tahun 2023
Kepulauan Riau	84,40	84,54	84,97
Nasional	73,09	73,15	73,42

"Sumber data BPS"

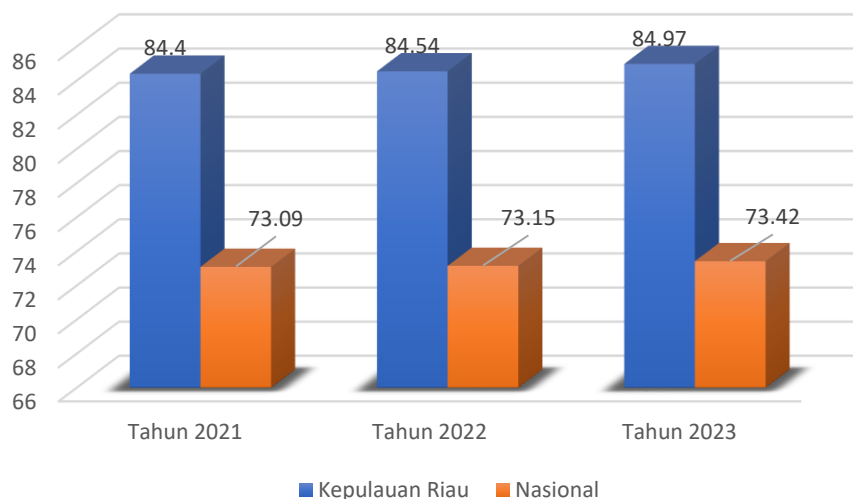
Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK usia 16-18 tahun di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih tinggi 11,55% di bandingkan capaian secara nasional. Ada beberapa kendala yang di hadapi pada tahun 2023 dalam rangka Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam;
2. Pemerataan Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
3. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.
Beberapa hal yang di lakukan Dinas Pendidikan terkait penanganan kendala tersebut di atas yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan secara konsisten untuk memberikan Bantuan transportasi, baik laut, darat, serta bantuan magang bagi Siswa SMK.
 - b. Menyediakan kelas jauh bagi peserta didik yang jauh jaraknya dengan sekolahnya.
 - c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana seperti Ruang Kelas Belajar, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan pemetaan kebutuhan Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan program ketuntasan sesuai arahan Kemendikbudristek.
 - d. Pemetaan bagi siswa yang tidak mampu, sehingga bisa masuk sekolah dengan gratis.



Grafik 3.25
Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

PERBANDINGAN PENCAPAIAN APS SMA/SMK



Dukungan terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 3 (Tiga) Program pembangunan untuk urusan pendidikan yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan,** Pagu Program sebesar Rp 351.230.997.031,- dengan realisasi Rp.333.646.538.263,- atau 94,99%, yang di tunjang oleh 3 Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pagu sebesar Rp. 196.766.454.784 dengan realisasi Rp. 188.817.370.948, - atau 95,96%.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan pagu sebesar Rp. 128.449.053.323 dengan realisasi Rp.122.147.481.924, - atau 95,09%.
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus pagu sebesar Rp. 26.015.488.924, - dengan realisasi Rp. 22.681.685.391 atau 87,19%.
- 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
Program ini di tahun 2023 hanya menjalankan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi pagu Rp. 398.050.000 realisasi 337.798.946 atau 84,86%.
- 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**
Pagu program ini sebesar Rp 70.000.000, - dengan realisasi Rp 62.805.140, - atau 89,72%, yang di tunjang dengan 2 Kegiatan yaitu:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat pagu sebesar Rp 50.000.000, - dengan realisasi Rp 44.949.040, - atau 89,90%.
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah pagu sebesar Rp 20.000.000, - dengan realisasi Rp 17.856.100, - atau 89,28%.

Data alokasi belanja Dinas Pendidikan Tahun 2023 berdasarkan Program terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.56
Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	351.230.997.031	333.646.538.263	94,99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	196.766.454.784	188.817.370.948	95,96
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	128.449.053.323	122.147.481.924	95,09
Pengelolaan Pendidikan Khusus	26.015.488.924	22.681.685.391	87,19
Program Pengembangan Kurikulum	372.946.383	298.440.180	80,02
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	297.946.383	226.444.080	76,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	75.000.000	71.996.100	95,99
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	398.050.000	337.798.946	84,86
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	398.050.000	337.798.946	84,86
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	70.000.000	62.805.140	89,72
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	50.000.000	44.949.040	89,90
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	20.000.000	17.856.100	89,28

Sumber Data: Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

Dalam rangka upaya meningkatkan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan Pemerataan tenaga pendidik dengan penerimaan PPPK di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu menutup lubang-lubang kekurangan tenaga pendidik, terutama di sekolah yang berada di pulau-pulau. Tahun 2023 sebanyak 667 PPPK tersebar di Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Riau.

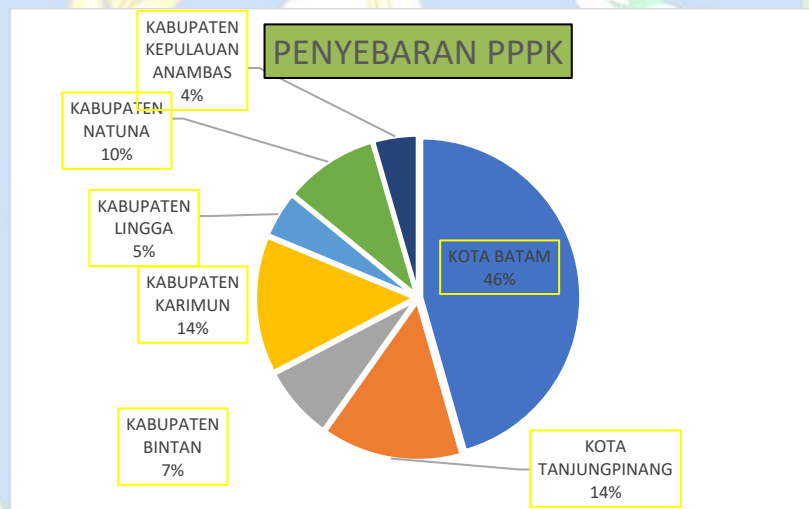


Tabel 3.57
Jumlah PPPK di Provinsi Kepulauan Riau

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PPPK
KOTA BATAM	304
KOTA TANJUNGPINANG	95
KABUPATEN BINTAN	50
KABUPATEN KARIMUN	93
KABUPATEN LINGGA	31
KABUPATEN NATUNA	64
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	30
TOTAL	667

Data Olahan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 3.26
Penyebaran PPPK di Provinsi Kepulauan Riau



➤ **Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya**

a. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bidang pendidikan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022. Kenaikan sebagai bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang Pendidikan. Anggaran yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK bersumber selain dari APBD juga berasal dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran yang tersedia dalam pemberian bantuan biaya personil bagi peserta didik diharapkan mampu menekan angka Putus Sekolah peserta didik hingga bisa mencapai angka partisipasi sekolah secara maksimal.



Dengan adanya anggaran bidang pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang indikatornya salah satunya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK, dan juga Peningkatan anggaran sebagai upaya dalam meningkatkan Mutu dan akses layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penganggaran ditahun 2023 dalam mendukung peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung seperti Penambahan Ruang kelas baru mengalami penurunan karena hampir diseluruh sekolah sudah mulai tercukupi Ruang Kelas Baru di tahun 2022 membangun Ruang Kelas baru sebanyak 143 ruang sedangkan di tahun 2023 penambahan ruang kelas baru hanya sebanyak 71 ruang yang tersebar untuk jenjang Sekolah menengah Atas, sekolah menengah kejuruan dan Pendidikan khusus, ada pun dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan dinas pendidikan terus melakukan upaya Penataan dan Pendistribusian Tenaga Pendidik, dengan penambahan P3K sebanyak 667 di tahun 2023 diharapkan dapat menutup kekurangan guru guru yang ada saat ini.

b. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Program/kegiatan dan Sub kegiatan telah dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi, tim penilai, pemberi masukan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan pendidikan.

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan pada tahun 2023 berkurang karena adanya memasuki masa pensiun dan mutasi, namun demikian komitmen pelayanan tetap dilaksanakan, ini terbukti dengan adanya Cabang Dinas di Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan dalam mengurus administrasi kependidikan. Secara umum dengan Sumber Daya Manusia yang ada saat ini berpengaruh terhadap peningkatan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Perhatian terhadap SDM perlu ditingkatkan khususnya dalam kreativitas dan inovasi agar dapat menjamin kelangsungan Pelayanan pada Dinas Pendidikan.

c. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sudah mulai terpenuhi meskipun tidak secara keseluruhan, akan tetapi pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi pendidikan tetap berjalan dengan baik seperti pengurusan legalisir ijazah, Pengurusan Pindah rayon dan pengurusan administrasi tenaga pendidik (Guru). Di tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka meningkatkan pelayanan telah membangun ruang pelayanan.



SASARAN. 7

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

❖ **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Capaian kinerja Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2023 masih menggunakan data tahun 2022, dikarenakan data IPG Tahun 2023 baru dikeluarkan oleh BPS Pada Agustus 2024. Capaian dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut :

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan



diskripsi capaian terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data disajikan terpilah antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak melalui, rincian IPG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023:

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – Tahun 2023
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	93,30	93,49	93,50	100,31%	100,21%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 target IPG sebesar 93,20 dengan realisasi target sebesar 93,49 serta untuk capaian 100,31%, pada tahun 2023 target sebesar 93,30 dengan realisasi target 93,50 serta untuk capaian 100,21%.

IPG digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kepri dalam kurun waktu tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan, Berikut evaluasi realisasi indikator indeks pembangunan gender Tahun 2018-2022 :

Tabel 3.60
Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,97	93,10	93,31	93,49	93,50

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,97, pada Tahun 2019 meningkat menjadi 93,10, pada Tahun 2020 menjadi 93,31, pada tahun 2021 naik kembali sebesar 93,49 dan pada tahun 2022 menjadi 93,50 jauh diatas target yang sudah ditetapkan yaitu 93,30.

Berikut rincian IPG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.61
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 - 2022

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				
		2022	2021	2020	2019	2018
1	KEPULAUAN RIAU	93.50	93.49	93.31	93.10	92.97
2	Karimun	91.12	91.00	91.25	90.91	91.48
3	Bintan	93.78	93.53	93.12	93.10	92.79
4	Natuna	91.86	91.95	91.67	91.72	91.62
5	Lingga	90.48	89.73	89.25	89.26	89.29
6	Kepulauan Anambas	91.14	90.30	90.27	90.16	90.12
7	Kota Batam	94.75	94.51	94.43	94.42	94.22
8	Kota Tanjung Pinang	97.14	97.14	96.79	96.77	96.47
9	INDONESIA	91.63	91.27	91.06	91.07	90.99

Sumber BPS 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurung waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya bahkan capaiannya melebihi capaian IPG Nasional Tahun 2023.

IPG Tahun 2023 (93,50) menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya (93,49). kenaikan IPG Tahun 2023 dapat dilihat pada tiga komposit pendukung IPG antara lain : Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Pengeluaran Perkapita.

➤ Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel 3.62
Rata – Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2021	2022	2021	2022
KEPULAUAN RIAU	10,30	10,50	10,06	10,23
Karimun	8,49	8,73	7,82	8,14
Bintan	8,95	8,97	8,56	8,68
Natuna	9,14	9,25	8,83	8,84
Lingga	7,38	7,44	6,67	6,93
Kepulauan Anambas	7,65	7,68	6,85	7,10
Kota Batam	11,34	11,36	11,04	11,05
Kota Tanjung Pinang	10,44	10,68	10,26	10,48

Sumber BPS 2023

HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2022 HLS penduduk laki-laki sebesar 12,85 tahun dan penduduk perempuan sebesar 13,15 tahun. Hal ini menunjukkan hampir tidak ada ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah di Provinsi Kepri



antara perempuan dan laki-laki atau juga menunjukkan bahwa hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Indonesia.

Dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia.

➤ **Rata-rata Lama sekolah (RLS)**

Indikator pembentuk IPG selanjutnya adalah RLS seperti halnya pembentuk indikator IPM. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (1) *partisipasi sekolah* (2) *jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki* (3) *ijazah tertinggi yang dimiliki* (4) *tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki*. Selama periode 2021 - 2023 capaian RLS penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan. Kondisi ini ditunjukkan oleh capaian yang mengalami kesenjangan.

➤ **Pada indikator Pengeluaran Perkapita**

Penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan capaian penduduk perempuan. Pada tahun 2021 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi untuk penduduk laki laki penduduk perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat lebih rinci capaian pengeluaran perkapita di provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.63
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)
di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2021	2022	2021	2022
Karimun	20 212	20 614	12 362	12 651
Bintan	18 830	18 830	9 615	9 947
Natuna	21 839	21 839	12 319	12 600
Lingga	21 049	21 240	11 521	11 612
Kepulauan Anambas	17 693	17 971	9 808	9 957
Kota Batam	17 083	17 338	9 173	9 304
Kota Tanjung Pinang	26 356	27 027	17 304	17 748

Sumber BPS 2023

Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2023 disajikan seperti pada tabel di bawah:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.64

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target akhir RPJMD Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau masih diatas target pada akhir periode RPJMD (2023), di mana pada akhir periode RPJMD jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 93,30, namun terealisasi sebesar 93,50 atau dengan capaian 100,21%. Jika di bandingkan secara nasional dengan daerah lain, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 berada pada urutan ke- 6. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Indonesia :

Tabel 3.65

**Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se Indonesia
Tahun 2023**

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE-INDONESIA		
RANGKING	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2022
	INDONESIA	91.63
1	D I YOGYAKARTA	94.99
2	DKI JAKARTA	94.93
3	SULAWESI UTARA	94.89
4	SUMATERA BARAT	94.72
5	BALI	94.36
6	KEPULAUAN RIAU	93.50
7	MALUKU	93.20
8	SULAWESI SELATAN	93.14
9	NUSA TENGGARA TIMUR	92.96
10	SUMATERA SELATAN	92.95
11	JAWA TENGAH	92.83
12	ACEH	92.24
13	SULAWESI TENGAH	92.24
14	BANTEN	92.18
15	JAWA TIMUR	92.08
16	BENGKULU	91.36
17	NUSA TENGGARA BARAT	91.08
18	SUMATERA UTARA	91.06
19	SULAWESI TENGGARA	91.04
20	LAMPUNG	90.58
21	MALUKU UTARA	90.30
22	JAWA BARAT	89.80
22	SULAWESI BARAT	89.79
24	KEP. BANGKA BELITUNG	89.55
25	KALIMANTAN SELATAN	89.44
26	KALIMANTAN TENGAH	89.20
27	JAMBI	88.95
28	RIAU	88.71
29	GORONTALO	88.12
30	KALIMANTAN UTARA	87.85



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

31	KALIMANTAN BARAT	87.61
32	KALIMANTAN TIMUR	86.61
33	PAPUA BARAT	83.61
34	PAPUA	81.04

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 93,50 jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,63, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun beberapa program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi (IPG) antara lain:

1) Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan

Kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD tahun 2023 antara lain **Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** Rp. 135.000.000,- dengan Realisasi Rp. 135.000.000,- (100%), **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi** Rp. 450.000.000,- dengan Realisasi Rp. 440.148.300,-(97,81%). Selanjutnya kegiatan **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota** Rp. 100.000.000,- dengan Realisasi Rp. 97.824.500,- (97,82%). Dan terakhir kegiatan **Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi** Rp. 2.452.414.230,- dengan Realisasi Rp. 2.412.603.567,- (98,38%). Adapun rincian program / kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di tabel bawah ini :

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		FISIK
						Rp	%	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	135.000.000	135.000.000	100	100
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik,	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	450.000.000	440.148.300	97,81	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

		Kewenangan Provinsi	Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota				
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pereangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	409.350.900	400.484.795	97,83	100
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1.872.163.302	1.842.636.220	98,42	100

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian program / kegiatan / sub kegiatan ini ialah :

- a. Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya perempuan untuk bekerja pada sektor formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proaksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi.
- b. Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi.

Kebijakan pembangunan nasional telah menetapkan kesetaraan gender merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Saat ini perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Hambatan

yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan serta capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di mana saat ini laki-laki sebesar 10,30 tahun dan perempuan sebesar 10,06 tahun. inilah menjadi salah satu inisiasi peningkatan Life skill perempuan dan sekolah perempuan di Provinsi Kepulauan Riau.

➤ **Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya**

Dalam upaya mencapai sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 90 orang, dengan rincian 39 org pegawai PNS, 26 Org pegawai PTT dan 25 Org pegawai THL dengan struktur organisasi terdiri dari 1 org Kepala Dinas, 6 orang pejabat Eselon III, 4 org Pejabat Eselon IV atau 28 orang pejabat fungsional yang disetarakan. Pegawai PTT dan THL dilingkungan Dinas P3AP2KB disamping berada di Dinas, juga berada di UPTD PPA, Workshop dan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak, peningkatan keterampilan dan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

➤ Kendala yang dihadapi

- Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas.

➤ Solusi

- Salah satu upaya dilakukan pemerintah selain meningkatkan life skill perempuan adalah mendorong perempuan terlibat dalam perekonomian dan membangun jejaring sosial.
- Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan support system dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	93,30	93,50	100,21%	2.866.514.202,00	2.818.269.315,00	98,32	Efisien



SASARAN. 8
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat maka ditetapkan indikator kinerja yaitu Prevalensi stunting.

Stunting adalah keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya, di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan *eye contact*, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat. Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U $-3\text{ SD} < -2\text{ SD}$).

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin.

Stunting disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya faktor kesehatan saja melainkan faktor multi sektor. Beberapa penyebab stunting diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi. Selain itu, penyebab lain stunting adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (*Ante Natal Care*), Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Studi menyebutkan bahwa 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu. Kurangnya akses Ibu hamil dan Balita ke makanan bergizi seperti makanan bergizi mahal menyebabkan 1 dari 3 ibu hamil anemia. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting, data menunjukkan 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih dan cuci tangan dengan benar masih rendah.

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:



Tabel 3.66
**Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	15,3	15,4*	99,3

Catatan * : Data SSGI tahun 2022

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 maka persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau baik. Prevalensi stunting Tahun 2023 ditargetkan sebesar 15,3%, dikarenakan data SKI tahun 2023 belum dipublikasikan maka capaian tahun 2023 menggunakan data SSGI tahun 2022 di mana prevalensi stunting mencapai angka 15,4%, dengan capaian kinerja sebesar 99,3% atau dalam kategori **baik**.

Sementara itu, capaian pada indikator prevalensi stunting pada tahun 2023 apabila diperbandingkan dengan target nasional maka sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.67
**Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau berbanding target nasional Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	16	15,4*	103,8

Catatan * : Data SSGI tahun 2022

Setiap tahun terjadi penurunan kasus stunting yang cukup signifikan, terlihat dengan perbandingan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019 – 2023. Kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting adalah tenaga gizi terbatas, penimbangan balita masih rendah sehingga belum bisa menjangkau *total coverage* seluruh sasaran balita, alat antropometri di Posyandu belum semua terstandar, masih terdapat Pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor, penggerakan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke Posyandu, Revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu seperti pengadaan antropometri kit.

Penurunan prevalensi stunting terlihat tren penurunan, hal ini bisa dilihat dari perbandingan capaian prevalensi stunting tahun 2023 sudah mencapai 15,4% dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 16,8%. Perbandingan target dan realisasi prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.68
**Capaian Kinerja Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 – 2023**

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi stunting	2019	20,8	16,8	119,4
		2020	20,3	16,8	117,3
		2021	20	16,3	118,5
		2022	15,8	15,4	102,5
		2023*	15,3	15,4	99,3

Catatan * : Data SSGI tahun 2022

Berikut jumlah prevalensi stunting di 7 kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.69
Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023

NO	Kabupaten Kota	2021	2022	2023*
1.	KARIMUN	17,6	13,3	13,3
2.	BINTAN	20	17,8	17,8
3.	NATUNA	17,8	18	18
4.	LINGGA	25,4	18,9	18,9
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14	14
6.	BATAM	17,5	15,2	15,2
7.	TANJUNGPINANG	18,8	15,7	15,7
8.	PROVINSI	17,6	15,4	15,4

Catatan * : Data SSGI tahun 2022

Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Lingga dengan capaian 18,9 % dan terendah di Kabupaten Karimun 13,3%. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami kenaikan prevalensi sebesar 0,2%. Penurunan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,7% disusul dengan Lingga (6,5%) dan Karimun (4,3%).

Berikut disampaikan prevalensi stunting di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2021 – 2023 :

Tabel 3.70
Prevalensi stunting di Indonesia Tahun 2022-2023

NO	Kabupaten Kota	2022	2023
1.	BALI	10,9	8
2.	DKI JAKARTA	16,8	14,5
3.	LAMPUNG	18,5	15,2
4.	KEPULAUAN RIAU	17,6	15,4
5.	DI YOGYAKARTA	17,3	16,4
6.	RIAU	22,3	17
7.	dst		
8.	INDONESIA	24,4	21,6

Catatan * : Data SSGI tahun 2022



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara nasional prevalensi stunting di Indonesia menetap dari tahun 2022 sebesar 21,6% menjadi 21,6% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan data tahun 2023 masih menggunakan data SSGI tahun 2022, disebabkan belum keluarnya data SKI tahun 2023 begitu juga dengan data prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data SSGI 2022, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terendah nomor 4 se-Indonesia setelah Bali, DKI Jakarta dan Lampung dalam hal prevalensi stunting. Untuk pengukuran kinerja, maka capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori **sangat baik** karena sudah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 102,6%.

Keberhasilan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil dari peran aktif lintas program dan lintas sektor. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dapat diturunkan dan mencapai target kinerja ditetapkan karena peran dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam Penanganan stunting sesuai yang diamanatkan pada perpres 72 tahun 2021. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya SK Gubernur Nomor 901 tahun 2022 mengenai Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Edaran Gubernur nomor : B/445.4/25/DINKES-SET/2023 tentang pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan WUS.

Upaya sensitif yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PU dan Dinas Perkim terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
- Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PP dan KB terkait layanan kesehatan dan KB
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
- Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
- Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya.



Upaya spesifik :

- Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
- Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui *sweeping*
- Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting
- Pengadaan Antropometri Kit Dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan
- Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit *serta* Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (*Follow up*)
- Distribusi dan Pemberian PMT lokal bagi Ibu Hamil dan Balita gizi kurang
- Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
- Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI
- Pemberian tablet Fe kepada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun.
- Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA
- Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita
- Sosialisasi Gerakan AKSI BERGIZI di sekolah melalui media massa dan elektronik.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting melalui perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita. Sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah.

➤ **Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Jumlah total anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2023 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Rp. 96.908.433.378,00.- (Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.71
Realisasi Keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
yang Menunjang Penurunan Prevalensi Stunting
Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.341.789.900	1.162.564.734	86,6	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.082.580.000	1.015.933.115	93,8	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	333.079.000	332.266.500	99,7	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.613.046.539	1.597.826.450	99,0	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.405.850.400	1.379.226.940	98,1	
			Total Anggaran	5.776.345.839	5.487.817.739	95,0	Efisien

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” melalui pelaksanaan Program/kegiatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting per tahun 2023 sebesar Rp. 5.776.345.839,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.487.817.739,- atau 95,0%. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran :

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dari alokasi anggaran yang terserap, sebagaimana tercatat pada tabel diatas mampu terserap sebesar 95,0% dengan kategori efisien.



Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan seperti peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu, pelaksanaan promosi kesehatan untuk penurunan stunting melalui berbagai media, pemberian obat gizi dan suplemen bagi ibu hamil/menyusui serta pencegahan anemia bagi remaja putri, pengadaan antropometri kit dan sebagainya. Untuk anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya perubahan Kurikulum Modul Pelatihan dari Kementerian Kesehatan RI sehingga menyebabkan sisa anggaran pada honorarium pelatih dan biaya lainnya, selain itu juga terdapat peserta dari kabupaten/kota yang tidak hadir serta transportasi Anambas yang awalnya menggunakan pesawat berubah menggunakan angkutan laut.

2. SDM :

Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang terlibat untuk penurunan prevalensi stunting berada dibawah Bidang Kesehatan Masyarakat namun untuk pelaksanaannya mencakup lintas bidang, sedangkan untuk pelaksanaan di Kabupaten/Kota didukung oleh tenaga gizi, bidan, perawat, penyuluh kesehatan dan melibatkan peran semasyarakat melalui kader posyandu.





SASARAN. 9
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

❖ **Rasio Elektrifikasi**

Berikut dapat dilihat capaian kinerja Percepatan Infrastruktur Dasar dengan indikator Rasio Elektrifikasi tahun 2023:

Tabel 3.72
Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Rasio Elektrifikasi Tahun

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Rasio Elektrifikasi	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio

Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2023 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik dari PLN maupun Non PLN) sebesar 662.058 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 675.631 RT= 97,99%. Hasil analisis Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 dengan target sebesar 96 Rasio dapat tercapai sebesar 97,99 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 102 Rasio atau dalam kategori **kinerja Sangat Baik**.

Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program ketenagalistrikan seperti kegiatan Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) bagi Rumah Miskin, kegiatan pengadaan mesin genset, kegiatan peningkatan mutu layanan listrik kepada masyarakat serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Energi Baru Terbarukan dengan kegiatan, yaitu:

1. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, berupa bantuan pemasangan instalasi listrik baru kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berlistrik, dan
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan dengan melakukan pengadaan dan pemasangan serta pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (Genset) di pulau-pulau yang belum berlistrik.
3. Pelaksanaan konservasi energi di wilayah Provinsi dengan melakukan penyusunan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah yang membahas mengenai rencana penggunaan energi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

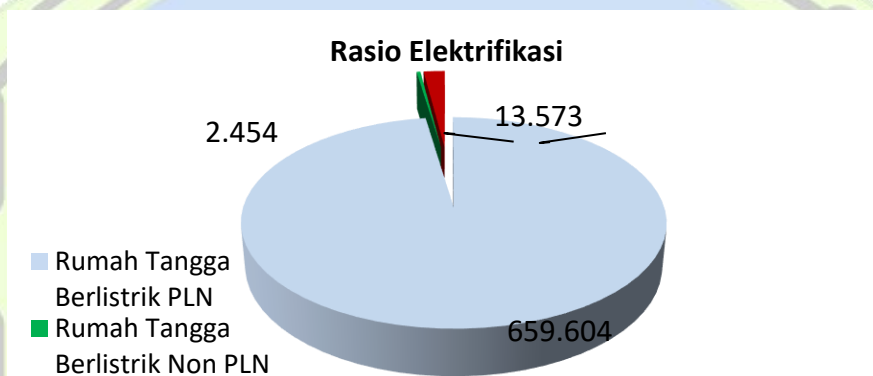


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Capaian kinerja dibidang ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 3.27
Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2023



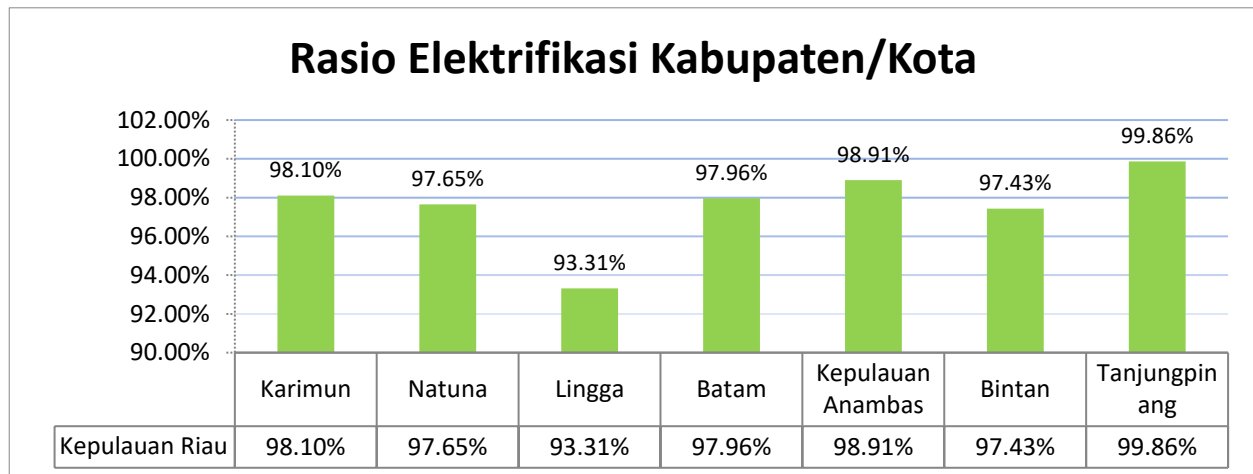
Untuk kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.73
Data Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE (%)
			PLN	Non-PLN	LTSHE	Jumlah		
1	Karimun	83.237	81.519	139	-	81.658	1.579	98,10%
2	Natuna	24.932	24.347	-	-	24.347	585	97,65%
3	Lingga	30.944	28.662	211	-	28.873	2.071	93,31%
4	Batam	369.796	360.392	1.815	63	362.270	7.526	97,96%
5	Kepulauan Anambas	15.203	15.017	20	-	15.037	166	98,91%
6	Bintan	58.866	57.145	206	-	57.351	1.515	97,43%
7	Tanjungpinang	92.653	92.522	-	-	92.522	131	99,86%
Total Provinsi Kepri		675.631	659.604	2.391	63	662.058	13.573	97,99%



**Grafik 3.28
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**



Keterangan:

1. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik PLN berdasarkan Data Unit Layanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN berdasarkan wilayah yang mendapatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga surya secara Komunal baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut realisasi serta capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023 :

**Tabel 3.74
Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2023**

Indikator kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 Rasio	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2022 dengan target 95,50% terealisasi sebesar 96,32% dengan persentase capaian 101%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 97,99 Rasio dari target sebesar 96 Rasio dengan persentase capaian sebesar 102 Rasio.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Adapun perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

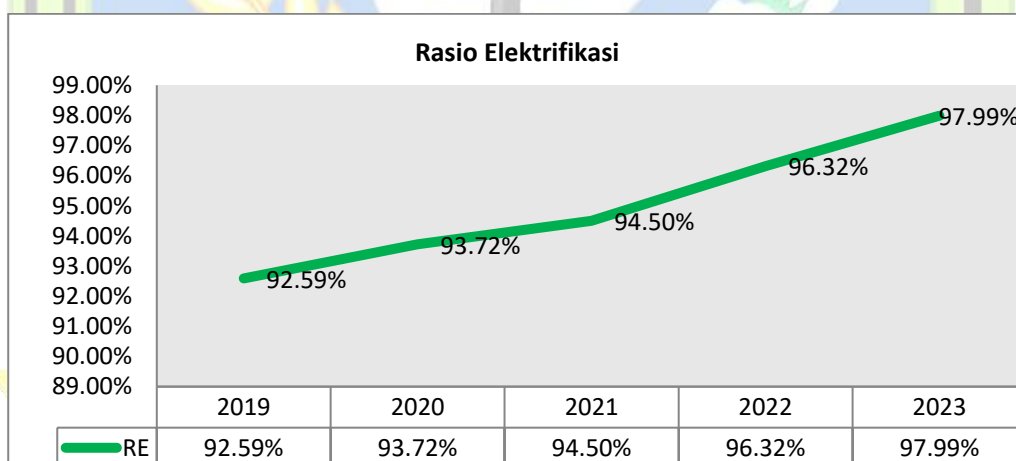
Tabel 3.75
Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022

No	Indikator kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (RT)	539.421	628.596	635.593	650.793	662.058
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	582.570	670.701	672.614	675.631	675.631
3	Rasio Elektrifikasi	92,59%	93,72%	94,50%	96,32%	97,99 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2019 ke tahun 2023. Pada tahun 2019 realisasi rasio elektrifikasi sebesar 92,90%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,72%, lalu pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 94,50%, tahun 2022 juga meningkat menjadi 96,32%, tahun 2023 kembali meningkat menjadi 97,99%.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019-2023 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini :

Grafik 3.29
Pencapaian Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2019-2023



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Rasio Elektrifikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019 Rasio Elektrifikasi sebesar 92,59% sedangkan sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi 97,99 Rasio maka ada peningkatan sebesar 5,42%.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrikasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD.



2. Rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.
3. Adanya peraturan pemerintah yang meminta untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis energi bersih sehingga juga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Melakukan pengadaan pembangkit dengan kapasitas kecil pada pula-pulau dengan jumlah penduduk yang terbatas serta berada pada satu kawasan yang terpusat serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi.
2. Melakukan kerjasama dengan PT. PLN (Persero) untuk melakukan serah terima operasi mesin-mesin genset aset pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melakukan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat secara maksimal serta bekerjasama untuk melakukan *supporting system* pembangkit pada pulau-pulau yang telah dibangun pembangkit listrik tenaga surya oleh PT. PLN (Persero).

Berdasarkan laporan capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023, nilai Rasio Elektrifikasi nasional adalah sebesar 99,78%. Nilai tersebut lebih tinggi dari capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau disebabkan dari kegiatan perluasan jaringan distribusi yang tidak dapat dilaksanakan pada kondisi daerah kepulauan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja:

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Anggaran

Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar 96,4 % dengan realisasi fisik secara keseluruhan sebesar 100%.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Rp. 5.716.057.448,- terealisasi Rp. 5.522.252.106 (96,61%) pada sub kegiatan :
 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.
 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan pagu Rp. 1.708.940.730,-, terealisasi Rp. 1.038.102.478,- (99,27%).

❖ Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

Pengurangan Luas Kawasan Kumuh merupakan Pengurangan Luas Total Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dikurangi Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani pada Tahun n (Tahun Berjalan). Berikut diinformasikan Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan RPJMD 2021-2026:

NO	KOTA/KAB	SK TERAKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA SK	LUAS KUMUH (HA)
1	BINTAN	435/IX/2014	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	13.60
SUB JUMLAH				1	13.60
1	LINGGA	17/KPTS/I/2017	LINGGA	PANGAK LAUT	10.02
2	LINGGA	17/KPTS/I/2017	SINGKEP BARAT	MAROK TUA	13.30
SUB JUMLAH				2	23.32
1	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	PANTAI GELAM	12.38
2	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	TEMOYONG	14.88
3	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	BATU LEGONG	12.18
4	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SAGULUNG	SAGULUNG KOTA	10.70
5	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BATAMKOTA	BALOI PERMAI	11.67
6	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SEKUPANG	SUNGAI HARAPAN	12.60
7	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SEKUPANG	TANJUNG PINGGIR	10.84
8	BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BATUAMPAR	BATU MERAH	14.60
SUB JUMLAH				8	99.85
1	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	TANJUNGPINANG TIMUR	11.79
2	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	DOMPAK	11.16
3	TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	TANJUNGPINANG TIMUR	KAMPUNG BULANG	10.82
SUB JUMLAH				3	3.77
	TOTAL			14	170.54



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Berikut uraian Pengurangan Luas Kawasan Kumuh yang terealisasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.76
Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
Percepatan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	123,73 Ha	135,07 Ha

Hasil evaluasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 dengan target 123.73 Ha hanya terealisasi sebesar 135.07 Ha, sehingga Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 hal ini belum mencapai target. Dibandingkan dengan tahun 2022 Luas Kawasan Kumuh mengalami pengurangan dari 147.24 Ha menjadi 135.07 Ha, ditahun 2023 Luas Kawasan Kumuh hanya berkurang sebesar 12.17 Ha. Sehingga capaian kinerja Indikator Pengurangan Luas Kawasan Kumuh tahun 2023 hanya sebesar 51.77 % atau dalam kategori kinerja “**CUKUP**”.

Tabel 3.77
Data Capaian Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi Kinerja			Target RPJMD	Standar Nasional
			2021	2022	2023		
(5.1.1) Percepatan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	123,73 Ha	381,45 Ha	147,24 Ha	135,07 Ha	170,54 Ha	10.000 Ha

Luas Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan RPJMD 2021-2026 adalah seluas 170,54 Ha yang merupakan kondisi tahun dasar. Pada Tahun anggaran 2022 sudah terealisasi pengurangan seluas 23,30 Ha menjadi 147,24 Ha dari 170,54 Ha. Sedangkan yang diharapkan berkurang pada Tahun 2022 menjadi seluas 145,27 Ha atau berkurang seluas 25,27 Ha, sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2022 sebesar $(23,30 \text{ Ha} : 25,27 \text{ Ha}) \times 100\% = 92,20\%$.

Pada Tahun 2023 pengurangan luas kawasan kumuh ditargetkan menjadi seluas 123,73 Ha dan/atau ditargetkan berkurang 23,51 Ha dari realisasi pengurangan luas kawasan kumuh tahun sebelumnya (147,24 Ha - 123,73 Ha). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, realisasi pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 12,17 Ha atau menjadi 135,07 Ha (147,24 Ha - 12,17 Ha), sehingga Persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh pada Tahun 2023 sebesar $(12,17 \text{ Ha} : 23,51 \text{ Ha}) \times 100\% = 51,77\%$.

Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan saat ini seluas (23,30 Ha + 12,17 Ha = 35,47 Ha), persentase capaian



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 20.80% ($35.47 \text{ Ha} : 170.54 \text{ Ha} = 20.80\%$) dari 170.54 Ha. Sedangkan persentase capaian kinerja pengurangan luas kawasan kumuh secara Nasional yang telah ditangani sampai dengan tahun 2023 seluas 0.35% ($35.47 \text{ Ha} : 10.000 \text{ Ha} = 0.35\%$) dari 10.000 Ha.

Berikut perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2023 dan Tahun 2022:

Tabel 3.78
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	147.24 Ha	92.20%	135.07 Ha	51.77%

Berdasarkan capaian realisasi kinerja Tahun 2022 maka indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.79
Perbandingan Target dan Realisasi Kineja Tahun 2022-2023

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	145.27 Ha	147.24 Ha	123.73 Ha	135.07 Ha

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. Pada Tahun 2022 Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi sebesar 23.30 Ha sedangkan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 12.17 Ha. Adapun Penanganan Kumuh pada setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.80

Lokasi Dan Realisasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun Anggaran 2023

No	Kabupaten/ Kota	SK. Terakhir	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Luas Kumuh (Ha)	Realisasi Tahun 2023	
						Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Anggaran Penanganan Kumuh (Rp)
1	Kota Batam	KPTS.290/HK/X/ 2019	Sagulung	Sagulung Kota	10,70	4,41	1.478.598.000,00
			Batamkota	Baloi Permai	11,67	2,24	749.391.000,00
			Sekupang	Sungai Harapan	12,60	1,79	599.469.000,00
Jumlah						8,44	2.827.458.000,00
2	Kota Tanjungpinang	594 Tahun 2019	Bukit Bestari	Dompak	11,16	2,71	908.480.000,00
			Tanjungpinang Timur	Kampung Bulang	10,82	1,01	339.596.000,00
Jumlah						3,73	1.248.076.000,00
Jumlah Realisasi Pengurangan Dan Anggaran Penanganan						12,17	4.075.534.000,00

Diharapkan kedepan lebih memperhatikan alokasi anggaran dan titik lokasi kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta perhatian dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang sangat mendukung keberhasilan dalam penanganan pengurangan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penanganan permukiman kumuh dilakukan pada lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, berdasarkan penilaian indikator dan kriteria kumuh yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dapat dilihat perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dengan target nasional pada tabel berikut :

Tabel 3.81

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Indikator	Target Nasional	Realisasi Kinerja Provinsi	Capaian Kinerja
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	10.000 Ha	135.07 Ha	1.35%

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan



Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024, salah satunya menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 10.000 ha).

➤ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan realisasi kinerja;

Dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dapat terealisasi antara lain terdapat di Sagulung Kota, Baloi Permai dan Sungai Harapan di Kota Batam seluas 8,44 Ha dan Dompok dan Kampung Bulang di Kota Tanjungpinang seluas 3,73 Ha, belum tercapainya target kinerja indikator pengurangan luas kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh belum adanya kesesuaian anggaran untuk pengurangan luas kawasan kumuh.

Pada tahun berjalan terdapat revisi keputusan kepala daerah kabupaten/kota tentang luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang sebelumnya seluas 170,54 Ha menjadi 374,68 Ha, sehingga pada Tahun 2024 dengan luas 374,68 merupakan kondisi tahun dasar pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Harapan kedepan kepada pemangku kepentingan agar dapat mengalokasikan anggaran yang khusus diperuntukkan pengurangan luas kawasan kumuh dan/atau anggaran yang ada dapat diarahkan dengan baik dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang merupakan tujuan indikator daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pengurangan luas Kawasan kumuh dapat dilakukan dengan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi.

Keseuaian standar teknis dan kelayakan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, antara lain :

- a. Bangunan Gedung;
- b. Jalan lingkungan;
- c. Penyediaan air minum;
- d. Drainase lingkungan;
- e. Pengelolaan air limbah;
- f. Pengelolaan persampahan; dan
- g. Proteksi kebakaran.



➤ Alternatif solusi yang telah dilakukan;

Meninventarisasi kembali paket-paket pekerjaan fisik yang berada pada Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) pada oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau terutama pada titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023.

➤ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan beserta besaran anggaran pendukung;

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman di Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, yang memberi dampak pada pengurangan luas kawasan kumuh, melalui paket-paket pekerjaan fisik di titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

➤ Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dari alokasi anggaran yang terserap, sebagaimana tercatat pada tabel diatas merupakan paket-paket pekerjaan fisik yang berada pada Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) terutama pada titik-titik lokasi yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023. Sedangkan Program Kawasan Permukiman pada kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, belum bisa merealisasikan pengurangan luas kawasan kumuh pada titik lokasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penggunaan sumber daya manusia di lingkungan internal jumlah Sumber Daya Manusia/Personil terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, berjumlah 91 (sembilan puluh satu) orang, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang ASN, 22 (dua puluh dua) orang PTT dan 37 (tiga puluh tujuh) orang THL.

Upaya eksternal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang perlu dilakukan adalah memberikan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk pembinaan pencegahan kelompok agar potensi Kawasan permukiman kumuh tidak bertambah dan menjadi Kawasan Kumuh.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Dokumentasi dalam mendukung capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut;





SASARAN. 10

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

❖ **Rasio Konektivitas**

Indikator Rasio Konektivitas merupakan gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi. Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP) dan Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Tabel 3.82
Data Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) – Tanjungpinang

Tabel 3.83
Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangandi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

NO	Lintas Penyeberangan
1	Dabo – Kuala Tungkal
2	Dabo – Penarik
3	Matak - Midai
4	Midai - Penagi
5	Penagi - Subi
6	Serasan - Sintete
7	Subi - Serasan
8	Tambelan – Sintete
9	Tanjung Balai Karimun – Mengkapan Sei. Selari
10	Tanjung Balai Karimun - Kundur
11	Dabo - Tanjungpinang
12	Tanjung Pinang – Tanjung Balai Karimun
13	Tanjung Uban – Matak
14	Tanjung Uban – Tambelan
15	Tanjung Uban – Telaga Punggur
16	Batam - Jakarta
17	Batam - Medan
18	Telaga Punggur – Dabo
19	Telaga Punggur – Kuala Tungkal



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

NO	Lintas Penyeberangan
20	Telaga Punggur – Mengkapan Sei Selari
21	Tanjung Balai Karimun – Telaga Punggur

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2023 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	Rasio konektivitas = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ • $IK1$ (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • $IK2$ (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: $IK1$ (Angkutan Jalan) : • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu $IK2$ (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) : • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau: 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi ($>5x$



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

- dalam seminggu), bobot = 1
- 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Tabel 3.84
Realisasi Trayek / Lintas Angkutan
Tahun 2023

No	Trayek/Lintas	Tahun 2023		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	21	21	0,5	70%	24

(jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)		(IK1 x bobot angkutan jalan)		Persentase Akhir IK1	
IK1	$= \frac{6 \times 1}{10} = 0,6$	X	30%	=	18 rasio

(jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi)		IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan		Persentase Akhir IK2	
IK2	$= \frac{21 \times 0,5}{24} = 0,4375$	X	70%	=	30,625 rasio

Rasio Konektivitas = IK1 + IK2 = 18 rasio + 30,625 rasio = 48,63rasio



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tingkat Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.85
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas
Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Capaian (%)
1	Rasio Konektivitas	44,25	48,63	109

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Kepulauan Riau pada tahun 2023 ditetapkan sebesar adalah 44,25 rasio maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 109% sehingga capaian kinerja dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut data capaian sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau dengan indikator sasarannya yaitu rasio konektivitas tahun sebelumnya tabel berikut :

No	Trayek/Lintas	Tahun 2022		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	21	21	0,5	70%	24

Dihitung dengan menggunakan rumus rasio konektivitas di atas maka didapatkan rasio sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.86
Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
1	Rasio Konektivitas	44,25	48,63	109%

Pada tabel berikut terdapat peningkatan capaian realisasi atas indikator kinerja rasio konektivitas dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. Pada Tahun 2023 realisasi rasio konektivitas sebesar 48,625 , sehingga tingkat capaian pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai persentase sebesar 109% atau dalam kategori sangat baik.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun 2021 dan tahun 2023 dapat tergambar pada table berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.87
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

TAHUN	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
2021	Rasio Konektivitas	38,42	38,42	100%
2022	Rasio Konektivitas	41,33	44,25	107%
2023	Rasio Konektivitas	44,25	48,63	109%

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sasaran “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas” dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Sedangkan pada tingkat Nasional menetapkan indikator kinerja rasio konektivitas nasional (khususnya angkutan darat) pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 73,5 rasio.

Tabel 3.88
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tingkat Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

URAIAN	Indikator kinerja	Realisasi
Nasional	Rasio Konektivitas	73,5 rasio
Provinsi Kepulauan Riau	Rasio Konektivitas	48,63 rasio
Tingkat Capaian Provinsi dibanding Nasional		66,15%

Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas”. Berdasarkan RPJMD tersebut sampai dengan tahun 2026 target rasio konektivitas ditetapkan sebesar 65 rasio pada tahun 2023 telah tercapai 48,625 rasio atau sudah tercapai 74,80% dari target akhir RPJMD.

Tabel 3.89
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas	65 rasio	48,625 rasio	74,80%

Keberhasilan dalam mencapai target indikator yang ditetapkan tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan untuk mencapai target tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau. Maka Dinas Perhubungan telah membuat Rencana Kerja Tahun 2023 dengan merencanakan melaksanakan program/kegiatan yaitu:



- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek, aspek pertama yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dengan capaian sebesar 100%, sedangkan aspek yang kedua yaitu kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dari jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 83.447.260.359,- dengan capaian realisasi keuangan Rp 78.278.152.059,- atau sebesar 93,81%. Realisasi Keuangan ini dibawah target yang ditetapkan dikarenakan pada 31 Desember 2023 terdapat pekerjaan yang tidak diajukan pembayarannya karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena beberapa hal. Secara rinci capaian realisasi keuangan program dan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja rasio konektivitas tahun 2023 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.90
Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Pendukung

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.403.929.325	7.320.814.459,95	98,88
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	861.751.600	857.467.763,33	99,50
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	5.141.445.725	5.097.669.364,62	99,15
3	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	100.000.000	92.975.871	92,98
4	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	450.783.500	426.780.745	94,68
5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000.000	747.590.927	99,68
6	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.948.500	98.347.789	98,40
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	55.084.888.094	50.935.248.146,34	92,47
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	449.015.000	446.533.989,90	99,45
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam	107.801.000	107.468.000	99,69



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
	Daerah Provinsi, Pelabuhanantar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern			
3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayekantar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	187.811.900	185.957.000	99,01
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau PeralatanJasa Terkait dengan AngkutanLaut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100.360.000	100.040.000	99,68
5	Pembangunan, PenerbitanIzin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	54.239.900.194	50.095.249.156,44	92,36
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	20.958.442.940	20.022.089.452,68	95,53
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.016.486	375.854.645	98,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.779.272.300	11.711.652.242	99,43
3	Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	143.134.000	140.100.571	97,88
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.085.520	97.498.261	97,41
5	Administrasi Kepegawaian Daerah	189.713.000	172.604.401	90,98
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.894.231	1.455.326.529	92,76
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.116.311.796	1.091.095.000	97,74
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.319.894.601	4.174.182.085	96,63
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.359.121.006	803.775.718,68	59,14
JUMLAH		83.447.260.359	78.278.152.069	93,81

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 juga tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang tersedia sesuai struktur organisasi yang ada sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.91
Kinerja Sumber Daya Manusia yang terlibat

No	Sasaran	Kinerja			Sumber Daya Manusia	
		Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan	eksisting
1	Rasio Konektivitas	44,25 rasio	48,63 rasio	109%	290	159

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan dan sasaran yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Perhubungan dibutuhkan pegawai (ASN) sebanyak 290 orang sedangkan yang tersedia adalah 159 orang pegawai (terdiri dari 54 ASN, 22 PTT dan 83 THL).



Sebagian besar pegawai dari pimpinan sampai dengan tingkat staff memiliki andil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan antara yaitu Kepala Dinas yang melakukan pembinaan, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencapaian indikator. Pada tingkat Kepala Bidang (1 orang) dan Kepala Seksi (2 orang), Fungsional Ahli Kebijakan Muda (1Orang) pada Bidang LLAJ yang dibantu oleh staff-staff yang ada sebagai pelaksana Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai target penyediaan trayek angkutan jalan maupun mempertahankan trayek angkutan jalan yang sudah berjalan. Pada Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kepelabuhanan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan prasarana pelabuhan (pelabuhan penyeberangan dan Bidang Angkutan Perairan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan angkutan penyeberangan dan lintas penyeberangannya.

Kedua bidang ini saling berkoordinasi kedalam maupun keluar (Kementerian Perhubungan) yang dibantu oleh staff-staff yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja penyediaan lintas angkutan penyeberangan. Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini didukung dengan pelaksanaan pekerjaan yang diadakan pada tahun 2023, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kapal untuk peningkatan konektivitas transportasi angkutan darat dan perairan.



SASARAN. 11

Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

❖ **Persentase Jalan Kondisi Baik**

Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang perekonomian masyarakat. Salah satu Infrastruktur penting untuk pendukung Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir adalah Infrastruktur Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa antar wilayah. *Jalan kondisi Baik* dapat didefinisikan sebagai jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang segala kebutuhan manusia baik itu dalam kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat. Pekerjaan terkait infrastruktur jalan merupakan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau (Dinas PUPP). Untuk mendukung sasaran strategis dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir, Dinas PUPP menetapkan Indikator kinerja sesuai RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 yaitu Persentase Jalan Kondisi Baik dengan target awal perencanaan 61,75%.

Jalan kondisi Baik merupakan salah satu sasaran yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026. Untuk mencapai sasaran **Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir**, ditetapkanlah indikator kinerja berupa *Persentase Jalan Kondisi baik*. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.92
Capaian Kinerja Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Tahun 2023
(Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2023)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	64,75	70,37	108,68

Untuk tahun 2023, target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis adalah 64,75%, setelah dilakukan survey kondisi jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPP, capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 70,37% dengan persentase sebesar 108,68%.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Untuk menghitung capaian kinerja persentase jalan kondisi baik tahun 2023 adalah membandingkan kondisi kemantapan ruas jalan kondisi baik dengan panjang ruas jalan sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau No 1863 tahun 2016 dengan Panjang ruas jalan 896,45 Km. Untuk tahun selanjutnya di capaian kinerja tahun 2024, indikator kinerja persentase jalan kondisi baik berubah menjadi indikator kinerja persentase jalan kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang) dikarenakan adanya perubahan RPJMD yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Untuk perbandingannya akan menggunakan panjang ruas jalan provinsi terbaru yang sudah dikeluarkan oleh gubernur yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 03 April 2023 dengan panjang ruas jalan 620,76 Km.

Tabel 3.93
Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik

Jalan Kondisi Baik Tahun 2023 (A)	Total Jalan Provinsi Sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau (B)	Capaian Kinerja jalan Kondisi Baik Tahun 2023 (B/A*100)
630,86 KM	896,45 KM	70,37%

Persentase jalan kondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi kondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Analisis terhadap Persentase jalan provinsi kondisi baik Tahun 2023 dapat digambarkan dengan panjang jalan provinsi kondisi baik di tahun 2023 yaitu 630,86 KM dibagi dengan total panjang jalan provinsi yakni 896,45 KM dengan persentase 70,37%. Hasil analisis jalan provinsi kondisi baik dengan target sebesar 64,25 % dapat tercapai sebesar 70,37% sehingga capaian kinerja sebesar 109,53% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun 2023 ada penurunan kinerja sebesar 6,17% dari 76,55% ke 70,37%. Penyebab penurunan kinerja untuk sasaran pembangunan antar pulau dan antar pesisir dikarenakan menurunnya kualitas jalan di hampir seluruh kabupaten/kota (kecuali Tanjungpinang) setelah dilakukannya survey jalan oleh Bina Marga Dinas PUPP. Untuk Data Penurunan Jalan per Kabupaten/Kota akan disajikan di Tabel 3... tentang Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023 dan juga ada penurunan anggaran khusus sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan dari 2022 sebesar Rp 3.462.111.764 menjadi Rp 1.558.050.040 di 2023. Namun dibandingkan dengan target kinerja, realisasi kinerja masih melewati target kinerja yang ditetapkan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.94
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Target Sesuai RPJMD dan Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi Kinerja %
1	Persentase Jalan Kondisi baik (%)	63,25%	76,55%	121,03%
		64,25%	70,37%	109,53%

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD, untuk saat ini masih menggunakan target akhir RPJMD lama, namun untuk tahun depan, target akhir RPJMD terbaru akan menggunakan Target baru sesuai indikator kinerja yang juga akan berubah di RPJMD terbaru.

Tabel 3.95
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan kondisi akhir RPJMD (2026)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	%
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	69,25	70,37	101,62

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Target Akhir RPJMD adalah 69,25% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 70,37 % sehingga Capaian Kinerja sebesar 101,62 %, namun untuk capaian kinerjanya menurun dari tahun 2022 kendati sudah melewati target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut evaluasi capaian indikator kinerja persentase jalan Provinsi kondisi baik dari Tahun 2018-2023:

Tabel 3.96
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Persentase jalan kondisi baik (%)	71,49	73,64	73,24	74,51	75	76,38	63,25	76,55	63,25	70,37

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja persentase jalan provinsi kondisi baik dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dari capaian kinerja tahun 2023 dan tahun sebelumnya, tabel dibawah ini merupakan jalan kondisi baik per kabupaten/kota di Kepulauan Riau.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.97
Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023

Panjang Jalan (Km)		Jalan Kondisi Baik Tahun 2019		Jalan Kondisi Baik Tahun 2020		Jalan Kondisi Baik Tahun 2021		Jalan Kondisi Baik Tahun 2022		Jalan Kondisi Baik Tahun 2023	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Tanjungpinang	70,23	51,56	73,42	52,03	74,09	55,99	79,73	57,46	81,81	57,83	82,34
Batam	112,35	110,63	98,47	116,48	103,68	117,35	104,45	102,85	91,54	96,85	86,20
Bintan	139,10	130,71	93,97	131,17	94,30	132,55	95,29	130,80	94,03	127,2	91,45
Karimun	143,72	112,31	78,15	112,81	78,49	116,96	81,38	116,12	80,80	109,72	76,34
Lingga	236,72	138,35	58,44	138,61	58,55	141,55	59,80	131,66	55,62	119,88	50,64
Anambas	51,00	28,76	56,39	28,76	56,39	29,09	57,04	46,07	90,32	21,4	41,96
Natuna	143,33	87,86	61,30	88,05	61,43	91,19	63,63	101,25	70,64	97,98	68,36
TOTAL	896,45	660,17	73,64	667,91	74,51	684,67	76,38	686,20	76,55	630,86	70,37

Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 8,93 Km melalui Program penyelenggaraan jalan provinsi. Kondisi rusak yang masih harus diperbaiki sepanjang 265,60 km, namun karena akan adanya perubahan target kinerja dari kondisi baik ke mantap serta akan memakai Ruas Jalan Provinsi Terbaru sesuai SK Gubernur tahun 2023, Kondisi rusak yang masih harus diperbaiki akan berubah setelah survei kondisi jalan dengan SK Gubernur terbaru dilakukan. Realisasi kinerja tahun 2023 menurun dari 2022 dikarenakan adanya Penurunan kualitas jalan dari baik ke sedang di hampir seluruh kabupaten/kota di Kepri kecuali Tanjungpinang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan kondisi baik terpanjang pada tahun 2023 berada di Kabupaten Lingga sepanjang 127,2 km dan yang terpendek berada di Kabupaten Anambas dengan panjang 21,4 km. Jika dilihat lebih lanjut untuk kondisi jalan kondisi baik dari tahun 2019-2023, jalan kondisi baik terpanjang di Tahun 2022 berada di Kabupaten Lingga (131,66 Km) (Tahun 2021 berada di Kabupaten Lingga (141,55 Km), Tahun 2020 berada di Kabupaten Lingga (138,61 km) dan 2019 berada di Kabupaten Lingga Untuk Kabupaten Lingga, panjang jalan kondisi baik memperlihatkan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2018-2022 karena Kabupaten Lingga memang memperoleh alokasi anggaran untuk meningkatkan kondisi jalan pada periode waktu tersebut mengingat Kabupaten Lingga memiliki ruas jalan provinsi yang paling panjang, yang membutuhkan alokasi anggaran setiap tahun untuk meningkatkan panjang jalan kondisi baik.



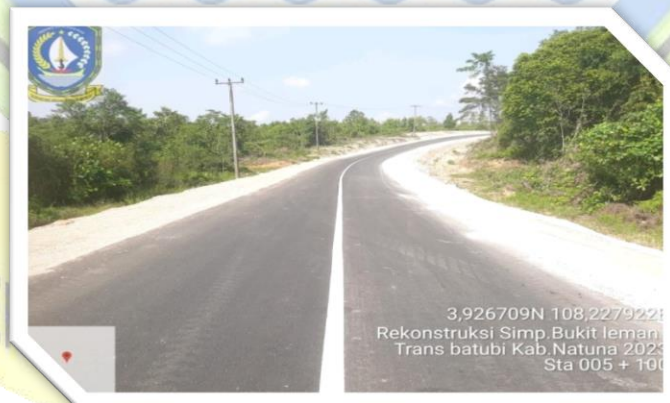
Gambar 3.6
Dokumentasi Peningkatan Jalan Nusantara Kabupaten Bintan



Gambar 3.7
Dokumentasi Pembangunan Jalan Tiangau, Kab Kepulauan Anambas



Gambar 3.8
Dokumentasi Rekonstruksi Simp Bukit Leman – Trans Batubi Kab Natuna



Gambar 3.9
Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuah Kabupaten Karimun (DAK - Tematik 03)



Gambar 3.10
Peningkatan Jalan Belungkur (lanjutan), Kab. Lingga



Untuk menunjang pencapaian kinerja, alokasi anggaran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Untuk mendukung tercapainya sasaran **Pembangunan antar pulau dan pesisir**, alokasi anggaran yang memadai perlu dianggarkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator di anggarakan di Program Penyelenggaraan jalan dan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2023. Beberapa pekerjaan yang mendukung sasaran yang dimaksud berada pada sub kegiatan Pembangunan jalan, Rekonstruksi jalan dan Rehabilitasi Jalan. Berikut adalah program/kegiatan penunjang yang dilaksanakan di tahun 2023. Sebagian besar pekerjaan yang telah dianggarkan di tahun 2023 telah selesai dikerjakan semuanya dan juga analisis efektifitas dan efisiensi sumber daya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.98
Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian
Indikator Kinerja Tahun 2023

Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI					
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN					
Pembangunan Jalan Tiangau, Kab. Kepulauan Anambas	2.000.000.000	1.970.011.000	98,50	100,00	1,50
Pembangunan Jalan Lingkar Serasan, Kab. Natuna	130.000.000	129.596.000,00	99,69	100,00	0,31
Labur Buras Jalan Lingkar Serasan, Kab. Natuna	130.000.000	129.596.000	99,69	100,00	0,31
Pembangunan Jalan Sp. Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga	964.788.000	964.712.900	99,99	100,00	0,01
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	3.224.788.000	3.193.915.900	99,04%	100	0,96
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN					
Peningkatan Jl. Nusantara Kijang Kab. Bintan	700.000.000	678.000.000	96,86	100,00	3,14
Peningkatan Jalan Letung - Kuala Maras Kabupaten Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05)	24.425.000.000	24.424.997.000	100,00	100,00	0,00
Peningkatan Jalan Muka Kuning - Tg. Piayu, Kota Batam	2.877.080.500	2.877.079.200	100,00	100,00	0,00
Long Segmen Penanganan Ruas Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebu Kabupaten Karimun (DAK - Tematik 03)	13.579.642.000	13.579.640.000	100,00	100,00	0,00
Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi, Kabupaten Natuna (DAK - Tematik 01)	11.392.427.000	11.392.000.000	100,00	100,00	0,00
Peningkatan Jalan Belungkur (lanjutan), Kab. Lingga	2.959.099.000	2.959.099.000	100,00	100,00	0,00
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	55.933.248.500	55.910.815.200	99,96	100,00	0,04
SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN					
Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Sungai	3.000.000.000	2.994.963.000	99,83	100	0,17



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
Buluh - Sp. Jagoh, Kab. Lingga					
TOTAL SUB KEGIATAN	3.000.000.000	2.994.963.000	99,83	100	0,17
TOTAL ANGGARAN	62.158.036.500	62.099.694.100	99,91	100,00	0,09

Untuk mencapai sasaran, organisasi membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang tersedia tentunya perlu dikelola dengan baik agar sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat dilihat dari besaran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya terkait. Dari tabel diatas, terlihat efisiensi anggaran sebagian besar pekerjaan tidak sampai lebih dari 10% yang artinya dari anggaran yang diberikan, hampir seluruhnya terealisasi dan terpakai untuk pekerjaan terkait sehingga anggaran yang telah diberikan tidak banyak yang menjadi SILPA dan dari efektivitas pekerjaan, sebagian besar telah selesai dengan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir. Dari tabel diatas juga, kesimpulan yang dapat diambil secara umum adalah bahwa efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 menunjukkan bahwa anggaran yang telah diberikan berhasil terserap dengan baik dan efisiensi anggaran sangat baik serta efektivitas kinerja juga sangat baik karena pekerjaan penunjang program/kegiatan berhasil selesai sesuai waktu yang diharapkan.

Efektivitas dan Efisiensi sumber daya anggaran dapat tercapai karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program kinerja;
2. Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD;
3. Melaksanakan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan;

Penyebab Keberhasilan Capaian Program/Kegiatan penunjang indikator kinerja yang telah dilaksanakan di tabel 3... dan Efektivitas Efisiensi Sumber Daya Anggaran dapat tercapai karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.

Dinas PUPP Provinsi Kepri memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program/kegiatan penunjang kinerja.



Pentingnya SDM yang mendukung agar Program/Kegiatan bisa terlaksana dengan baik serta dapat menyelesaikan hambatan/gangguan selama berlangsungnya Program/Kegiatan yang berlangsung;

2. Upaya Strategis agar optimalnya pencapaian kinerja OPD.

Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD seperti selalu menganggarkan dan melakukan survey kondisi jalan setiap tahun untuk membantu dalam merencanakan infrastruktur transportasi yang efisien dan efektif serta dalam merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan transportasi untuk masyarakat;

3. Perencanaan Anggaran sesuai Kewenangan OPD

Melakukan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD seperti Dinas PUPP Provinsi Kepri yang kewenangannya adalah Jalan Provinsi di Kepulauan Riau dengan Indikator Kinerja persentase jalan kondisi baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin.

Dinas PUPP Provinsi Kepri selalu Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan seperti melakukan rapat mingguan setiap hari senin terkait kemajuan seluruh progres pekerjaan fisik yang ada di Dinas PUPP bersama Kepala Dinas dan *Stalkholder* yang berkepentingan untuk membahas apa-apa saja hambatan/kendala serta apa yang dibutuhkan dalam melakukan suatu proyek agar proyek tersebut dapat terlaksana dengan baik dan hasil kinerja yang maksimal sesuai yang diharapkan.

Berikut ini adalah perbandingan total anggaran pendukung capaian kinerja antara tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.99

Perbandingan Persentase Penambahan Anggaran Pendukung Kinerja Panjang Jalan Kondisi Baik Pada Tahun 2022 dan 2023

No	Program	Tahun	Anggaran	Persentase penambahan Anggaran dari tahun sebelumnya
1	Program Penyelenggaran Jalan	2022	Rp.44.556.794.700	69,69%
2	Program Penyelenggaraan Jalan	2023	Rp 62.099.694.100	

Dari tabel diatas, Persentase penambahan anggaran bertambah dikarenakan untuk tahun 2023 anggaran pekerjaan pendukung capaian kinerja jalan kondisi baik bertambah dari 2022 sekitar Rp 17.542.899.400 sehingga pertambahan persentase anggaran dari tahun lalu sebesar 69,69%.



SASARAN. 12

Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni

❖ **Indeks Pembangunan Kebudayaan**

IPK juga digunakan sebagai indikator pembangunan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) 2021-2026. RPJMD Dengan Misi keempat yang bertemakan “ Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di antaranya yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dapat diwujudkan dengan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, memperkuat moderasi beragama, serta meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:



- (1) dimensi ekonomi budaya;
- (2) dimensi pendidikan;
- (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- (4) dimensi warisan budaya;
- (5) dimensi ekspresi budaya;
- (6) dimensi budaya literasi; dan
- (7) dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023, pembangunan kebudayaan Kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada di provinsi Kepulauan Riau dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 56,50 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 55,13. Pada tahun 2023 untuk realisasi indeks Pembangunan di Kepulauan Riau lebih tinggi dari nasional ,Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (20,97), dimensi pendidikan (80,55), dimensi ketahanan sosial budaya (76,92), dimensi warisan budaya (43,18), dimensi ekspresi budaya (29,00), dimensi budaya literasi (64,73), dan dimensi kesetaraan gender (54,85). Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2023 Dimensi Pendidikan memiliki nilai paling tinggi, sementara dimensi ekonomi budaya memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya sama, Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya dan muatan lokal pada pendidikan cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge-based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait kebudayaan. Capaian kinerja Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya, Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu dapat dilihat dari tabel berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Tabel 3.100

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,90	56,50	88,41

Dari tabel diatas Capaian IPK Provinsi Kepulauan Riau sebesar 56,50 sedangkan target yang ditetapkan sebesar 63,90 sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas. Hasil Analisis indeks pembangunan kebudayaan dengan target sebesar 63,90% hanya dapat tercapai sebesar 56,50% sehingga capaian kinerja sebesar 88,41% atau dalam kategori **Baik**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di provinsi Kepulauan Riau masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal, Pemerintah, lembaga budaya, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya lokal kepada masyarakat Indonesia maupun dunia. Festival budaya, pameran seni, pertunjukan tradisional, dan publikasi budaya lokal bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Melalui promosi yang baik, budaya lokal dapat memberikan daya tarik dan keunikan tersendiri bagi wisatawan mancanegara, serta menjadi sumber rasa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia sendiri. dan dapat meningkatkan ekonomi dalam bidang kebudayaan.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2022 s/d 2023:

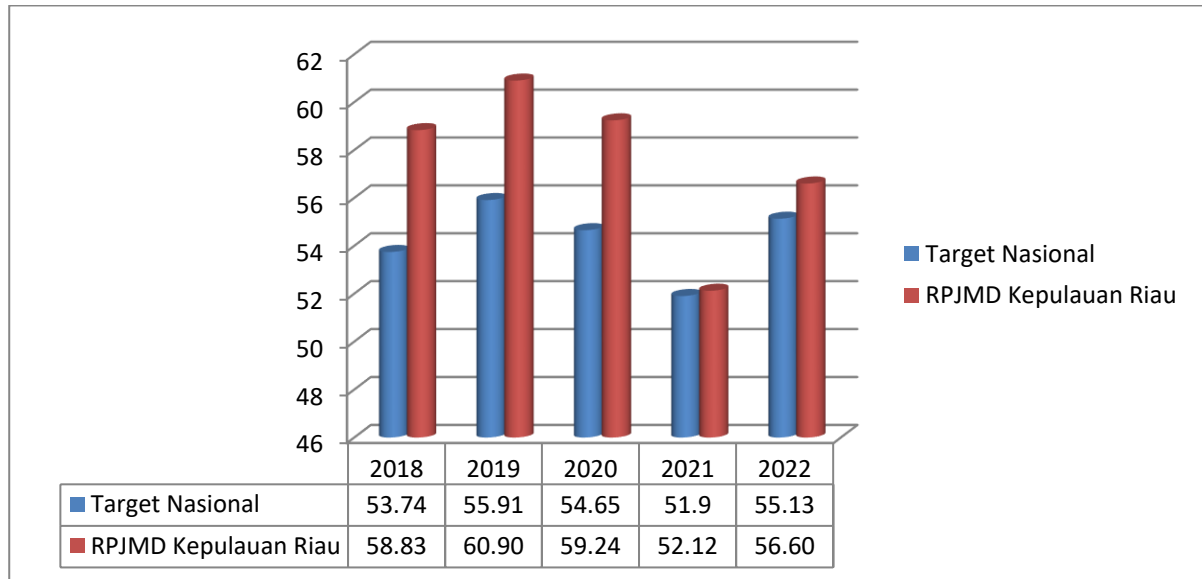
Tabel 3.101

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (RPJMD)

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
1	Indeks pembangunan kebudayaan	52,12	63,90	56,60	88,41	66,90	83,10

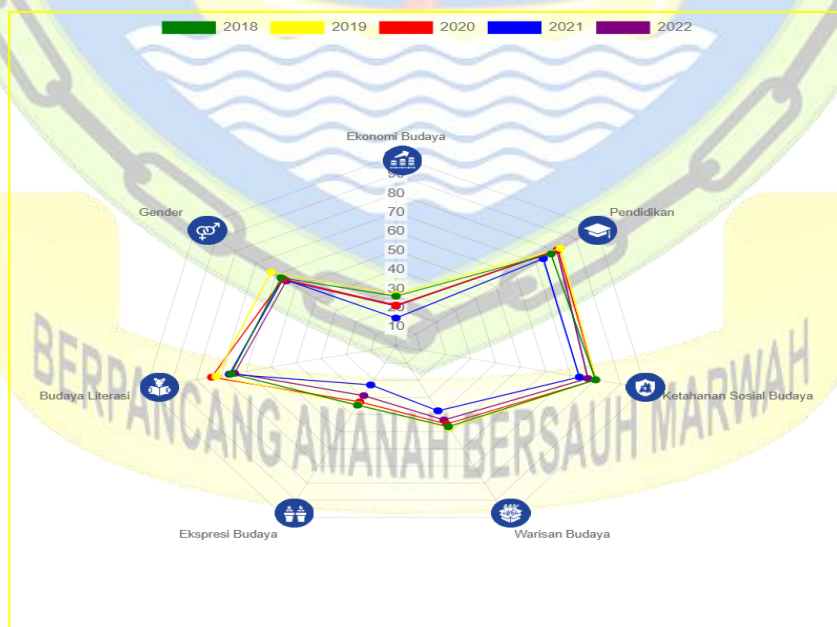


Grafik 3.30
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu dengan nasional



Sumber data IPK direktorat kebudayaan, Bapennas, Bps nasional

Jika dilihat dari tabel dan grafik diatas Skor IPK Provinsi : 56,60 • Di atas skor IPK Nasional (55,13) • Peringkat 7 dari 34 Provinsi Capaian IPK 2022 Provinsi Kepulauan Riau: 52,12 (ada kenaikan sebesar 4,48 poin) Dimensi dengan skor tertinggi ada pada Dimensi Pendidikan, sedangkan yang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya. Pada Tahun 2023 Target akhir RPJMD yang ditetapkan oleh dinas kebudayaan sebesar 56,60%, jika kita bandingkan target yang ditetapkan tahun 2022 dengan realisasi capaian hanya sebesar 52,12 % masih ada 83,10 % capaian ini merupakan kewajiban dinas kebudayaan untuk menyelesaikan sampai dengan Akhir RPJMD





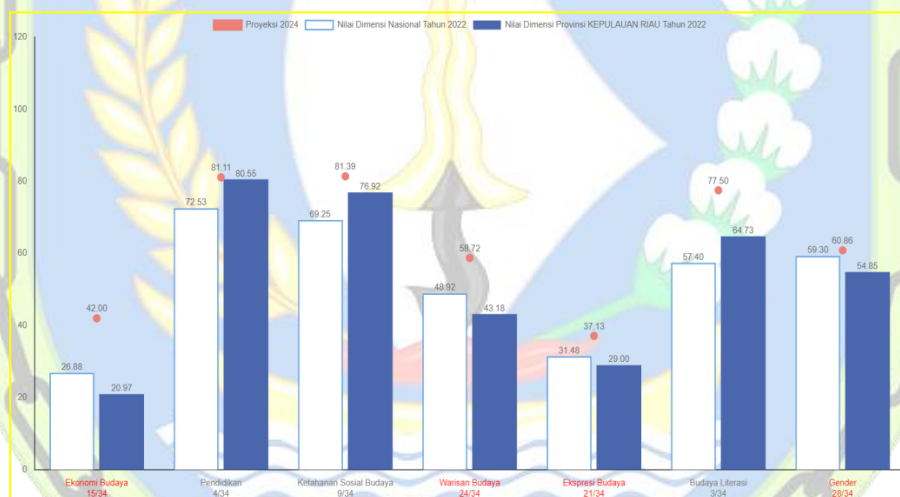
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Dimensi	Nilai indeks	
	Nasional	Kepulauan Riau
Ekonomi Budaya	26,88	20,97
Pendidikan	72,53	80,55
Ketahanan Sosial Budaya	69,25	76,92
Warisan Budaya	48,92	43,18
Ekpresi budaya	31,48	29,00
Budaya Literasi	57,40	64,73
Gender	59,30	54,85
Total	55,13	56.50

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 3 dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka nasional adalah posisi 1 dimensi pendidikan, pada posisi ke-2, dimensi ketahanan sosial budaya pada posisi ke-3, dimensi budaya literasi. 4 dimensi lainnya berada di bawah angka nasional, yaitu : dimensi ekonomi budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender masih sama dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Nilai Dimensi



➤ Analisis IPK 2022 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekonomi Budaya

Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas (persen)



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

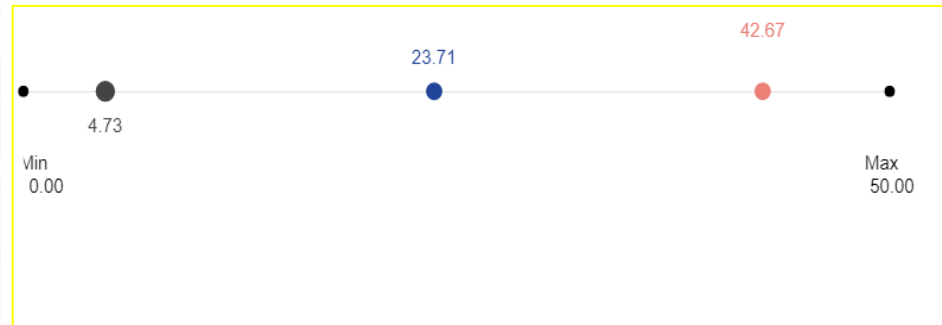


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

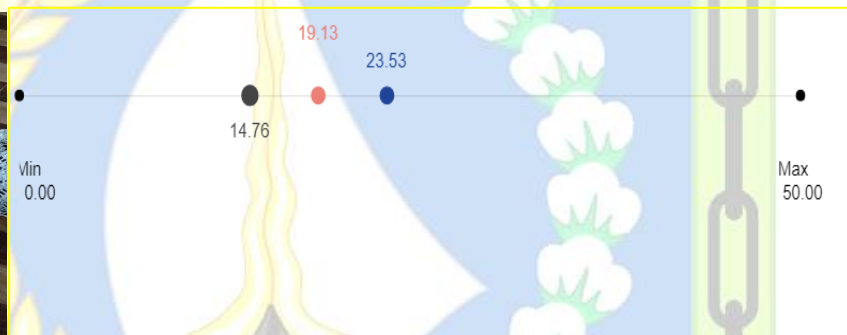
➤ Analisis IPK 2023 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Warisan Budaya

- Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



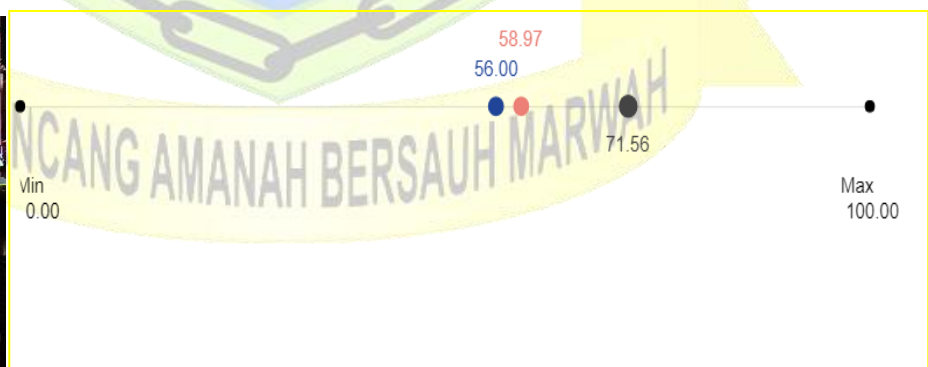
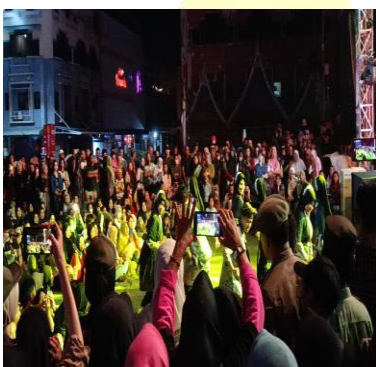
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni



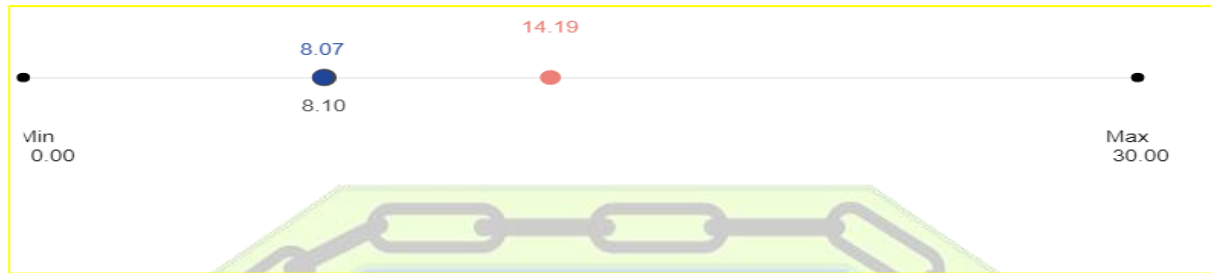
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

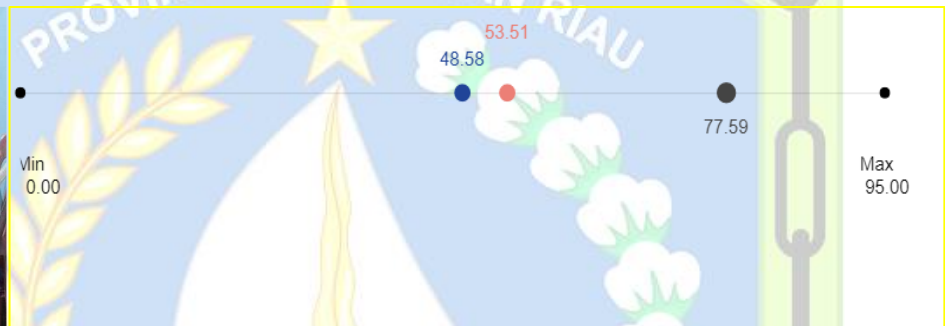
2023

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

➤ Analisis IPK 2023 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekspresi Budaya

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

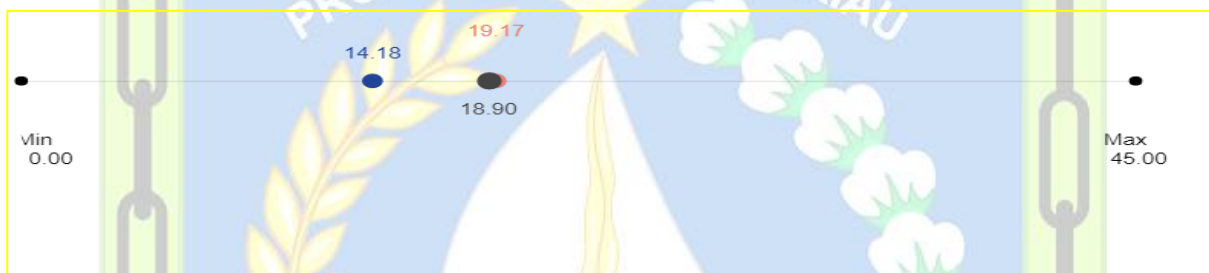


- Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

➤ **Analisis terhadap penyebab keberhasilan /kegagalan yang dapat dilihat dalam pencapaian Indeks pembangunan Kebudayaan sebagai berikut :**

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat beberapa penyebab keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan kebudayaan, diantara lain sebagai berikut :

- a. Memperkuat pondasi budaya dalam rangka pembangunan nasional. Di sisi lain, pembangunan harus berdampak kepada karakter agar masyarakat memiliki sikap tangguh dan kreatif dalam menghadapi dinamika sosial.
- b. Teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal. Website, media sosial, aplikasi smartphone, dan platform digital lainnya dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat Indonesia maupun dunia untuk mengakses informasi dan pengalaman tentang budaya Indonesia. Melalui penggunaan teknologi digital, budaya lokal dapat dikenal secara lebih luas dan dapat terhubung dengan lebih banyak orang, sehingga dapat tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi.

Adapun terdapat juga kendala dalam meningkatkan Indeks pembangunan Kebudayaan yang menjadi tantangan untuk terus ditingkatkan ditahun yang akan datang, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Beberapa wilayah baik di kabupaten/kota maupun provinsi belum menyusun peraturan daerah yang secara khusus mengatur Pemajuan Kebudayaan guna mengakomodasi karakteristik Kebudayaan dan kekhasan permasalahan di setiap daerah
- b. Inovasi layanan dukungan Pemerintah Daerah yang menunjang prakarsa pelaku budaya dalam Pemajuan Kebudayaan masih kurang, misalnya masih sedikit peran mempertemukan program



pelaku budaya dengan sumber pendanaan swasta (*matchmaking*) yang dapat memperkuat berbagai program tersebut dan membuatnya lebih berkelanjutan.

- c. Koordinasi antar pemangku kepentingan Kebudayaan di daerah masih belum optimal. Belum terjalin sinergi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Kebudayaan, dan masyarakat umum untuk menjalankan program Pemajuan Kebudayaan secara berkelanjutan.

Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut atau pun solusi sebagai berikut :

1. Penyuluhan dan Pendidikan Budaya

Satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan menyediakan penyuluhan dan pendidikan budaya yang memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan dan pentingnya budaya mereka. Pendidikan budaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, pelatihan, atau melalui kegiatan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

2. Penciptaan Wadah Partisipasi Masyarakat

Penciptaan wadah partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan dan mempromosikan budaya mereka. Contohnya adalah dengan mendirikan kelompok seni atau komunitas budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam kelompok ini, masyarakat dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengembangan budaya mereka.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

Untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan budaya, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana budaya ini dapat berupa tempat pertunjukan, gedung seni, museum, perpustakaan, studio seni, atau taman budaya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dan mengembangkan budaya mereka

4. Pemberian Dukungan dan Pengakuan

Pemberian dukungan dan pengakuan kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan budaya mereka. Dukungan ini dapat berupa bantuan dana, pelatihan, atau bantuan teknis dalam pengembangan budaya. Selain itu, pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya mereka juga penting untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

➤ AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 20.131.448.632 dengan rincian Belanja Langsung Rp . 8.613.823.589 dan Belanja tidak Langsung Rp 11.517.625.043. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 18.889.313.301 dengan rincian Belanja Langsung Rp 7.748.548.953,00, dan Belanja Tidak Langsung Rp 11.140.764.348,00.

• Target Belanja Dinas Kebudayaan

Tabel 3.102
Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Persentase
Belanja Langsung	Rp.7.748.548.953,00	41,02
Belanja Tidak Langsung	Rp 11.140.764.348,00	58,97
Total	Rp. 18.889.313.301	100

• Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Rp. 7.748.548.953	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran

Tabel 3.103
Anggaran Belanja Langsung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	kinerja				Anggaran		
		indikator	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Efisiensi %
1	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan kebudayaan	63,90	56,60	87,01	7.748.548.953	6.610.853.888	88,27

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa indikator indeks Pembangunan kebudayaan yang telah ditetapkan target nya sebesar 63,90 hanya tercapai sebesar 56,60 % ini dapat dilihat dari dimensi ekonomi budaya yang masih cenderung rendah yang menandakan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di provinsi kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ini terkait Penyerapan anggaran belanja langsung dalam pencapaian sasaran startegis pada tahun 2023 sebesar 88,27 % (Rp 7.489.512.150) dari total anggaran (Rp 6.610.853.888) terdapat 5 program 7 kegiatan 12 sub kegiatan yang mendukung indikator indeks pembangunan kebudayaan, pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang merupakan program pendukung dimensi ekonomi budaya masih perlu di tingkatkan karena untuk ekonomi budaya masih cenderung rendah capaian nya ini berpengaruh besar terhadap capaian indeks pembangunan kebudayaan, terkait dengan realisasi sebesar 88,27 % ini dikarenakan ada nya dana hibah yang tak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak lengkapnya data pendukung dari proposal yang diajukan oleh pihak lembaga sehingga berpengaruh terhadap realisasi yang akan dicapai.

Solusi untuk kedepan dalam peningkatan dimensi ekonomi budaya yaitu Dari segi ekonomi, industri kebudayaan menghasilkan barang dan jasa untuk pasar dan kepentingan publik, serta berdampak pada inovasi industri lain. Sementara dari segi budaya, industri kebudayaan berkontribusi dengan menunjukkan nilai dari barang dan jasa artistik, menaikkan nilai peran individu dalam kegiatan kreatif, mewujudkan nilai sosial dialog lintas budaya, serta mendukung peran seni dalam Pendidikan dan perlu nya komitmen dari kepala daerah untuk menyediakan Pendanaan melalui dana APBD untuk bidang kebudayaan yang lebih optimal dan Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.



➤ **REALISASI ANGGARAN**

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 12 sasaran mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA				ANGGARAN			
		Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Percepatan Pemulihan dan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 – 5,8 %	5,20 %	96 %	143.001.347.610	134.613.452.487	94,13%	Efisien
		Pendapatan Per Kapita	81,91 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	113 %				
		Indeks Gini	0,329 indeks	0,340 indeks	89 %				
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	9,50 %	6,80 %	128,42 %	4.467.054.446	4.349.811.653	97,37%	Efisien
		Angka Kemiskinan	5,74 %	5,69 %	100,87 %	119.970.665.843	113.973.514.417	95,00	Efisien
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 indeks	74,26 indeks	106 %	793.183.305	743.969.049	93,80%	Efisien
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37 indeks	73,56 %	104,53 %	233.479.590.640	225.497.139.204	96,58%	Efisien
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,14 indeks	79,08 indeks	102 %	403.205.240.923	390.314.299.340	96,80 %	Efisien
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	84,97 %	84,97 %	352.071.093.414	334.345.582.529	94,97%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30 indeks	93,50 indeks	100,21 %	2.866.514.202	2.818.269.315	98,32%	Efisien
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,30 %	15,40 %	99,3 %	5.776.345.839	5.487.817.739	95,0%	Efisien
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	96 Rasio	97,99 Rasio	102 Rasio	7.424.998.178	6.560.354.584	88,35%	Efisien
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	123,73 Ha	135,07 Ha	51,77 %	8.158.839.985	8.058.738.161	98,77%	Efisien
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	44,24 Rasio	48,63 Rasio	109 Rasio	83.447.260.359	78.278.152.069	93,81%	Efisien
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Presentase Jalan Kondisi Baik	64,75 %	70,37 %	108,68 %	62.158.036.500	62.099.694.100	99,91%	Efisien
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,9 Indeks	56,50 indeks	88,41 indeks	7.748.548.953	6.610.853.888	85,32%	Efisien



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, memuat pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 yang penyusunannya berdasarkan perjanjian kinerja perubahan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2023 namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya terhadap pencapaian RPJMD, Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai, meskipun capaian tersebut mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda secara global termasuk di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, nampak kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 16 indikator sejumlah 10 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 5 indikator berkriteria baik, 1 indikator berkriteria cukup.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dari PK/IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2023, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Provinsi Kepulauan Riau, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut :

1. Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan upaya gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan ekonomi produktif bagi fakir miskin, serta aspek seni budaya dan olah raga.



2. Aspek Pelayanan Umum

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor strategis pendukung perwujudan pemerintah yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih meningkatkan pelayanan dasar kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan pada daerah yang belum terjangkau layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, dan pelabuhan sebagai sarana prasarana perekonomian rakyat, peningkatan pemenuhan ketersediaan air bersih, listrik dan pelayanan sanitasi.

Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peningkatan sarana belajar mengajar yang memadai dan merata di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Aspek Daya Saing

Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan Mengupayakan peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata ditengah pandemi covid-19 ini dengan menerapkan CHSE penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan), dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan), meningkatkan mutu calon tenaga kerja dalam menghadapi peluang usaha yang tersedia dengan didukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan produktifitas pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

Selain aspek tersebut diatas, agar tetap memperhatikan aspek penting lainnya antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan.



2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perencanaan SKPD dengan merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja yang menunjukkan hasil (outcome).

Akhirnya segenap aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja masa yang akan datang.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Lampiran I : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	- Pertumbuhan Ekonomi	4,9 - 5,8 %	5,20 %	96 %	Baik
		- Pendapatan Per Kapita	81,91 Juta Rupiah	92,93 Juta Rupiah	113 %	Sangat Baik
		- Indeks Gini	0,329 indeks	0,340 indeks	89 %	Baik
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	- Angka Pengangguran	9,50 %	6,80 %	128,42 %	Sangat Baik
		- Angka Kemiskinan	5,74 %	5,69 %	100,87 %	Sangat Baik
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 indeks	74,26 indeks	106%	Sangat Baik
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,37 indeks	73,56 indeks	104,53%	Sangat Baik
5	Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,14 indeks	79,08 indeks	102 %	Sangat Baik
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	84,97 %	84,97 %	Baik
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30 Indeks	93,50 Indeks	100,21 %	Sangat Baik
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,30 %	15,40 %	99,3 %	Baik
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	- Rasio Elektrifikasi	96 Rasio	97,99 Rasio	102 rasio	Sangat Baik
		- Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	123,73 Ha	135,07 Ha	51,77 %	Cukup
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	44,25 Rasio	48,63 Rasio	109 Rasio	Sangat Baik
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	64,75 %	70,37 %	108,68 %	Sangat Baik
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,9 Indeks	56,50 Indeks	88,41 Indeks	Baik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

Lampiran II : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

1. Penghargaan untuk Anggaran Tahun 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan untuk yang Ketiga Belas Kalinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima Opini WTP secara berturut - turut
2. Penghargaan Anugerah Adinata Syariah Tahun 2023 dari Komitmen Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) (KNEKS) Peringkat ke-5 Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah
3. Anugerah Merdeka Belajar Kategori Pemerintah Daerah Sub Kategori “ Transformasi Anggaran dan Regulasi Dalam rangka Bulan Merdeka Belajar Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023
4. Penghargaan TOP BUMD AWARDS Tahun 2023 Kategori TOP Pembina BUMD
5. Penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2023 dari BKKBN RI Kategori Gubernur sebagai Tokoh Yang Telah Memberikan Kontribusi dan Dedikasi Tinggi Dalam Melaksanakan Program Pengendalian Penduduk Dengan Komitmen Luar Biasa
6. Penghargaan dan Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) Tahun 2023 Juara 2 Kategori Event Wisata, Juara 2 Kategori Seni dan Budaya, dan Juara 3 Kategori Destinasi wisata
7. Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Tahun 2023 Kategori Penghargaan Provinsi ke 2 Transformasi Anggaran Sebagai Pemda Transformatif Yang diberikan Oleh Kementrian Pendidikan RI
8. Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Melalui Pemberian Hibah Kapal Patroli Untuk Imigrasi Kelas I Khusus Tanjungpinang - Batam
9. The Best Practice P3DN Sebagai Pemerintah Daerah Terbaik ke 4 se Indonesia Dalam Penggunaan Produk dalam Negeri, dengan Nilai ITKP sebesar 85,0 dan Realisasi PDN Pemprov Kepri Tahun 2022 mencapai 72,10 persen
10. Peringkat ke-2 Realisasi Pendapatan Tertinggi, Belanja Tertinggi dan Peningkatan PAD Tertinggi Se-Indonesia, Realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau terbaik se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 di angka 96,54 persen. Mengalami peningkatan sebesar dimana tahun 2021 di angka 94,52 persen. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 menempati urutan ke-5 Nasional di angka 107,00 persen
11. Penghargaan PPKM Awards 2023 Terbaik I Kategori Pengendalian Pandemi COVID-19 Wilayah Sumatera, Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik dan Kabupaten/Kota Terbaik
12. Penghargaan PPKM Awards 2023: Puskesmas dengan Pengelolaan Vaksin COVID-19 terbaik di Provinsi Sumatera yaitu Puskesmas Batuaji, Puskesmas Meral dan Puskesmas Tanjungpinang.
13. Penghargaan PPKM Awards 2023: BBTKLPP Batam, Laboratorium Klinik Medilab Batam, dan Laboratorium Rumkitban Batam
14. Penghargaan PPKM Awards 2023: Penghargaan Kategori Sentra Vaksin COVID-19 yaitu APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Provinsi Kepri, PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) Provinsi Kepri, dan ASPARNAS (Asosiasi Pariwisata Nasional)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2023

15. Penghargaan PPKM Awards 2023: Penghargaan Kategori Laboratorium dengan Surveilans Genetik yaitu Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Batam
16. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih TOP 5 dengan Nilai “Harmonis” pada survei BerAKHLAK bagi seluruh Kementerian, Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia
17. Penghargaan juara 1 pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023 kategori Desa Wisata Rintisan untuk Pulau Penyengat
18. Penghargaan Indonesia Awards 2023 dalam kategori “Excellent Award for Strategic Initiative.” penghargaan atas inisiatif Gubernur Ansar dalam mengembangkan industri dan ekonomi di Kepulauan Riau, terutama setelah pandemi Covid-19
19. Penghargaan Indonesia Halal Industry Award (HIYA) Tahun 2023 kategori Best Province Program
20. Penghargaan INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN Terbaik ke-2 Nasional kategori Pemerintah Provinsi yang dianugerahkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
21. Anugerah Meritokrasi 2023 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pemprov Kepri mendapat penghargaan sebagai instansi dengan Sistem Merit berpredikat 'Sangat Baik' dengan nilai 330,5 dan Indeks Kualitas Pengisian JPT berpredikat 'Baik' dengan nilai 82,58
22. Anugerah Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dengan predikat Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Zona Hijau Kualitas Tertinggi
23. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Predikat Badan Publik Informatif Terbaik ke-3 Nasional Kategori Pemerintah Provinsi dengan Nilai 96,05
24. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Dengan Predikat Nilai "BB"
25. Anugerah Tanda Kehormatan "Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia" dari Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia
26. Menjadi Pimpinan Delegasi Indonesia dalam 20th Chief Ministers and Governors` Forum IMT-GT Tahun 2022 di Thailand dan Tahun 2023 di Kota Batam, Indonesia
27. Sukses menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2023
28. Sukses Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-90 Tahun 2023
29. Kepulauan Riau Menjadi Daerah Ke-2 Setelah Bali dalam Penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia dengan Tema ” Permata Biru Di Gerbang Utara Indonesia”, Tahun 2023
30. Provinsi Kepri menjadi Penyalur BBM Satu Harga Terbaik Nasional 2023
31. Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “ Sangat Baik “ Tahun 2023 kepada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
32. Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “ Sangat Baik “ Tahun 2023 kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
33. Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “ Sangat Baik “ Tahun 2023 kepada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
34. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 diberikan Kepada RSUD Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau**

2023

35. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 diberikan Kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
36. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 diberikan Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
37. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 diberikan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
38. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 diberikan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

